

MANAJEMEN PENDIDIKAN



Edy Siswanto | Muwafiqus Shobri | Defi Dachlian Nurdiana
Fitriana | Mohammad Adnan | Siti Nurasiah | Nurbaiti
Monovatra Predy Rezky | Turno | Citra Dewi | Reina A. Hadikusumo
Darul Prayogo | Moh. Nasir | Noper Ardi | Sudadi | Akhmad Ramli

Editor :
Sofyan Mustoip

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Penulis :

Edy Siswanto | Muwafiqus Shobri | Defi Dachlian Nurdiana
Fitriana | Mohammad Adnan | Siti Nurasih | Nurbaiti
Monovatra Predy Rezky | Turno | Citra Dewi | Reina A. Hadikusumo
Darul Prayogo | Moh. Nasir | Noper Ardi | Sudadi | Akhmad Ramli

Editor :

Sofyan Mustoip



MANAJEMEN PENDIDIKAN

iv + 124 hlm.; 18,2 x 25,7 cm

No. ISBN : 978-623-09-8378-8
Penulis : Edy Siswanto, Muwafiqus Shobri, Defi Dachlian Nurdiana, Fitriana, Mohammad Adnan, Siti Nurasiah, Nurbaiti, Monovatra Predy Rezky, Turno, Citra Dewi, Reina A. Hadikusumo, Darul Prayogo, Moh. Nasir, Noper Ardi, Sudadi, Akhmad Ramli
Editor : Sofyan Mustoip
Tata Letak : Tim Penerbit
Desain Sampul : Tim Penerbit
Cetakan 1 : Januari 2024

Copyright © 2024 by Aina Media Baswara
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

CV. AINA MEDIA BASWARA
Anggota IKAPI Nomor : 481/JBA/2023
Alamat: Lingk. Manis Tunas II Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Purwawinangun
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat 45512
Email: ainamediabaswara@gmail.com
Website: www.penerbitainamediabaswara.com

KATA PENGANTAR

Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan akan peningkatan kualitas pendidikan semakin mendesak. Oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan buku ini yang merupakan hasil kolaborasi para ahli dan praktisi dalam bidang manajemen pendidikan.

Buku ini merupakan kompilasi dari berbagai gagasan, pengalaman, dan penelitian terkini yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang manajemen pendidikan. Mulai dari landasan filosofi manajemen pendidikan hingga manajemen pendidikan di era digitalisasi, setiap bab dalam buku ini didesain untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta solusi konkret bagi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola lembaga pendidikan.

Para kontributor dalam buku ini merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidangnya, yang telah menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk menyajikan pemikiran-pemikiran terbaik mereka. Kami percaya bahwa buku ini akan menjadi sumber inspirasi dan panduan yang berharga bagi para praktisi, akademisi, dan pihak terkait lainnya yang tertarik dalam pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua kontributor yang telah berperan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan menjadi titik tolak bagi perubahan yang positif dalam dunia pendidikan.

Kuningan, Januari 2024
Tim Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I LANDASAN FILOSOFI MANAJEMEN PENDIDIKAN	
Edy Siswanto	1
BAB II KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA	
Muwafiqus Shobri.....	7
BAB III ASPEK-ASPEK PENTING DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN	
Defi Dachlian Nurdiana.....	18
BAB IV FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDIDIKAN	
Fitriana.....	25
BAB V PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN	
Mohammad Adnan	30
BAB VI PERAN GURU DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN	
Siti Nurasiah	35
BAB VII PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN	
Nurbaiti.....	42
BAB VIII MANAJEMEN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN	
Monovatra Predy Rezky.....	49
BAB IX MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN	
Turno.....	53
BAB X MANAJEMEN EVALUASI PENDIDIKAN	
Citra Dewi.....	59
BAB XI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN	
Reina A. Hadikusumo	65
BAB XII MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENDIDIKAN	
Darul Prayogo	73
BAB XIII MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	
Moh. Nasir	77
BAB XIV MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENDIDIKAN	
Noper Ardi.....	85
BAB XV MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN	
Sudadi	91
BAB XVI MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA DIGITALISASI	
Akhmad Ramli.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
PROFIL PENULIS	

BAB I

LANDASAN FILOSOFI MANAJEMEN PENDIDIKAN

Edy Siswanto

Universitas Negeri Semarang
edysiswanto272@gmail.com

Pendahuluan

Landasan filosofi dalam manajemen pendidikan merupakan fondasi yang memandu tata kelola serta pengembangan sistem pendidikan. Filosofi ini menekankan pada nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang mendasari setiap keputusan dan tindakan dalam konteks pendidikan. Sebagai landasan, filosofi manajemen pendidikan memberikan arah bagi para pemimpin pendidikan untuk memahami tujuan utama pendidikan, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, serta mengembangkan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, filosofi memberikan kerangka kerja yang mengakui pentingnya integrasi antara pendekatan humanistik dan rasional. Filosofi ini mendorong para pengambil keputusan dalam pendidikan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan administratif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, moralitas, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan praktik manajemen. Dengan demikian, landasan filosofi memperkuat komitmen terhadap pengembangan kepribadian dan kesejahteraan siswa, serta keberlanjutan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, filosofi manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya keterlibatan komunitas pendidikan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pendidikan. Filosofi ini mengakui bahwa pendidikan bukanlah tanggung jawab tunggal dari sekolah atau institusi pendidikan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, landasan filosofi manajemen pendidikan memperkuat kolaborasi dan kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembahasan

Pengertian Landasan Filosofi Pendidikan

Landasan filosofi pendidikan adalah sebuah gagasan tentang Pendidikan. Dari sini menghasilkan pijakan pemikiran, sikap dan perilaku tentang pendidikan. Yang darinya muncul pemikiran cabang tentang pendidikan. Landasan filosofi pendidikan dapat dijabarkan dari filsafat umum. Memuat komponen pendidikan yang sangat penting bagi peserta didik, pendidik dan pelaku pendidikan. Berisi Interaksi, tujuan, metode dan lingkungan pendidikan. Ini yang kemudian menjadi dasar diperlukannya landasan filosofi pendidikan, sebagai bagian dari filsafat umum.

Landasan filosofi pendidikan di Indonesia bersumber pada filsafat Pancasila, yang menjadi sumber sistem nilai dalam pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum, yang terkandung dalam *Preamble* UUD 1945.



Mengajarkan pentingnya azas dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Jika mengacu pada filsafat umum, dapat ditinjau dalam *ontologi*, *aksiologi* dan *epistemologi*. Dari pemikiran tersebut muncul pemikiran cabang dalam pendidikan, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi penerapan manajemen pendidikan.

Adapun aliran pemikiran dalam Pendidikan, diantaranya : aliran *idealisme*, *realisme* dan *pragmatisme*. Aliran Pemikiran pendidikan ini akan berimplikasi pada cara pandang dalam memandang filsafat umum. Dari sini diketahui akan dibawa kemana pendidikan kita. Apakah sekedar dilihat dari perspektif “normatif” saja atau “ideologis” dengan filosofi pendidikan. Kita dapat mengetahui apa, mengapa dan bagaimana atau yang dikenal dengan *ontologi*, *epistemologi* dan *aksiologi*. Kita akan melakukan pembelajaran seperti apa, siapa yang kita ajar serta seperti apa hakikat belajar.

Landasan filosofi pendidikan berfungsi menjiwai seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan. Sedangkan ilmu pendidikan sebagai ilmu merupakan landasan ilmiah bagi pelaksanaan pendidikan. Hal ini harus membekali seorang guru dalam mengadakan pendekatan terhadap masalah pendidikan secara komprehensif dan utuh. Dalam kenyataannya setiap ide atau konsep pendidikan yang dikembangkan suatu bangsa selalu berlatar belakang atau berlandaskan pada ajaran filsafat. Untuk menjawab tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan.

Konsep pelaksanaan pendidikan sangat tergantung pada latar belakang nilai-nilai filsafat yang diemban negara. Sebagai gambaran masyarakat ideal yang hendak diwujudkan melalui proses pendidikan. Gambaran masyarakat ideal suatu bangsa berlandaskan pada pandangan filosofi yang dianut bangsa tersebut dan telah melembaga dalam tatanan kehidupan masyarakat dan tumbuh sebagai bagian dari sosio-kulturalnya.

Fungsi filsafat dalam hubungannya dengan ilmu pendidikan adalah memberikan arah dan wawasan mengenai hal yang hakiki tentang Pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan landasan filosofi Pendidikan. Sebab di dalam filsafat pendidikan terkandung asas-asas dan nilai filosofi yang mendasari segenap pelaksanaan Pendidikan.

Bagaimanakah fungsi filsafat pendidikan terhadap ilmu pendidikan dapat diketahui. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang normatif dalam mengambil manusia sebagai objek formalnya. Ilmu pendidikan tidak cukup hanya menjelaskan, meramalkan dan mengontrol bagaimana manusia itu berkembang. Melainkan menjelaskan, meramalkan dan mengontrol bagaimana manusia itu berkembang. Filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu-ilmu yang saling melengkapi. Keduanya sebagai aspek-aspek yang berbeda dari satu disiplin ilmu yakni ilmu inquiry. Bagaimana bertanya dan menyelidiki tentang suatu hal.

Sesuai dengan norma yang berlaku, maka filsafat pendidikan memberi sumbangan asas-azas normatif dalam ilmu pendidikan. yaitu norma filsafat yang sifatnya khusus dalam dunia pendidikan.

Ada tiga fungsi filsafat pendidikan yang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : a). Fungsi Spekulatif. Filsafat pendidikan. Berusaha menjelaskan keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya



dalam satu gambaran dasar sebagai pelengkap data dalam tata ilmiah Ilmu Pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi Pendidikan. b) Fungsi Normatif, pada fungsi ini, filsafat pendidikan menjadi penentu arah pedoman untuk apa pendidikan itu?. Azas ini tersimpul dalam tujuan Pendidikan. Jenis atau corak masyarakat ideal yang bagaimana akan kita bina khususnya norma moral yang yang dicita-citakan oleh manusia. Adapun pertimbangan yang bagaimana yang diberikan oleh filsafat pendidikan bagi kenyataan-kenyataan normatif dan kenyataan ilmiah. Yang akhirnya membentuk kebudayaan. c). Fungsi Kritik, fungsi ini terutama untuk memberi dasar bagi pengertian kritis rasional. Dalam pertimbangan dan penafsiran data ilmiah misalnya data pengukuran analisis dan evaluasi baik tentang kepribadian maupun prestasi belajar (*acivement*). Bagaimana menetapkan klasifikasi prestasi secara tepat dengan data objektif angka-angka statistik juga berfungsi untuk menetapkan asumsi atau hipotesis yang lebih masuk akal. Filsafat harus mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam bidang ilmiah melengkapi dengan data dan argumentasi yang tak dapat diperoleh dari data ilmiah.

Dapat disimpulkan landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat prinsip yang menuntun kita untuk melakukan tindakan profesiona. Melalui masalah-masalah dan kegiatan yang kita hadapi. Selain ketiga landasan filosof diatas, masih banyak jenis landasan filosofi lainnya. Namun di Indonesia, memiliki landasan Filosofi pendidikan tersendiri yaitu Filosofi pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Dengan memahami tentang landasan filosofi pendidikan diharapkan tidak terjadi kesalahan konsep pendidikan yang akan mengakibatkan kesalahan dalam praktek pendidikan.

Pengertian Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno "*Management*", yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata "manajemen" mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) "*Maneggiare*" yang berarti "mengendalikan," terutamanya "mengendalikan kuda" yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan". Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis *manège* yang berarti "kepemilikan kuda" (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah dalam istilah Inggrisnya "*Management*".

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko (2000:8) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu : Manajemen sebagai suatu proses, Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*Science*).

Pengertian Pendidikan

Menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan nonmanusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses penataan ini akan melibatkan pelaksanaan beberapa fungsi manajemen yang oleh pakar manajemen pendidikan sering disebut sebagai POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).

Menurut Usman (2006) manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai:

1. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
3. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dari ketiga definisi manajemen pendidikan menurut Usman (2006) diatas, definisi pertama lebih bersifat teknis didaktif, definisi kedua lebih bersifat administratif edukatif, dan definisi ketiga lebih bersifat proses dalam pengambilan kebijakan publik (*public decision making process*). Pada level birokrasi, khususnya birokrat pengambil kebijakan yang mengurus pengelolaan layanan pendidikan yaitu organisasi perangkat daerah otonom (dinas) yang mengurus pendidikan, apapun namanya.

Fungsi Manajemen Pendidikan

Manajemen adalah merupakan bagian dari proses pemanfaatan semua sumber daya melalui orang lain, serta bekerja sama dengannya, Proses ini dilaksanakan untuk satu tujuan bersama dengan efektif, serta efisien juga produktif. Manajemen yang ada sekolah atau madrasah bisa diberi makna dari beberapa sisi sebagai berikut:



1. Manajemen pendidikan adalah sebagai kerja sama untuk mencapai tujuan.
2. Manajemen Pendidikan sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu.
3. Manajemen pendidikan merupakan suatu system, sebagai bagian dari upaya pendayagunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan.
4. Manajemen Pendidikan sebagai bagian kepemimpinan manajemen.
5. Manajemen pendidikan sebagai proses untuk pengambilan keputusan.
6. Manajemen pendidikan dalam pengertian yang sempit diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan.

Dalam aplikasinya, peranan manajemen sangatlah ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi inilah yang menjadi bagian inti dari manajemen itu sendiri, fungsi-fungsi manajemen menurut ramayulis adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**
Merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Dalam perencanaan terkandung makna pemahaman terhadap apa yang telah dikerjakan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya, serta untuk melaksanakan prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proporsional. Perencanaan program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi utama; pertama, perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber- sumber yang tersedia atau sumber- sumber yang dapat disediakan; kedua, perencanaan merupakan kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber- sumber terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Pelaksanaan**
Merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap organisasi harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.
3. **Pengawasan**
Dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam; memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat; serta memperbaiki kesalahan. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal- hal tertentu.
4. **Pembinaan**
Merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pelaksanaan



manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakannya keempat fungsi pokok tersebut secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan. Melalui manajemen sekolah yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Simpulan

Pendidikan merupakan bekal penting dalam menjalani kehidupan. Tanpa pendidikan manusia akan sulit dalam menentukan dan menjawab tantangan zaman yang selalu berkembang. Pendidikan akan menjamin keberlangsungan pembangunan. Pembangunan yang bertumpu pada kearifan lokal berkolerasi terhadap tercapainya tujuan nasional. Dalam menganalisa usaha pembangunan sumber daya manusia (SDM) perlu memperhatikan tujuan nasional dan sasaran pendidikan. Baik pada jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat pengembangan kepribadian bangsa. Termasuk pengembangan kebudayaan yang bertumpu pada pengembangan SDM pendidikan, mempertahankan kehidupan dan mengembangkan jati diri bangsa.

Dalam sudut pandang Manajemen Pendidikan, adalah sebagai ilmu yang membahas bagaimana Pendidikan bisa dikelola dengan baik, dengan mengakomodir semua kepentingan anggota dalam mencapai tujuan bersama. Dalam mempertahankan eksistensi organisasi Manajemen Pendidikan menjadi penting keberadaannya. Menjadi dasar implemenatsi sehingga organsiasi bisa berjalan seusai visi misi dan tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Dengan Manajemen Pendidikan akan terpenuhinya delapan standar pendidikan. Suasana belajar menjadi bermutu, asyik dan menyenangkan. Indikator penting dalam mengkondisikan peserta didik nyaman dan aman dalam belajar.

Manajemen Pendidikan hadir dalam rangka menjaga roda organisasi bisa berjalan untuk mencapai tujuan. Dengan beberapa prinsip pemakaian SDA yang efektif dan efisien. Konsisten terhadap yang akan dicapai. Memperkuat dasar tujuan Pendidikan Nasional. Inti Manajemen Pendidikan adalah menghasilkan “produktifitas pada organisasi, dengan berpihak pada user”. Pendidikan bisa merubah dari yang belum baik menjadi lebih baik. Diharapkan akan meningkat mutu pendidikan dan kelulusannya. Akhirnya sesuai dengan keinginan dan harapan *stake holders* terkait.



BAB II

KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muwafiqus Shobri

Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean
dosensukses@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan sejarah dan keberagaman budaya yang kaya, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola sistem pendidikan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Kebijakan manajemen pendidikan menjadi poros utama dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai seorang penulis dan ahli kebijakan manajemen pendidikan, penting bagi kita untuk menyelami dan menganalisis dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia. Pada tingkat makro, kebijakan manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan kurikulum hingga pengelolaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan. Masing-masing kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri, dan oleh karena itu, memerlukan tinjauan mendalam dan evaluatif (Ali, 2017; Jaysurrohman et al., 2021).

Indonesia, dengan keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang melimpah, telah mengalami perkembangan signifikan dalam sistem pendidikan sepanjang sejarahnya. Dalam perjalanan pembangunannya, negara ini senantiasa berkomitmen untuk memajukan bidang pendidikan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kokoh. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari peran strategis kebijakan manajemen pendidikan, yang menjadi landasan pokok dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi berbagai aspek sistem pendidikan di Indonesia. Tinjauan kritis terhadap dinamika kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia menjadi semakin relevan dan penting mengingat era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat.

Melalui pendekatan analitis, penelitian ini tidak hanya akan menggali lebih dalam peran kebijakan manajemen pendidikan dalam memandu perkembangan pendidikan nasional, tetapi juga akan menyoroti implikasi praktisnya dalam hal implementasi kurikulum nasional, pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan fasilitas pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembelajaran. Dengan menyajikan gambaran holistik tentang kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman pembaca tentang kompleksitas tantangan, peluang, dan solusi yang muncul dalam upaya memajukan sistem pendidikan di negeri ini. Selanjutnya, pemahaman ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perencanaan kebijakan yang lebih efektif guna mencapai visi pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global di masa depan.



Pembahasan

Sejarah dan Peran Kebijakan Pendidikan

Tinjauan Sejarah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari masa kolonial hingga masa kini, memandang pendidikan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Abdullah, 2007; Hazin & Rahmawati, 2021). Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana kebijakan pendidikan telah berkembang, kita perlu merenungkan peristiwa-peristiwa kunci yang membentuk landasan pendidikan di Indonesia.

1. **Era Kolonial dan Pengaruh Pendidikan Belanda (Abad ke-19 - 1942)**
Masa kolonial Belanda menjadi periode awal yang memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada waktu itu lebih ditujukan kepada para elite pribumi dengan tujuan menciptakan birokrat dan pegawai yang setia kepada pemerintah kolonial. Kurikulum didominasi oleh bahasa Belanda dan pendidikan ala Eropa.
2. **Periode Perjuangan Kemerdekaan (1942 - 1945)**
Selama pendudukan Jepang (1942-1945), pendidikan diubah sesuai dengan ideologi Jepang yang cenderung memberikan pendidikan dasar lebih inklusif. Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia yang baru berjuang untuk menyusun sistem pendidikan nasional yang lebih merdeka dan relevan.
3. **Era Pembangunan Nasional dan Idealisme Pendidikan (1950 - 1965)**
Dalam upaya membangun negara yang baru merdeka, Indonesia mengadopsi konsep pembangunan nasional yang memasukkan pendidikan sebagai instrumen utama. Presiden Soekarno mendorong semangat idealisme dan patriotisme dalam kurikulum, memandang pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas nasional.
4. **Orde Baru dan Pusat Kebijakan Pendidikan (1966 - 1998)**
Ketika Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berkuasa, pemerintah mengambil peran yang lebih aktif dalam merancang kebijakan pendidikan. Diluncurkannya Sapta Taruna pada tahun 1968 menggarisbawahi lima tujuan nasional, yang salah satunya adalah menciptakan manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan tersebut mengarah pada penguatan kontrol pemerintah terhadap kurikulum dan penempatan guru. Pada tahun 1984, sistem pendidikan diubah menjadi "satu tingkat" untuk memastikan kesetaraan dan kemudahan akses. Kebijakan ini membentuk dasar bagi manajemen pendidikan masa kini.
5. **Era Reformasi dan Pergeseran Paradigma (1998 - Sekarang)**
Krisis ekonomi dan reformasi politik tahun 1998 membawa Indonesia ke era baru yang ditandai dengan reformasi pendidikan. Kemerdekaan akademis dan demokratisasi dalam sistem pendidikan menjadi fokus utama. Pada tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dikeluarkan, yang menegaskan pentingnya otonomi pendidikan tingkat daerah. Kurikulum 2013 menggantikan kurikulum sebelumnya dengan pendekatan yang lebih kontekstual, memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal.



Penekanan pada pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis keterampilan juga diintegrasikan.

Peran kebijakan dalam membentuk manajemen pendidikan

Kebijakan pendidikan memegang peranan sentral dalam membentuk struktur manajemen pendidikan di suatu negara. Dengan merumuskan pedoman, standar, dan aturan, kebijakan menciptakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana pendidikan diorganisir, dikelola, dan diselenggarakan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran kebijakan pendidikan dalam membentuk struktur manajemen pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan menentukan kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah, menetapkan standar prestasi akademik, dan mengarahkan pengembangan materi pembelajaran. Ini membentuk inti dari struktur manajemen pendidikan, memberikan landasan untuk proses pengajaran dan pembelajaran (Margareta, 2022).

Kebijakan pendidikan memainkan peran kunci dalam mengembangkan sumber daya manusia pendidikan, termasuk guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ini mencakup kebijakan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan profesional. Kebijakan yang mendukung peningkatan kualifikasi guru dan pengembangan keterampilan mereka memainkan peran signifikan dalam membentuk kapasitas manajemen pendidikan. Selain itu, kebijakan juga dapat menentukan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pendidikan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk sekolah-sekolah, program pendidikan, dan inisiatif pengembangan. Kebijakan dapat menentukan cara pengelolaan dan alokasi sumber daya tersebut, termasuk pemberian dana kepada sekolah berdasarkan kebutuhan dan kinerja mereka. Peran kebijakan dalam pembiayaan pendidikan dapat memengaruhi infrastruktur sekolah, ketersediaan buku dan peralatan, serta keberlanjutan program pendidikan. Manajemen pendidikan di tingkat sekolah harus dapat efisien mengelola sumber daya yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Kebijakan pendidikan juga menetapkan kerangka kerja untuk tata kelola pendidikan di tingkat nasional dan lokal. Ini mencakup struktur organisasi, pembentukan dan peran lembaga pengawas, serta keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Kebijakan pendidikan juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas dan mengakui keberagaman masyarakat. Kebijakan ini dapat mencakup strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, termasuk program beasiswa, bantuan finansial, dan kebijakan dukungan khusus untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Melalui inklusivitas dan pengakuan terhadap keberagaman, kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk struktur manajemen yang dapat mengakomodasi kebutuhan beragam siswa dan memastikan bahwa pendidikan bersifat merata dan relevan bagi semua.

Kebijakan Implementasi Kurikulum Pendidikan

Analisis Kurikulum Nasional dan Implementasinya di Indonesia

Kurikulum nasional adalah landasan utama dalam membentuk struktur pendidikan suatu negara. Di Indonesia, kurikulum nasional memiliki peran sentral dalam menentukan panduan pembelajaran, tujuan pendidikan, dan standar

prestasi siswa. Untuk memahami bagaimana kurikulum nasional dianalisis dan diimplementasikan, kita perlu melihat lebih dekat struktur, perubahan sejarah, dan tantangan yang muncul. Kurikulum Nasional di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan Kurikulum 2013 sebagai upaya reformasi pendidikan. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis keterampilan, karakter, dan kearifan lokal. Perubahan ini dirancang untuk lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Kurikulum 2013 terdiri dari empat pilar utama: 1) Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM); 2) Pengembangan karakter; 3) Saintifik; dan 4) Kontekstual. Kurikulum ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam tema-tema tertentu, memberikan siswa pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang materi pelajaran (Apandi, 2018).

Kurikulum nasional perlu dianalisis sejauh mana ia mencerminkan kebutuhan dan tantangan global. Dengan dunia yang terus berubah, penting bagi kurikulum untuk memastikan bahwa siswa dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terkoneksi. Analisis harus mencakup pertimbangan terhadap keterampilan yang diperlukan di era digital, globalisasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Apakah kurikulum memadai dalam mengintegrasikan literasi digital, keterampilan kolaborasi, dan pemahaman global? Selain itu Kurikulum nasional harus relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Analisis harus memperhatikan sejauh mana kurikulum mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

Analisis kurikulum juga harus mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan telah tercapai. Pencapaian tujuan tersebut dapat diukur melalui hasil tes, proyek, dan penilaian formatif dan sumatif lainnya. Apakah kurikulum memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan? Selain itu, perlu dilihat apakah kurikulum memberikan kesempatan bagi perkembangan keterampilan sosial dan emosional, seperti kepemimpinan, kerja sama tim, dan inisiatif. Ini semuanya merupakan elemen kunci dalam mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia nyata dan kurikulum nasional harus konsisten dengan kebijakan pendidikan nasional yang ada.

Implementasi kurikulum nasional memerlukan pelatihan dan pengembangan guru yang memadai. Guru harus memahami prinsip-prinsip dan tujuan kurikulum untuk menerapkannya dengan efektif. Ini mencakup pelatihan dalam metode pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan integrasi keterampilan 21st century dalam pengajaran mereka. Pelatihan ini tidak hanya membantu guru memahami teori tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Implementasi kurikulum nasional memerlukan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Buku teks, perangkat lunak, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang mencakup investasi dalam teknologi pendidikan, laboratorium, dan fasilitas lain yang mendukung proses pembelajaran.

Peran manajemen dalam memastikan implementasi kurikulum.

Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, manajemen pendidikan berfungsi sebagai tulang punggung yang mendukung dan memastikan



efektivitas implementasi kurikulum di seluruh lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan bertanggung jawab untuk merancang rencana strategis yang memetakan langkah-langkah untuk mengimplementasikan kurikulum. Ini melibatkan pemilihan strategi dan metode pengajaran yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa di tingkat lokal. Perencanaan strategis juga melibatkan alokasi sumber daya yang efisien, termasuk dana, waktu, dan personel. Manajemen harus memastikan bahwa semua unsur kebijakan kurikulum dapat diintegrasikan ke dalam rencana strategis lembaga pendidikan (Sitompul, 2022).

Manajemen memiliki tugas penting dalam pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya yang mendukung implementasi kurikulum. Ini mencakup memastikan ketersediaan buku teks, perangkat lunak, fasilitas, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Manajemen juga harus mengelola alokasi guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang kurikulum dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa. Pemilihan guru dengan keterampilan dan latar belakang yang sesuai juga menjadi pertimbangan penting. Manajemen harus memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum dan dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam pengajaran sehari-hari. Ini juga termasuk memfasilitasi peluang pengembangan profesional dan pertukaran pengetahuan antar guru.

Manajemen pendidikan perlu bersifat adaptatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Dengan perkembangan teknologi dan dinamika dunia pendidikan yang cepat, manajemen harus mampu merespon dengan cepat dan mengintegrasikan inovasi ke dalam implementasi kurikulum. Ini juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Manajemen yang adaptif dapat merancang strategi untuk mengatasi perubahan kebijakan atau tantangan operasional yang dapat memengaruhi implementasi kurikulum. Selain itu Manajemen pendidikan juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi diri secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem manajemen pendidikan itu sendiri berfungsi secara efektif. Ini mencakup evaluasi kebijakan, prosedur operasional, dan efektivitas tim manajemen.

Kebijakan Pengembangan SDM Pendidikan Strategi Meningkatkan Kualitas SDM

Pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan dalam membentuk mutu pendidikan tak dapat dipandang sebelah mata. Meningkatkan kualitas mereka menjadi landasan utama dalam menghadapi dinamika pendidikan modern. Strategi yang berfokus pada pengembangan kualitas ini menjadi suatu keharusan guna menciptakan lingkungan belajar yang memadai dan relevan (Safitri et al., 2022). Langkah pertama dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan adalah dengan melakukan pengidentifikasian kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Dalam proses ini, dilakukan analisis mendalam terhadap keterampilan pedagogis, penguasaan teknologi, dan aspek kesejahteraan mental. Dengan memahami tantangan ini secara holistik, dapat dirancang program pengembangan yang lebih tepat sasaran.



Langkah kedua merancang rencana pelatihan jangka panjang menjadi langkah strategis berikutnya. Program ini harus mencakup berbagai aspek pembelajaran, mulai dari keterampilan pedagogis hingga penguasaan teknologi. Rencana tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan langkah-langkah jelas, alokasi sumber daya yang memadai, dan metode evaluasi yang memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pelatihan. Kemudian ketiga melakukan pendekatan inovatif dalam metode pelatihan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Ini mencakup penggunaan teknologi pendidikan, pembelajaran berbasis proyek, simulasi kelas, dan kolaborasi antar-guru. Dengan memasukkan elemen-elemen pembelajaran yang menantang dan bermakna, program pelatihan menjadi lebih relevan dan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran.

Keempat pengembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan perlu memberikan penekanan khusus pada pengembangan keterampilan pedagogis. Ini mencakup diferensiasi instruksional, penilaian formatif dan sumatif, manajemen kelas, dan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Guru perlu diberdayakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang dan mendukung perkembangan siswa. Dan terakhir, dalam era teknologi, strategi meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan juga harus mencakup pelatihan teknologi pendidikan. Mereka perlu dilatih dalam integrasi teknologi ke dalam proses pengajaran, pengelolaan data, dan komunikasi dengan siswa dan orang tua. Pelatihan ini mencakup aplikasi praktis teknologi seperti e-learning, platform pembelajaran daring, dan penggunaan perangkat lunak edukatif. Dengan demikian, guru dan tenaga kependidikan dapat lebih siap menghadapi tuntutan pendidikan yang semakin canggih.

Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan SDM Profesional

Pentingnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas tidak dapat dipungkiri dalam membentuk masa depan pendidikan yang unggul. Dalam konteks ini, kebijakan pelatihan dan pengembangan profesional menjadi landasan utama untuk meningkatkan kualitas mereka. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dukungan, memberdayakan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan agar para profesional pendidikan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembelajaran siswa.

Langkah awal dalam merancang kebijakan ini adalah identifikasi kebutuhan dan prioritas pelatihan. Analisis mendalam dilakukan untuk memahami tren pendidikan, perkembangan kurikulum, serta tuntutan global dalam dunia pendidikan. Dengan pemahaman yang kuat tentang tantangan dan peluang, kebijakan dapat difokuskan pada area-area yang paling mendesak dan relevan untuk pengembangan profesional. Kebijakan ini memperkuat rencana pelatihan terstruktur yang mencakup berbagai tingkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Rencana tersebut mencakup topik-topik seperti metode pengajaran inovatif, integrasi teknologi pendidikan, manajemen kelas yang efektif, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan khusus siswa (Ariani et al., 2023; Nurdyansyah & Fahyuni, 2016). Dengan menyusun kurikulum pelatihan yang holistik, kebijakan ini memastikan bahwa para profesional pendidikan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks di dalam dan di luar kelas.



Kebijakan pelatihan dan pengembangan profesional juga mendorong pendekatan kolaboratif antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga-lembaga pelatihan. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem di mana pengalaman dan pengetahuan dapat dipertukarkan, memperkaya pengembangan profesional secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan ini memastikan adanya dukungan berkelanjutan untuk pelatihan, bukan hanya sebagai inisiatif satu kali tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Kebijakan ini mencakup sistem evaluasi kinerja yang berkesinambungan dan responsif. Evaluasi ini membantu mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan manajemen sekolah. Dengan adanya data yang kuat, kebijakan dapat disesuaikan untuk mengatasi kelemahan dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pendidikan yang terus berubah.

Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan **Kebijakan untuk Meningkatkan Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan yang berkualitas memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan mendukung perkembangan siswa. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan, pemerintah dan pemangku kepentingan terlibat dalam merancang kebijakan yang strategis dan berkelanjutan. Pertama-tama, kebijakan ini menetapkan peningkatan infrastruktur fisik. Bangunan sekolah harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ketat. Hal ini melibatkan renovasi dan pembangunan kembali fasilitas yang sudah ada, serta pembangunan gedung baru yang memadai. Dengan memastikan kecukupan dan kelayakan infrastruktur, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi proses belajar-mengajar. Selanjutnya, kebijakan ini mendorong integrasi teknologi dalam fasilitas pendidikan. Penggunaan teknologi pendidikan, seperti perangkat lunak pembelajaran interaktif, komputer, dan koneksi internet, memberikan siswa akses lebih luas ke informasi dan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis (Hasanbasri & Nurhayuni, 2023).

Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya fasilitas penunjang, seperti perpustakaan dan laboratorium. Investasi dalam perpustakaan yang baik dapat menjadi sarana pengetahuan yang berkelanjutan, memberikan siswa akses ke bahan bacaan yang beragam dan mendukung pengembangan literasi. Laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern memungkinkan eksperimen dan pembelajaran praktis, menggali potensi ilmiah dan teknis siswa. Langkah keempat dalam kebijakan ini adalah peningkatan aksesibilitas fasilitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang memadai dan kebijakan distribusi yang adil, fasilitas pendidikan dapat tersebar merata di seluruh wilayah. Ini berarti bahwa siswa dari daerah pedesaan atau kawasan terpencil tidak akan terpinggirkan dari manfaat fasilitas pendidikan yang memadai (Lestari, 2022). Terakhir, kebijakan ini mengusung konsep pengelolaan berkelanjutan. Fasilitas pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, efisiensi energi, dan pemeliharaan jangka panjang. Dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan

saat ini tetapi juga melindungi sumber daya dan lingkungan untuk generasi mendatang.

Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan mengarah pada transformasi sistem pendidikan menuju masa depan yang lebih cerah. Fasilitas yang memadai bukan hanya tempat pembelajaran, tetapi juga tempat di mana mimpi-mimpi diwujudkan, dan potensi setiap siswa dapat berkembang secara maksimal. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam membangun dasar yang kuat untuk pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Tantangan Pembiayaan dan Pengelolaan Fasilitas Pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang memadai adalah fondasi utama dalam membentuk lingkungan belajar yang efektif. Meskipun penting, pembiayaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan seringkali dihadapkan pada serangkaian tantangan yang menantang dan kompleks. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pembiayaan fasilitas pendidikan adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah sering dihadapkan pada tekanan untuk memprioritaskan alokasi dana ke berbagai sektor, dan pendidikan mungkin tidak selalu mendapatkan prioritas yang cukup. Kurangnya sumber daya keuangan dapat menghambat upaya untuk membangun, merenovasi, atau memperluas fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pembiayaan yang inovatif dan kebijakan anggaran yang lebih progresif untuk memastikan kecukupan dana yang diperlukan.

Selanjutnya, tantangan pengelolaan fasilitas pendidikan berkaitan dengan kurangnya kapasitas manajerial. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan adalah kunci untuk memastikan infrastruktur pendidikan berfungsi secara efisien. Namun, dalam banyak kasus, kekurangan tenaga terlatih dalam manajemen fasilitas dapat menyebabkan pengelolaan yang suboptimal. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan manajerial menjadi imperatif untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Kesenjangan regional menjadi masalah serius dalam pembiayaan dan pengelolaan fasilitas Pendidikan (Agustin & Hariyani, 2023). Daerah terpencil atau miskin sering kali mengalami ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas fasilitas pendidikan.

Selain itu, partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan juga menimbulkan tantangan tersendiri. Sementara investasi swasta dapat memberikan tambahan dana, risiko komersialisasi pendidikan dan ketidaksetaraan akses perlu diwaspadai. Pengaturan yang bijaksana dan transparan perlu diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan keuangan dan tujuan inklusi pendidikan. Terakhir, perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim dan risiko bencana alam, dapat memberikan dampak serius pada infrastruktur pendidikan. Fasilitas pendidikan yang tahan terhadap bencana dan ramah lingkungan menjadi semakin penting. Integrasi aspek keberlanjutan dan tahan bencana dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan diperlukan untuk melindungi investasi jangka panjang.

Dalam menanggapi kompleksitas tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Kebijakan yang terarah pada peningkatan pembiayaan, peningkatan kapasitas manajerial, kesetaraan regional, regulasi yang bijaksana



terhadap peran swasta, dan ketahanan terhadap perubahan lingkungan menjadi landasan bagi upaya bersama dalam membangun dan menjaga fasilitas pendidikan yang memberdayakan dan berkelanjutan. Dengan memahami tantangan ini, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga menjadi investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Peran Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan sistem pendidikan bergantung pada kolaborasi yang erat antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas, relevansi, dan inklusivitas pendidikan (Santi et al., 2023). Orang tua memiliki peran kunci dalam membentuk kebijakan pendidikan. Mereka tidak hanya menjadi mitra sekolah, tetapi juga agen perubahan yang memahami kebutuhan spesifik anak-anak mereka. Melalui partisipasi orang tua, pertemuan sekolah, dan forum diskusi pendidikan, orang tua dapat menyampaikan perspektif mereka, menginformasikan kebijakan sekolah, dan merancang solusi bersama untuk meningkatkan pengalaman pendidikan anak-anak mereka.

Komunitas lokal memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan potensi pendidikan di wilayah mereka. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan mencerminkan kebutuhan khusus dan konteks lokal. Melibatkan pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan kelompok sukarelawan dalam forum kebijakan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif dan relevan bagi seluruh komunitas. Penting untuk menciptakan jembatan yang kuat antara sekolah dan masyarakat. Program partisipatif seperti pertemuan reguler antara pihak sekolah dan warga, proyek-proyek pengembangan bersama, dan kegiatan sosial dapat memperkuat hubungan ini. Dengan cara ini, masyarakat merasa terlibat secara langsung dalam kehidupan sekolah, dan sekolah memanfaatkan pengetahuan dan dukungan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan.

Ketika masyarakat memahami keberagaman di antara siswa, kebijakan pendidikan dapat lebih inklusif. Masyarakat berperan dalam mendukung dan memperjuangkan kepentingan kelompok marginal, termasuk siswa berkebutuhan khusus, kelompok etnis tertentu, atau masyarakat miskin (Habib, 2021). Kolaborasi aktif antara sekolah dan organisasi masyarakat dapat menciptakan solusi yang berdaya guna untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok-kelompok ini. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan pendidikan. Dengan menghargai peran masyarakat sebagai mitra penting dalam pengambilan keputusan pendidikan, dapat diciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berdaya guna bagi seluruh anggota masyarakat. Kolaborasi yang berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat adalah kunci untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik dan berdampak positif bagi generasi mendatang.



Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan sistem pendidikan. Oleh karena itu, dirumuskanlah kebijakan yang berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan (Noviani et al., 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu langkah kunci dalam kebijakan ini adalah membuka saluran komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat. Forum diskusi, pertemuan berkala, dan platform daring dapat menjadi sarana untuk menggali aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Dengan mendengarkan dengan seksama, kebijakan dapat dirancang berdasarkan masukan langsung dari masyarakat, menciptakan keterlibatan yang lebih bermakna.

Membangun kemitraan dengan pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lokal menjadi fokus penting dalam kebijakan ini. Mereka memiliki peran kunci dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan dapat menjadi jembatan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan unik masyarakat. Dengan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan menciptakan fondasi untuk keterlibatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Kemudian adanya kebijakan peningkatan akses informasi dan pendidikan bagi masyarakat berupa program penyuluhan, workshop, dan distribusi materi pendidikan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung proses pembelajaran. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat membuat keputusan yang terinformasi dan berkontribusi secara positif terhadap perkembangan pendidikan di wilayah mereka.

Selanjutnya kebijakan memberikan penekanan khusus pada pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak dengan melalui program-parenting, workshop pendidikan, dan kegiatan kolaboratif di sekolah dapat meningkatkan dukungan keluarga terhadap pendidikan anak. Orang tua yang terlibat secara aktif cenderung menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif di rumah, memberikan dampak positif pada pencapaian akademis dan perkembangan anak. Terakhir kebijakan mendorong inisiatif kewirausahaan sosial dalam pendidikan dengan memberikan dukungan finansial dan administratif kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi pada pendidikan, seperti kelompok sukarelawan atau lembaga pendidikan komunitas, dapat menciptakan sumber daya tambahan dan inovasi lokal. Dengan demikian, kebijakan ini membangun fondasi untuk keterlibatan masyarakat dalam menciptakan solusi lokal yang relevan dengan kebutuhan pendidikan mereka.

Simpulan

Pentingnya sejarah pendidikan sebagai landasan bagi kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia. Tinjauan sejarah membawa pemahaman mendalam tentang perkembangan kebijakan pendidikan dan peran sentral kebijakan dalam membentuk struktur manajemen pendidikan saat ini. Dalam implementasi kurikulum nasional, keterpaduan antara kebijakan kurikulum dan manajemen efektif terungkap sebagai faktor kunci untuk mencapai tujuan pendidikan



nasional. Adapun pembahasan mengenai pengembangan sumber daya manusia menegaskan strategi untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai fokus utama kebijakan manajemen pendidikan. Sementara itu, upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan memerlukan evaluasi mendalam dan kebijakan yang holistik untuk meningkatkannya. Terakhir, Kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat dapat menciptakan kolaborasi yang kuat antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat, mengarah pada lingkungan pendidikan yang lebih responsif dan inklusif.

BAB III

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Defi Dachlian Nurdiana

Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean
defi.dachlian@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan adalah proses seorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka hidup dan proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Ridlo, 2020). Pengertian manajemen pendidikan dapat diartikan secara luas, dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan siswa mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

Kegiatan pendidikan yang pada umumnya berlangsung di dalam suatu lingkungan lembaga pendidikan yang sudah seharusnya terus melakukan pembenahan manajemen pendidikan dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lapangan pekerjaan. Sehingga lembaga pendidikan dituntut untuk bersaing mutu lulusan dengan lembaga pendidikan lainnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem manajemen pendidikan lembaga. Manajemen pendidikan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, khususnya kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat terselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antar guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja guru.

Sebagaimana dikatakan Khozin, salah satu kegagalan dalam pengelolaan madrasah, baik swasta maupun negeri adalah lemahnya pemimpin dalam menjalankan tugas yang diemban. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peran serta



gaya kepemimpinan yang tidak ideal (Rouf, 2016). Oleh karena itu, kinerja pemimpin sangat dibutuhkan untuk memaknai Manajemen Pendidikan. Sehingga, lembaga pendidikan harus berperan aktif untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya dan mampu bersaing dengan mutu lulusan lembaga pendidikan lainnya.

Manajemen Sekolah

Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Sekolah adalah suatu organisasi yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesional. Sehingga manajemen sekolah dapat dipahami sebagai sebuah tindakan pengelolaan dan pengadministrasian yang dilakukan di lembaga pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan sekolah. Adapun ciri dari sumber daya manusia sekolah yang berdaya diantaranya (1) Pekerjaan adalah miliknya, (2) Mampu bertanggungjawab atas tugasnya, (3) Memiliki suara bagaimana sesuatu dikerjakan, (4) Pekerjaannya memiliki kontribusi ke lembaga, (5) Paham posisinya dimana, (6) Memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, (7) Pekerjaan merupakan bagian dari kehidupannya. Sedangkan ciri dari Sekolah yang sudah berdaya sebagai berikut: (1) mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi, (2) tingkat ketergantungan rendah, (3) bersifat adaptif, antisipatif dan proaktif, (4) memiliki jiwa kewirausahaan tinggi, (5) bertanggungjawab terhadap hasil sekolah, (6) memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber daya, (7) kontrol terhadap kondisi kerja, (8) komitmen yang tinggi pada dirinya, (9) dinilai oleh pencapaian presentasinya. (Hamid, 2018)

Dalam pengelolannya manajemen sekolah mempunyai dua aspek penting yaitu:

1. Manajemen internal sekolah, meliputi: perpustakaan, laboratorium, bangunan/gedung sekolah, sumber dana, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sarana fisik lainnya, dan hubungan antara guru dan murid.
2. Manajemen eksternal sekolah, meliputi: hubungan atau kerjasama dengan pihak luar sekolah seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan maupun pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah.

Manajemen kegiatan pendidikan internal sekolah dilakukan dalam kerangka autonomi sekolah (Sekolah Autonomi) atau manajemen berbasis situs. Dunia pendidikan telah berubah dengan konsep manajemen berbasis sekolah sesuai dengan realisasi Hukum Autonomous Regional (Safitri, 2023). Yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas dalam manajemen sekolah adalah tanggung jawab sekolah dan bahwa sekolah memiliki otoritas besar untuk mengelola dirinya sendiri sesuai dengan tujuan sekolah masing-masing.

Karakteristik manajemen sekolah, identik dengan kualitas pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri yang menjadi ciri khas sebagai penentu dari kualitas dan potensi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan tentu dibutuhkan kualitas manajemen pendidikan yang lebih

baik. Dalam menentukan kualitas pendidikan juga dibutuhkan pengelolaan yang baik, meliputi perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem di sekolah. Oleh sebab itu pentingnya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada di lembaga pendidikan.

Manajemen menggabungkan dari berbagai konsep dan menerapkan dalam kegiatan organisasi. Manajemen sekolah merupakan bidang manajemen terapan. Manajemen sekolah menerapkan teknik dan prinsip usaha untuk mencapai tujuan sekolah yang diinginkan. Manajemen sekolah tidak didasarkan pada prinsip yang kaku, tetapi fleksibel. Dalam memenejemen sekolah harus ada keseimbangan antara ketimpangan dan fleksibilitas. Setiap sekolah memiliki tujuan tertentu. Sekolah mengatur orang dan material untuk bisa memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, manajemen sekolah modern dianggap sebagai MBO (*Management by Objectives*) yang berarti manajemen berdasarkan tujuan. (Komariyah et al., 2021)

Komunikasi Organisasi: Upaya Meningkatkan Hubungan Personal Dalam Manajemen Sekolah.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan manajemen sekolah yang baik yaitu dengan penyempurnaan cara berkomunikasi di lingkungan pendidikan. Komunikasi berperan penting dalam konteks pengorganisasian tugas masing-masing komponen pendidikan untuk menjalin hubungan baik dengan pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam lingkungan organisasi sekolah yang dikategorikan dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi bagaimana hubungan antar struktur, budaya dan sumber daya yang dimiliki di dalam organisasi pendidikan. Lingkungan eksternal mencakup bagaimana hubungan dengan pihak di luar lingkungan pendidikan, yang meliputi Dewan Pengawas, masyarakat sekitar.

Kegiatan komunikasi di dalam suatu organisasi bertujuan untuk membentuk saling pengertian dan menyamakan pengalaman di antara anggota organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat berantakan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam komunikasi organisasi sangatlah penting karena keberadaan pimpinan menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi.

Komunikasi merupakan kunci pengungkit dari manajemen sekolah yang penting, hal ini dapat diterapkan oleh setiap tim organisasi pendidikan. Keterkaitan antara komunikasi dengan manajemen sekolah di dasarkan pada kecakapan seorang pemimpin (kepala sekolah) dalam menjalin sinergitas hubungan kerja dengan guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Komunikasi organisasi penting yang harus dimiliki oleh seorang dalam berinteraksi baik secara individu di organisasi pendidikan. Dalam sebuah tim kerja akan merasa nyaman jika terdapatesuaian komunikasi yang dilakukan antar individu maupun kelompok, akan mencapai sebuah kepuasan jika hal tersebut dilakukan dan sukses mencapai tujuan organisasi pendidikan sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Oleh sebab itu seorang pemimpin yang cakap akan mampu memimpin sebuah organisasi pendidikan yang sukses dengan menguasai cara berkomunikasi.



Komunikasi yang efektif dalam sistem pendidikan formal harus dilakukan pada beberapa tingkatan dan mencakup berbagai kelompok pelaku organisasi.

Komunikasi dengan kepemimpinan sangat erat hubungannya. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, jujur, bertanggung jawab, berani dalam mengambil keputusan, dan ia juga harus mempunyai keahlian berkomunikasi yang sangat baik. Karena komunikasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan yang berhasil mempengaruhi orang lain sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan menjalankan fungsi komunikasi secara baik karenanya komunikasi yang baik dan menjadi efektif akan ditentukan pula oleh kepercayaan dan keyakinan seorang pemimpin dalam memimpin untuk mempengaruhi bawahan. Keyakinan dan kepercayaan hanya dapat terbentuk apabila pemimpin menyadari suatu lingkungan yang harmonis antara pimpinan dengan para bawahannya yang dapat benar-benar berkomunikasi dengan baik yang sejalan dengan makna fungsi komunikasi.

Fungsi komunikasi dalam organisasi menurut para ahli:

1. Menurut Scott dan T.R. Mitchell (1976) komunikasi mempunyai empat fungsi dalam organisasi, yakni: a) kendali (kontrol/ pengawasan), b) motivasi, c) pengungkapan emosional, dan d) informasi.
2. Khan dan Katz yang mengatakan ada empat fungsi utama yaitu: yang berkenaan dengan a) produksi, b) pemeliharaan, c) penerimaan, dan d) pengelolaan organisasi.
3. Redding mengemukakan ada tiga alasan diperlukannya komunikasi dalam organisasi yakni: a) Untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi, b) untuk pemeliharaan, dan c) untuk kemanusiaan.
4. Thayer ada lima yaitu: a) untuk memberi informasi, b) membujuk, c) memerintah, d) memberi instruksi, dan e) mengintegrasikan organisasi.
5. Greenbaum mengemukakan bahwa fungsinya : a) untuk mengatur, b) untuk melakukan pembaruan, c) integrasi, d) memberikan informasi dan e) instruksi. (Susriyanti & Nardo, 2019)

Tidak satupun dari masing-masing fungsi tersebut dilihat lebih penting dari pada fungsi lainnya, hal ini juga dijelaskan dalam fungsi komunikasi dalam organisasi pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Informatif (Menyampaikan informasi) Fungsi komunikasi menyediakan informasi, data dan informasi lainnya yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan bantuan komunikasi, guru dapat menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan kepada siswanya, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Fungsi Edukatif Tugas komunikasi adalah mendidik masyarakat, mendidik setiap orang menuju kedewasaan mandiri. Seseorang bisa tahu banyak karena dia banyak mendengar, banyak membaca dan banyak berkomunikasi.
3. Fungsi Persuasif Komunikasi dapat mengarahkan orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator. Menciptakan pengertian dan kesadaran bagi komunikator berupa dorongan dan bimbingan, bahwa apa yang kita komunikasikan mengandung arti perubahan sikap, tetapi perubahan

itu bersifat sukarela (bukan terpaksa). Perubahan ini diterima atas kebijakan dan kesadaran sendiri.

4. Fungsi Rekreatif Dapat menghibur orang bila memungkinkan. Seperti mendengarkan dongeng, bacaan ringan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi pikiran siswa yang bosan dengan pelajaran yang dianggapnya sulit. (Fahmawati et al., 2021)

Implementasi Supervisi Kepala Sekolah

Hal selanjutnya yang berperan penting dalam manajemen pendidikan adalah implementasi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Penerapan supervisi yang benar dan terukur mampu meningkatkan kualitas mutu dari manajemen pendidikan sekolah. Jika kepala sekolah tidak menjalankan supervisi hal tersebut mengindikasikan bahwa ada ketidak beresan dalam manajemen sekolah. Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Kimball Wiles (1967) menjelaskan supervisi sebagai berikut "*Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning situation*". Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (*goal, material, technique, method, teacher, student, an envirovment*) (Rusmiyati, 2019).

Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik diantara guru-guru, karena bersifat demokratis (Arka, 2022). Dengan demikian, supervisi ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada dua hal (aspek) yang perlu diperhatikan. Pertama, Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang kedua, Hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk itu guru harus memiliki yakni: 1) kemampuan personal, 2) kemampuan profesional 3) kemampuan sosial Berangkat dari uraian diatas dapat ditarik benang merah, yang dimaksud dengan supervisi pendidikan adalah bimbingan profesional bagi guru-guru (Turmidzi, 2021).

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Manajemen Sekolah

Aspek penting berikutnya yaitu peran serta masyarakat dalam mengembangkan sekolah. Sebaik apaun perencanaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, namun jika tidak melibatkan peran dari masyarakat serta komite sekolah maka perencanaan tersebut tidak akan bisa terealisasi sesuai rencana. Hal tersebut akan menjadi kendala jika kepala sekolah tidak menjalin hubungan baik dengan masyarakat atau komite sekolah. Menurut Gunawan (2002: 186) peran



serta masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya dan di publikasi secara khusus, sehingga dalam kegiatan operasional sekolah menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, hubungan antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan secara harmonis agar tujuan pengembangan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi sekolah. Hal tersebut masuk dalam organisasi yang diberi nama Komite Sekolah, sesuai dalam lampiran II Kepmendiknas No.44 tahun 2002 komite sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. (Risno, 2015)

Peran serta masyarakat melalui komite sekolah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam pencapaian tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Dimana peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, dukungan yang diberikan oleh komite sekolah bisa berupa ide atau gagasan, dana atau sumbangan secara fisik. Hal tersebut tentunya akan melibatkan banyak pihak dalam mewujudkannya. Adapun beberapa pihak yang bisa terlibat yaitu wali siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga sosial, dunia usaha dan dunia industri. Manajemen sekolah akan berjalan dengan baik jika semua pihak yang terlibat dapat diberdayakan secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Karena komite sekolah merupakan mitra pengembangan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya komite sekolah bekerja berdasarkan fungsi-fungsi manajemen sekolah. Mengingat, sampai saat ini masih banyak fenomena yang dialami oleh beberapa sekolah, dimana komite sekolah tidak difungsikan dengan baik, tidak diberdayakan serta tidak dilibatkan dalam pengembangan pendidikan sekolah. Hanya terlibat dalam kegiatan pengambilan rapat di akhir semester berjalan dengan bentuk meminta sumbangan pada wali siswa.

Sehingga, kepala sekolah diuntut untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat, supaya ada peran aktif masyarakat untuk kemajuan mutu pendidikan. Selain itu juga agar dapat memberikan otonomi yang lebih luas partisipasi masyarakat secara langsung kepada warga sekolah.

Simpulan

Implementasi manajemen pendidikan menjadi sangat berarti dalam peningkatan mutu pendidikan sebuah lembaga pendidikan, tanpa manajemen sekolah yang terencana, lembaga pendidikan tidak akan mampu mengembangkan mutu pendidikan dengan baik. Mutu pendidikan diperoleh dari beberapa faktor yang saling berketerkaitan baik secara internal maupun eksternal. Aspek penting dalam pengelolaan manajemen pendidikan di sekolah formal selama ini terfokus pada pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan.

Disisi lain, ada aspek lain yang tidak tercover oleh pengelola lembaga pendidikan, aspek-aspek ini sangat berperan dalam mewujudkan delapan standar

nasional pendidikan tersebut, aspek penting dalam manajemen pendidikan yaitu 1) manajemen sekolah, 2) komunikasi organisasi , 3) implementasi supervisi pendidikan, 4) peran serta masyarakat. Empat aspek tersebut saling berketerkaitan dalam proses dialektika perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kontrol, dan evaluasi setiap program pengembangan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang efektif dan efisien.



BAB IV

FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDIDIKAN

Fitriana
Universitas Jambi
fitriana.fkip@unja.ac.id

Pendahuluan

Manajemen merupakan hal yang urgent dan bagaikan nafas kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, organisasi bahkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi dan lainnya. Misalnya dalam institusi pendidikan, Pendidikan sebagai upaya mengubah manusia menjadi lebih baik, mahir dan terampil (Komariah, 2018). Lisnawati (2017) institusi pendidikan dapat berkembang dengan baik, jika manajemen dan fungsinya berjalan dengan baik.

Manajemen merupakan titik sentral implementasi peningkatan sumber daya manusia unggul di Indonesia khususnya (Lisnawati, 2017). Melalui manajemen kondisi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dengan SDM tersebut untuk mencapai tujuan (Irijanti, dkk, 2023). Namun realitanya perwujudan manajemen yang baik tidak terwujud dengan mudah, bahkan menjadi krisis di bidang pendidikan, dibutuhkan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi antar personil professional di instansi, khususnya di bidang pendidikan.

Selain itu untuk mewujudkan kondisi di atas, keberfungsian manajemen dapat diimplementasikan oleh pimpinan, serta anggota di instansi pendidikan secara sistematis dan kontinu. Syamsuddin (2017) mutu pendidikan mengacu pada manajemen dan fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen untuk mencapai tujuan secara sistematis efektif dan efisien. Manajemen memiliki tanggung jawab khusus selama proses implementasi, yang disebut sebagai fungsi manajemen

Manajemen merupakan kegiatan memadukan sumber agar tercapai tujuan Pendidikan (Pidarta, 2004). Fungsi manajemen bagian mendasar tiap kegiatan dan eksistensinya selalu hadir dalam proses manajemen (Ulyani & Zohriah, 2023). Muara akhir fungsi manajemen jika berjalan dengan optimal, dapat berdampak pada kinerja yang berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kualitas pendidikan dapat terwujud secara optimal. Oleh karena itu, fungsi manajemen bagian hal urgent dalam ulasan bab ini.

Pembahasan

Fungsi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan diartikan sebagai usaha atau tindakan seorang pemimpin dan tenaga pendidik yang bertujuan memperoleh hasil optimal demi pencapaian tujuan program instansi/ tujuan pembelajaran di sekolah (Maujud, 2018). Manajemen pendidikan diimplementasikan dengan paduan sumber terpusat pada keberhasilan tujuan (Pidarta 2004).

Manajemen sebagai ilmu (*science*) bermakna penyesuaian situasi dan kondisi disesuaikan dengan tujuan (Hidayat, 2023). Manajemen berjalan dengan optimal, apabila proses fungsi manajemen bersifat efektif dan efisien. Hidayat dkk (2021) fungsi manajemen merupakan bagian mendasar kegiatan serta proses manajemen, bersifat fundamental dan mendarah daging pada proses manajemen.

Fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen suatu perusahaan/organisasi dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan/organisasi pada waktu melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu (Kalsum & Waluyo, 2022; Hidayat, 2021; Lisnawati, 2017).

Fungsi-fungsi manajemen diantaranya 1) *forecasting* 2) *planning* termasuk budgeting 3) *organizing* 4) *staffing* atau *assembling resources* 5) *directing* atau *commanding* 6) *leading* 7) *coordinating* 8) *motivating* 9) *controlling* 10) *reporting* (westra, 1980). Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Mulyasa, 2012), selain itu pengorganisasian, penggerakan, dan pen

Fungsi manajerial diantaranya perencanaan/ *planning*, pengorganisasian, pelaksanaan, penggerakan/ *actuating*, pemantauan, dan penilaian (Nyoman, dalam Fitri & Pujiyanto, 2024; Irjanti dkk, 2023; Terry, 2013). Kondisi POAC yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Akbar et al., 2021; Saidah, 2014; Sallis, 2014, dalam Asni & Chairunnisa, 2023; Syamsuddin, 2017). Fungsi manajemen oleh leader diantaranya melakukan rencana, mengorganisasi, memimpin, dan melakukan pengendalian di organisasinya (Choir, 2016).

Fungsi *Planning* Dalam Manajemen Pendidikan

Perencanaan/*planning* merupakan kegiatan pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang dicapai, serta tindakan yang diambil dalam mencapai tujuan dan orang yang melaksanakan (Kalsum & Waluyo, 2022). Kegiatan awal dalam bentuk kognitif/ pemikiran, atau peta kerja untuk pencapaian tujuan menuju hasil maksimal. Muara akhir perencanaan agar efektif dan efisien (Hidayat & Tamiang, 2021; Hamalik, 2008; Siagian, dalam Syamsuddin, 2017). Kaitan *planning* agar alternatif rumusan ke depan dilakukan dengan rumusan terbaik (Aliyyah dkk, 2009). Perencanaan merupakan langkah rasional dan sistematis pengambilan keputusan agar berjalan efektif dan efisien (Mulyono, 2008).

Perencanaan berasal dari bahasa Inggris yakni "plan" yang bermakna rencana, rancangan atau niat. Kemudian "education" bermakna pendidikan. Dapat disimpulkan yakni perencanaan pendidikan merupakan kegiatan penetapan arah serta rumusan untuk pencapaian tujuan. Hasibuan (2011) perencanaan merupakan kegiatan pencapaian tujuan dengan pedoman yang ditetapkan dengan pemilihan jalan/alternatif terbaik. Perencanaan juga berfungsi menjelaskan berbagai problem, prioritas, tujuan dan indikator, hambatan serta rencana kerja kegiatan.

Lembaga yang bertahan sangat dipengaruhi oleh *planning* yang dilakukan pada instansi atau lembaga tersebut terutama di pendidikan. Alat bantu para pengelola menjalankan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh *planning* yang disusun, Selain itu, target dan sasaran berjalan secara sistematis, efektif dan dapat dilakukan pengawasan dalam kegiatan ke depan. Rabiah (2019) *planning* disesuaikan dengan tujuan dan visi instansi sebagai langkah awal berdirinya organisasi.

perencanaan disesuaikan dengan need assessment, kondisi lapangan, bersifat kongkret, dan dapat direalisasikan dengan baik (Ruhaya, 2011). Hal ini agar kondisi ke depen dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sesuai tujuan instansi atau lembaga pendidikan khususnya. Kegiatan perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya perencanaan memperhatikan *what, why,*



where, when, who, dan how, terkait apa, mengapa, dimana, kapan, siapa dan bagaimana strategi/ cara pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai.

Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan perencanaan (Rivai, 2009). Kondisi ini juga menentukan keberhasilan kegiatan. Mengorganisasikan merupakan proses mengaitkan orang yang terlibat pada organisasi dan kegiatan menyatupadukan tugas dan fungsi pada organisasi. Dalam pelaksanaannya, Saefullah (2012) terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara spesifik, pada bagian dan bidang, sehingga antar bagian dapat terintegrasi hubungan kerja bersifat sinergis, harmonis, dan seirama dengan tujuan sesuai kes

Pengorganisasian yakni keseluruhan proses pengelompokan, orang, alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang, untuk penciptaan suatu organisasi, agar menggerakkan suatu tujuan yang ditetapkan (Syamsuddin, 2017). Fungsi pengorganisasian dalam penetapan struktur, pembagian tugas, dan wewenang dalam kaitan dengan SDM dalam implementasi tugas (Irijanti dkk, 2023).

Kondisi ini berkaitan dengan SDM manusia maupun fisik yang tersusun secara sistematis berdasar fungsi masing-masing, sehingga dapat dikatakan bagaimana mengelompokkan orang dan sumber daya agar menyatu (Rabiah, 2019; Kalsum & Waluyo, 2022). Adanya fasilitas, rencana, pengelompokan kerja, kewenangan, serta metode dan prosedur, melatih, dan memberi informasi pada staff (Hikmat, 2009)

Setelah tahap perencanaan, pengorganisasian selanjutnya merupakan tahap kedua. Kerja tim diperlukan jika beban kerja tidak mampu diselesaikan secara sendiri. Kerja yang efisien dan terorganisir mencapai tujuan menuju hasil institusi pendidikan. Ulyani & Zohriah (2023) struktur organisasi perlu ditentukan, tugas dan tanggungjawab masing-masing unit pada pengorganisasian.

Pengorganisasian dikelompokkan pada ruang lingkup terjadinya pengelompokan orang-orang, penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab (Badrudin, 2013). Adanya koordinasi dan wewenang yang disusun, sesuai dengan kapasitas dan latar belakang tenaga pendidik di pendidikan (Irijanti dkk, 2023). Selain itu, yang diperhatikan dalam pengorganisasian yakni

Fungsi Pelaksanaan/ *Actuating* Dalam Manajemen Pendidikan

Kondisi pelaksanaan berkaitan dengan tanggungjawab serta kesadaran (*self-awareness*) antar individu dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, agar kegiatan di lapangan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Rivai (2009) fungsi manajemen terpenting yakni pelaksanaan kegiatan yang bersifat dominan.

Fungsi pelaksanaan/*actuating* disebut juga dengan pengarahan suatu kegiatan yang dilakukan dengan jalur yang ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan dan terjadinya pemborosan. Dalam kaitan dengan kepemimpinan, manajemen peningkatan pada mutu oleh leader diperlukan dalam mempengaruhi orang lain sehingga mau bekerja dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan (Irijanti dkk, 2023). Fungsi pengarahan menekankan pada efektivitas dan efisiensi kinerja



optimal, diawali dari bimbingan kerja, motivasi serta tugas rutin (Rabiah, 2019). Selain itu, pengarahan dilakukan untuk mencapai tujuan efektif dan efisien.

Penggerakan adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pada dasarnya penggerakan sangat erat kaitannya dengan unsur manusia yang ada dalam organisasi. Kegiatan organisasi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana unsur manusia dapat mendayagunakan seluruh unsur-unsur lainnya, serta mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan (Hidayat & Tamiang, 2021)

Fungsi Pengawasan/*Controlling* Manajemen Dalam Pendidikan

Fungsi pengawasan merupakan suatu kegiatan penetapan tujuan perencanaan, rancangan, sistem informasi umpan balik, perbandingan standar yang ditetapkan sebelumnya, penentuan dan pengaturan, penyimpangan pengambilan tindakan (Irijanti dkk, 2023). Kondisi pelaksanaan dilakukan oleh organisasi demi menjamin pekerjaan berjalan diarahkan pada rencana yang ditentukan (Siagian, dalam Syamsuddin, 2017).

Sagala (2017) pengawasan meliputi pemeriksaan kondisi yang direncanakan, instruksi yang dikeluarkan, prinsip yang diterapkan. Fungsi Pengendalian (*Controlling*) Fungsi pengendalian lebih fokus pada evaluasi dan penilaian atas kinerja yang selama ini telah dilakukan dan berjalan. Fungsi pengendalian akan melihat apakah terdapat suatu hambatan atau tidak dalam proses mencapai tujuan instansi/organisasi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan peningkatan kinerja secara optimal (Rabiah, 2019).

Fungsi terakhir dari manajemen yakni pengawasan/pengendalian (Badrudin, 2013). Fungsi pengendalian yakni kinerja berdasar standar yang telah dibuat disesuaikan dengan tujuan rencana, merancang, system umpan balik. Pengendalian bagian pengawasan sistematis merancang informasi umpan balik (Kalsum & Waluyo, 2022). Fungsi pengendalian atau *controlling* ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya (Hidayat & Tamiang, 2021). Kegiatan untuk mengetahui apa yang dilakukan (Suwarno, 2023). Oleh karena itu, kondisi pengendalian begitu diperlukan.

Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya suatu rencana, sehingga berjalan dengan sebaik-baiknya (Maisaro et al., 2018). Kegiatan ini juga untuk melihat dan meneliti apakah kegiatan betul dilaksanakan atau tidak, dan meneliti kendala yang terjadi (Samsirin, 2015). Melalui pengawasan kegiatan diarahkan dengan penilaian kinerja dan mengoreksi kinerja yang dilakukan sebelumnya (Terry, 1973; Rabiah, 2019).

Simpulan

Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen pendidikan dengan manajemen ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan manajemen dipengaruhi bagaimana eksistensi keberfungsian Pendidikan berjalan dengan baik dan optimal. Untuk mencapai hal ini diperlukan Kerjasama antar pimpinan, anggota, serta stakeholder yang terlibat. Kondisi paling penting, yakni pengejawantahan serta urgensi



memahami mengenai fungsi manajemen pendidikan, meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Fungsi *planning* meliputi dasar utama dalam kaitan dengan tujuan, strategi, serta rencana kerja ke depan. *Organizing* meliputi identifikasi, klasifikasi dan menata arah yang terlihat disesuaikan dengan situasi, kondisi, personal, penugasan/wewenang dan pendelegasian yang tepat yang bermuara pada pencapaian tujuan efektif & efisien dapat terwujud. *Actuating* berkaitan dengan menggerakkan, pengarahan, dorongan kepada anggota agar bekerja dengan Ikhlas dan sepenuh hati agar tujuan dapat tercapai dengan optimal, karena SDM perlu digerakkan, tidak hanya sebatas rencana dan delegasi. Fungsi *controlling* bermakna evaluasi dan penilaian atas kinerja yang selama ini telah dilakukan dan berjalan, umpan balik terkait kondisi apakah terdapat suatu hambatan atau tidak dalam proses mencapai tujuan tersebut.

BAB V

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Mohammad Adnan
STAI Hasan Jufri Bawean Gresik
adnan.bawean@gmail.com

Pendahuluan

Kalau berbicara tentang Pendidikan maka kita akan berbicara tentang manusia karena pada dasarnya manusia itulah yang memerlukan Pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat urgen dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pada hakikat terdalamnya manusia tidak hanya saja tergantung pada alam tanpa adanya pengaruh lain. Dalam proses panjang itulah akan muncul pengaruh yang akan di peroleh oleh setiap manusia dari manusia lain yang akan membawa perubahan sikap atas setiap manusia yang dipengaruhinya (Akuntabilitas et al., 2015).

Sebagaimana hal di atas sangat jelas bahwa manusia sangat memerlukan sebuah pendidikan karena pendidikan, pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses untuk mengubah manusia dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Melalui pendidikan itu kemudian akan terlihat suatu bentuk perubahan pikiran manusia, yang semula tidak tahu apa-apa menjadi orang yang mengerti tentang banyak hal, karena pada prinsipnya pendidikan adalah suatu hal yang sangat mutlak diperlukan oleh manusia dan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri dalam Upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia, yang nantinya akan berguna bagi bangsa dan agama. Terlebih pendidikan ini bertujuan untuk memberikan satu bentuk kesetaraan agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain (Akuntabilitas et al., 2015).

Kalau kita berbicara tentang masalah kewenangan dalam penyelenggaraan Pendidikan yaitu adalah bentuk reformasi yang memberikan kewenangan pengelolaan Pendidikan terhadap pemerintah daerah, hal ini tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014. Di mana di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang akan menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah tidak sepenuhnya akan tetapi terbatas pada aspek pembiayaan, sumberdaya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Di samping itu hal yang terkait dengan aspek kurikulum, evaluasi, pembelajaran, dan pengukuran, alat pembelajaran dan sarana, waktu dan metode belajar, buku dan terkait dengan alokasi belanja dan penggunaan anggaran dalam hal ini menjadi kewenangan sekolah. Oleh sebab itu semua elemen yang ada mulai dari kepala sekolah dan semua guru dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas proses dan hasil belajar sebagai cara untuk lebih meningkatkan mutu Pendidikan secara massif dan memiliki lingkup nasional (Muflihah & Khofya Haqiqi, 2019).

Untuk itu maka sekolah yang merupakan Lembaga pendidikan formal memiliki fungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan merupakan salah satu bentuk komponen penting untuk membangun di segala bidang. Sekolah sebagai salah satu Lembaga yang memiliki peran untuk mencetak sumber daya manusia maka dari itu sekolah dituntut untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Upaya untuk memenuhi



keinginan Masyarakat yang semakin meningkat, maka dari itu sekolah sebagai bentuk organisasi pendidikan harus berupaya untuk mengkaji berbagai kelebihan dan kekurangan sekolah serta terus berusaha mencari cara untuk selalu melakukan perbaikan secara terus menerus serta terus mengidentifikasi segala bentuk tantangan dan ancaman yang sewaktu-waktu datang sebagai cara untuk menciptakan produktivitas sekolah yang diharapkan oleh banyak pihak. sebagai bentuk paradigma baru manajemen pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas secara efektif dan efisien, untuk perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih jauh, pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu bentuk proses peningkatan kemampuan manusia supaya dapat memiliki kemampuan melakukan pilihan-pilihan. Proses pengembangan sumberdaya manusia tersebut dan harus dapat menyentuh seluruh bidang kehidupan yang kemudian tercermin dalam pribadi pimpinan, termasuk pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah (Azharuddin, 2020).

Maka dapat dikatakan bahwa kepala sekolah merupakan orang pertama yang memiliki tanggung jawab untuk dapat mengarahkan sepenuhnya, kemana arah Lembaga dan tujuan pendidikan akan di bawa. Karena dalam konteks ini kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan kurikulum, dan serta kemajuan Lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Maka dari itu seorang pemimpin yang mana dalam hal ini adalah kepala sekolah harus memiliki menegerial yang mumpuni. Karena segala aktivitas dalam oragnisasi harus di dasarkan pada manajemen yang terarah dan terukur sehingga apa yang menjadi visi dan misi seorang pemimpin akan dengan mudah tercapai dengan manajemen yang baik.

Pembahasan

Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional yang memiliki tugas untuk memimpin Lembaga pendidikan sekolah dalam Upaya menyelenggarakan proses belajar mengajar. Kepala sekolah merupakan pengatur pembelajaran yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan berbagai potensi peserta didik, terlebih ketika menyangkut pengembangan professional guru, pembelajaran siswa dan kualitas sekolah. Lebih lanjut dalam hal ini kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan professional guru di sekolah, untuk itu kepala sekolah selalu mengkomunikasikan nilai dan tujuan secara konsisten dan sistematis kepada seluruh staf, orangtua, siswa dan semua anggota dewan kolah lainnya (Sarah Lailatil Fadla, 2021).

Dalam kaitannya dengan kepala sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang sangat urgen dalam terlaksananya dunia pendidikan. Kepala sekolah bertugas menjalankan kepemimpinan pendidikan, atau disebut juga sebagai bentuk kepemimpinan intruksional. Kepemimpinan pendidikan yaitu keahlian untuk menjalankan pendidikan dengan tujuan supaya pendidkan dapat berjalan dengan baik secara efektif dan efisien. Kepala sekolah adalah unit yang bertugas dalam memimpin elemen di sekolah. Lebih lanjut kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu memiliki tanggung jawab secara umum terhadap setiap kelancaran dan keberhasilan fungsi, kegiatan sekolah. Kepala sekolah juga memiliki peran dalam pengembangan kinerja guru dalam hal kurikulum, pengembangan staf, pelayanan,

pengembangan kurikulum, penyelesaian masalah, komunikasi, serta keterampilan kepemimpinan dalam manajemen pembelajaran yang ada (Sarah Lailatil Fadla, 2021).

Lebih lanjut, hal yang berhubungan erat dengan peran kepala sekolah adalah bagaimana seorang kepala sekolah mampu menjadi pribadi yang baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain yang dipimpinnya. Hal itu berkaitan erat dengan peran kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Dimana tanggung jawab itu adalah *pertama*, kepala sekolah sebagai educator, yang mana memiliki peran merencanakan, melaksanakan, memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, juga meneliti (penelitian Tindakan sekolah) kepala sekolah dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai gurunya guru.

Selanjutnya peran kepala sekolah yang *kedua*, kepala sekolah sebagai manajer yang senantiasa melakukan perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan semua program sekolah semuanya tidak luput dari peran kepala sekolah sebagai manajer.

Sedangkan yang *ketiga*, adalah kepala sekolah memiliki peran sebagai administrator yang memiliki kemampuan untuk mengelola ketatausahaan, dan kebijakan atau program sekolah dalam mendukung berbagai program demi tercapainya semua program-program sekolah.

Yang *keempat*, kepala sekolah sebagai supervisor yang dimana tugasnya adalah untuk membantu guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan supervisi, serta melaksanakan supervisi, lalu kemudian menindak lanjuti hasil supervisi, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, serta untuk meningkatkan pengembangan profesionalisme guru.

Kemudian untuk yang *kelima*, kepala sekolah sebagai leader harus mampu mempengaruhi semua warga sekolah untuk dapat dengan baik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna untuk mencapai semua tujuan sekolah. Sedangkan terakhir yaitu yang *kelima*, kepala sekolah sebagai entrepreneur yang kreatif, inovatif, etos kerja, bekerja keras, ulet, dan yang terpenting adalah memiliki naluri atau jiwa kewirausahaan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan peran kepala sekolah maka penulis sangat ingin menekankan kepada pembaca bahwa sebagai seorang pemimpin harus memiliki jiwa leadership bukan jiwa bos. Dalam kesempatan ini penulis ingin sekali menjelaskan agar yang membaca dapat memahami secara komprehensif perbedaan antara leader dan bos. Kalau kita melihat pemimpin yang suka tunjuk sana sini, selalu menyalahkan bawahannya serta tidak mau tahu dengan keadaan orang lain itu bukanlah jiwa seorang pemimpin yang biasa kita kenal dengan sebutan leader, akan tetapi jiwa yang semacam itu adalah bos atau pemimpin yang otoriter. Sedangkan jiwa seorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership maka semua dapat kita pahami dan dapat kita lihat dari lima ciri di atas.

Manajemen Pendidikan Kepala Sekolah

Sementara itu kalau berbicara tentang manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai bagian dari serangkaian kegiatan merencanakan, memotivasi, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengembangkan segala bentuk Upaya di



dalam mengatur dan mendayagunakan sepenuhnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan.

Manajemen merupakan hal yang berkaitan langsung dengan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan berbagai macam program yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun program yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dimana kepala sekolah itu memimpin. Keahlian lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau dalam hal ini adalah kepala sekolah adalah kemampuan untuk mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sebagaimana arah dan tujuan pendidikan nasional, di samping itu juga harus mampu mengelola keuangan sekolah atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, efisien, serta transparan. Tidak hanya berhenti di situ saja seorang kepala sekolah harus mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah, serta mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah serta juga mendukung kegiatan peserta didik di sekolah (Suhardiman, 2016).

Berbicara tentang kepemimpinan maka dalam konteks itu kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan menggerakkan, menasehati, memotivasi, mempengaruhi, mengajak, membimbing, memerintah, menyuruh, melarang, dan bahkan memberikan hukuman hal itu kalau diperlukan, disamping itu juga dibina dengan maksud agar manusia yang dipandang sebagai media manajemen mau untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi yang efektif dan efisien (Mulyati, n.d.).

Sebagaimana Fatih dalam (Mulyati, n.d.) memberikan gambaran tentang pemimpin dengan mengibaratkan bahwa seorang pemimpin seperti kepala dari sebuah tubuh. Hal ini disebabkan pada bahwa menurutnya seorang pemimpinlah yang dapat menentukan tujuan, belajar dan berpikir, juga menguasai ilmu pengetahuan, dan dengan bantuan kemampuan tertentu, dengan tujuan untuk memberikan berbagai macam pengarahan atau instruksi, kemudian mencoba merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dengan kemampuan manajerial yang demikian maka dapat dipastikan semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik karena akan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan ditargetkan. Maka dalam pada itu untuk mencapai segala sesuatunya maka harus memahami tentang manajemen kepala sekolah

Upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di sekolah dan itu sepenuhnya perlu didukung oleh kemampuan manajerial kepala sekolah. Hal itu dikarenakan oleh kebutuhan sekolah yang dituntut untuk maju dari tahun ke tahun. Dalam banyak hal sangat berkaitan antara tingkat kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan manajemen dan administrasi sekolah, dan tentu hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajerial kepala sekolah.

Segala bentuk kemajuan di sekolah, itu tidak bisa dilepaskan dari manajemen sekolah itu sendiri. Sedangkan manajemen sekolah yang baik membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatur manajemen dengan baik. Maka dari itu manajemen sekolah sangat membutuhkan kemampuan profesional kepala sekolah yang mana dalam hal ini sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal mengatur, melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan yang dikembangkan di sekolah. Di samping itu maju mundurnya suatu sekolah berada ditangan kepala

sekolah, hal itu dikarenakan peran kepala sekolah sangat strategis dan begitu menentukan bagi pengembangan sekolah terutama dalam menggerakkan dan berupaya memperdayakan komponen-komponen sekolah dan kepala sekolah harus mengetahui secara utuh tentang pengelolaan sekolah serta harus mempunyai target kemajuan sekolah tersebut.

Simpulan

Pendidikan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat urgen dalam kehidupan manusia itu sendiri. Melalui pendidikan itu kemudian akan terlihat suatu bentuk perubahan pikiran manusia, yang semula tidak tahu apa-apa menjadi orang yang mengerti tentang banyak hal, karena pada prinsipnya pendidikan adalah suatu hal yang sangat mutlak diperlukan oleh manusia dan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri dalam Upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia, yang nantinya akan berguna bagi bangsa dan agama. Sedangkan Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional yang memiliki tugas untuk memimpin Lembaga pendidikan sekolah dalam Upaya menyelenggarakan proses belajar mengajar. Kepala sekolah bertugas menjalankan kepemimpinan pendidikan, atau disebut juga sebagai bentuk kepemimpinan intruksional. Hal itu berkaitan erat dengan peran kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Dimana tanggung jawab itu adalah *pertama*, kepala sekolah sebagai educator, *kedua*, kepala sekolah sebagai manajer, *ketiga*, adalah kepala sekolah memiliki peran sebagai administrator, *keempat*, kepala sekolah sebagai supervisor, yang *kelima*, kepala sekolah sebagai leader.



BAB VI

PERAN GURU DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Siti Nurasih

Sekolah Tinggi Agama Islam Wasilatul Falah Rangkas Bitung Banten
nuriasiahsiti34@gmail.com

Pendahuluan

Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas pendidikan dengan mendayagunakan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan efektif melalui perencanaan pengorganisasian dan mengontrol serta mengevaluasi kinerja satuan pendidikan atau sekolah . Dalam melaksanakan manajemen pendidikan disekolah tentu membutuhkan manajemen yang baik, seperti yang disampaikan Henry fayol bahwa manajemen mempunyai 4 fungsi yaitu (Amirudin, 2021) :

1. *Planning* (perencanaan)
Yaitu sasaran untuk menetapkan strategi dan pengembangan rencana untuk mengelola aktifitas
2. *Organizing* (pengorganisasian)
Menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaiman cara dan siapa yang mengerjakannya
3. *Leading* (kepemimpinan)
Memotivasi, memimpin dan tindakan- tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang lain
4. *Controlling* (pengawasan)
Memantau aktifitas demi memastikan segala sesuatunya sesuai dengan rencana.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat 8 Standar Pendidikan yang harus diterapkan dalam manajemen pendidikan yaitu (Rosy, 2022):

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kopedensi Kelulusan
4. Standar Pendidik Dan Kependidikan
5. Standar Sarana Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Ke delapan standar yang disebutkan diatas adalah hal yang harus disiapkan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar pendidik dan kependidikan dalam Satuan pendidikan adalah seorang guru, dan yang memegang kendali seluruh manajemen pendidikan adalah seorang tenaga pendidik atau guru. Dalam hal ini Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu sekolah atau satuan pendidikan, ditangan seorang guru akan mengsilkan Sumber daya manusia yang unggul, religious, berkompentensi berahlak sehingga mampu menciptakan

kecanggihan teknologi yang semakin baik dari masa kemasa (Nurhafsa, 2022). Guru juga sebagai sosok yang dapat dijadikan teladan, Panutan, di gugu dan ditiru setiap karakter dalam setiap kehidupan baik secara individu, kelompok dan dilingkungan masyarakat.

Di sekolah guru memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen pendidikan, perannya bukan hanya sebagai tenaga pengajar yang tugasnya sebagai pendidik siswa dan siswinya namun seorang guru harus mampu bekerja sama secara team dalam melaksanakan fungsinya ,menjalin hubungan baik dengan seluruh warga sekolah baik antar guru, pegawai dan seluruh civitas akademisi yang akan mencapai tujuan sekolah yang tertera dalam manajemen pendidikan.

Pembahasan

Peran Dan Tugas Guru Dalam Proses Pendidikan

Pengertian Guru

Dalam kamus bahasa Indonesia sebagaimana yang jelaskan dalam buku yang berjudul “ Pengembangan Profesi Guru “ Devinisi guru adalah orang yang mata pencahariannya atau profesinya mengajar, Kemudian dari kutipan Sri Minarti, pendapat seorang ahli J.E.C Gericke dan T Roorda menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa sangsekerta yang artinya berat, penting, baik sekali, terhormat dan pengajar.

Dewi safitri dalam bukunya mengatakan guru adalah seorang tenaga pendidik professional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, mengajar, melatih, memberikan penilaian serta memberikan evaluasi kepada peserta didik. Dalam undang-undang no 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah “Pendidik professional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah” (Dewi Safitri, 2019). Selanjutnya dalam literature kepribadian islam banyak kata yang terdapat pada pengertian guruyaitu seperti Murobbi, Muallim Muaddib kata kata tersebut memiliki arti yang berbeda, Menurut ahli bahasa kata Murobbi berasal dari bahasa arab yaitu Yurobbi yang artinya membimbing, mengurus mengasuh, dan mendidik. Sementara kata Muallim merupakan isim fail dari allama yuallimu yang bias diartikan mengajar atau mengajarkan.

Beberapa ahli juga mengatakan pengertian tentang guru, berikut menurut para ahli yaitu :

1. Dwi Atmaka
Menurut D Dwi Atmaka guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan fisik dan spiritual.
2. Husnul Chotimah
Menurutnya guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan dari sumber belajar ke peserta didik.
3. Ngalim Purwanto
Menurut Ngalim Purwanto guru adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada seseorang baik secara individu maupun kelompok.



4. Mulyasa
Menurutnya guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional .
5. Drs. M. Uzer Usman
Beliau mengatakan guru adalah orang yang berwenang dan bertugas dalam dunia pendidikan pada lembaga pendidikan formal (Dewi Safitri, 2019).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab yang memberi bimbingan atau bantuan anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan mampu menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk social, sebagai individu, yang sanggup berdiri sendiri (Yohana, 2020). Dan memberikan teladan baik secara individu, kelompok dan masyarakat.

Tugas Dan Peran Guru Dalam Proses Pendidikan

Berdasarkan pada definisi guru di atas dijelaskan bahwa seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih, membimbing, membina, para siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, budi pekerti sehingga menjadi pribadi yang baik, berkeuletan, mumpuni, baik secara, social, intelektual maupun secara spiritual. Adapun tugas guru dapat diklasifikasikan dalam penjabaran sebagai berikut:

1. Tugas Dibidang Keprofesian
 - a. Mengajar
Mengajar merupakan tugas pokok seorang guru, mengajar juga disebut dengan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik mengetahui suatu disiplin ilmu atau materi-materi yang diajarkan oleh guru dan guru bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan materi selama proses belajar mengajar berlangsung.
 - b. Mendidik
Mendidik adalah proses memelihara dan memberi latihan ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai ahlak dan kecerdasan pikiran (Darmadi, 2018). Mendidik juga disebut sebagai proses kegiatan untuk mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup yang dikembangkan dalam diri seseorang.
Dalam hal ini guru dengan segenap hati, tenaga, pikiran memfokuskan terhadap pengembangan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik memiliki kemajuan belajar yang signifikan dan terus meningkat hingga memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuhan.
 - c. Melatih
Melatih siswa merupakan suatu kewajiban bagi seorang guru, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan dalam bidang tertentu secara teratur dan terus menerus dengan penuh konsentrasi, kesungguhan dan tanggung jawab untuk mendapatkan keahlian sesuai yang diharapkan.

d. Membimbing dan mengarahkan

Dalam proses belajar mengajar tentu selalu ditemukan berbagai kondisi dan keadaan peserta didik, dalam keadaan tertentu seorang guru harus melakukan bimbingan yang serius bahkan mengarahkan kepada arah yang lebih baik misalnya keadaan siswa yang sedang ingin mengikuti ujian atau suatu perlombaan yang memerlukan bimbingan serta pengarahan dari seorang guru, maka bimbingan harus dilakukan demi tercapainya tujuan (Dewi Safitri, 2019). Atau misalnya dalam kondisi siswa kekurangan nilai atau terdapat nilai rendah atau dalam segi perilaku yang kurang baik, tentu inipun harus dilakukan bimbingan dan pengarahan agar peserta didik menjadi baik.

e. Memberikan motivasi

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertindak laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya (Hamzah, 2016). Dalam hal ini memberikan motivasi merupakan tugas dari seorang guru terhadap murid agar siswa dan siswi memiliki minat belajar yang sangat baik. Menurut undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Undang-undang Republik Indonesia no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mencantumkan tugas guru yang terdapat dalam bab IV pasal 20 yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi pendidik dalam pembelajaran.
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai etika.
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan bangsa.

2. Tugas Dibidang Kemanusiaan

Tugas guru dibidang kemanusiaan terdapat dalam ruang lingkup sekolah yakni sebagai orang tua kedua bagi siswa yaitu menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta didik, memiliki hubungan yang sangat erat dengan peserta didik sehingga lebih memudahkan guru dalam mengarahkan, membimbing, membina baik secara keilmuan maupun dalam aspek sosial dan akhlak (Munawir, 2022).



3. Tugas Dibidang Kemasyarakatan

Dalam pandangan masyarakat guru adalah sosok yang sangat mulia, terhormat dan mendapatkan status social yang baik. Guru diharapkan mampu memberikan teladan baik secara sikap, intelektual, spiritual hingga social, sehingga dapat memotivasi kepada seluruh warga masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya (Kamal, 2018).

Fungsi Dan Peran Guru Dalam Proses Pendidikan

Fungsi dan peran guru dalam pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru memiliki fungsi dan peran yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, membina. Sama halnya dengan tugas guru, fungsi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda. Mendidik berfokus pada aspek moralitas dan kepribadian peserta didik, membimbing berfokus kepada aspek norma agama dan norma kehidupan, mengajar berfokus pada materi ajar dan ilmu pengetahuan, sedangkan melatih berfokus kepada keterampilan hidup (Sopian, 2016). Fungsi dan peran guru dapat dikelompokkan menjadi sepuluh macam, antara lain:

1. Peran Guru sebagai *Educator* atau Pendidik

Guru sebagai pendidik yaitu guru menjadi tauladan bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karenanya, sebagai seorang guru yang menjadi tauladan harus mempunyai kepribadian yang baik, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, disiplin dan berahlak yang baik. Menurut Zainal Aqib, peran guru sebagai educator mempunyai beberapa fungsi: (1) Mengembangkan kepribadian, (2) Membimbing, (3) Membina budi pekerti, (4) Memberikan pengarahan (Aqib, 2015).

2. Peran Guru sebagai Manager

Di dalam dunia pendidikan guru juga sebagai manager atau pemimpin yaitu guru memberikan materi pelajaran juga sekaligus sebagai pendidik untuk membimbing peserta didik agar memiliki akhlak mulia serta mencetak generasi yang cerdas (Rahim, 2014). Guru memiliki peran learning manager atau pengelola kelas yaitu guru harus mempunyai keterampilan dalam mengatur kondisi kelas. Keterampilan ini bertujuan agar peserta didik dapat belajar dalam kondisi yang nyaman. Guru sebagai pengelolaan kelas juga berkewajiban mengkondisikan kelas ketika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar (Darmadi, 2015).

3. Peran Guru sebagai *Leader*

Guru memiliki peran penting sebagai pemimpin pembelajaran untuk mendidik peserta didik dengan kemampuan yang dimiliki dengan memperhatikan pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sebagai seorang pemimpin seorang guru harus memiliki filosofi pratap tiloka yaitu Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani. Melalui Filosofi Pratap Triloka Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara ini guru dapat mengaplikasikannya sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan harapan dapat membentuk pemimpin-pemimpin di masa depan (Usman, 2013).

4. Peran Guru sebagai Fasilitator
Guru Sebagai fasilitator, maksudnya guru berperan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan terkait fasilitas yang digunakan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Selain memberikan dan menyediakan pelayanan terkait fasilitas belajar guru sebagai fasilitator juga harus memberikan arah yang baik serta memberikan semangat (Mulyasa, 2005).
5. Peran Guru sebagai Administrator
Peran seorang guru tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik, tetapi juga sebagai administrator. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu di adminstrasikan dengan baik. Peran sebagai administrator ini guru di harapkan bisa bekerja secara teratur terkait dengan administrasi. Administrasi tersebut sepeeti mencatat hasil belajar, membuat rancangan belajar (Syarifuddin, 2015). Menurut Zainal Aqib, (2015) peran guru sebagai administrator mempunyai fungsi: (1) Membuat daftar presentasi, (2) Membuat daftar penilaian, (3) Melaksanakan teknis administrasi sekolah.
6. Peran Guru sebagai Inovator
Peran guru sebagai inovator yaitu guru hendaknya memiliki keinginan yang besar untuk belajar terus mencari ilmu pengetahuan dan menambah keterampilan sebagai guru. Tanpa diiringi keinginan yang besar maka tidak dapat menghasilkan inovasi baik dalam media pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, model-model belajar dan lain-lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
7. Peran Guru sebagai Motivator
Guru berperan sebagai motivator yang memiliki arti bahwa guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri mereka, memberikan semangat dan petunjuk tentang cara belajar yang efektif, memberikan reward berupa hadiah, ucapan selamat, memberikan pujian, maupun lainnya. Selain itu, guru sebagai motivator dapat memberikan feedback berupa catatan penyemangat yang terdapat pada buku tugas mereka. Motivasi yang diberikan guru bertujuan untuk menambah semangat belajar peserta didik (Arianti, 2019).
8. Peran Guru sebagai Dinamisator
Fungsi dinamisator pada guru harus memiliki pandangan dan usaha untuk membangun karakter peserta didik. Guru hendaknya memiliki cara tersendiri untuk membangun karakter pada peserta didik. Guru juga harus menjalin hubungan dinamis dengan seluruh warga sekolah sebagai langkah membentuk karakter peserta didik. Guru memiliki kreativitas tinggi dalam menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Kedinamisan yang dibangun oleh guru harus bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai katakter peserta didik (Zulkarnain, 2019).
9. Peran Guru sebagai Evaluator
Guru profesional harus mempunyai peran evaluator yaitu guru mampu merancang alat ukur yang terkait dengan afektif (sikap), kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan). Guru juga harus mampu membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan KI-KD yang harus dicapai. Guru melakukan kegiatan evaluasi baik secara pengamatan, tertulis,



lisan, maupun proyek kemudian timbal balik dari apa yang telah dinilai. Evaluasi yang dilakukan oleh guru harus dilakukan secara berkala sehingga mendapatkan hasil yang signifikan (Tulak, 2021).

10. Peran Guru sebagai Supervisor

Guru sebagai supervisor yaitu berperan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian peserta didik untuk terus menambah semangat dan hasil belajar peserta didik. Menemukan permasalahan belajar yang dialami peserta didik yang kemudian mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut (Mutiaramses, 2021).

Simpulan

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam proses pendidikan yaitu tidak terlepas dari tugas, dan fungsi guru sehingga dapat berperan sebagai guru yang dapat mewujudkan guru yang profesional dan melahirkan generasi muda yang berprestasi, cerdas, menguasai teknologi, memiliki ahlak sesuai dengan cita-cita bangsa. Tugas guru yaitu meliputi tugas keprofesian, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Fungsi guru yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Peran guru yaitu sebagai pendidik, guru sebagai manajer dan leader, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai dinamisator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai supervisor.

BAB VII

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Nurbaiti

Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam
nurbaiti@akipba.ac.id

Pendahuluan

Lembaga Pendidikan sekolah merupakan pranata sosial yang telah lama mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik. Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana serta dana yang diadakan dan di dayagunakan oleh pemerintahan, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam membentuk kerjasama.

Pembelajaran di sekolah oleh guru harus dilaksanakan dengan baik dan bermutu. Pembelajaran yang bermutu berkorelasi dengan persiapan yang baik. Perencanaan dianggap sebagai kunci pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar secara efektif, menarik, bervariasi, dan progresif. Komite Sekolah merupakan mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai mitra sekolah, komite sekolah harus menjadi badan yang otonom agar memiliki posisi yang sejajar dengan sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga mewadahi partisipasi para stakeholder untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.

Masa depan sekolah ditentukan oleh kemandirian dan kemampuan sekolah dalam mengelola peluang dan tantangan dari luar versus kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sekolah. Kewenangan sekolah yang lebih luas merupakan kesempatan bagi Komite Sekolah untuk berperan dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan sekolah. Pendampingan Komite Sekolah dalam memutuskan pengalokasian sumber daya kepada prioritas program dan agar sekolah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dilayani, sehingga sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai kepada siswa. Mutu pendidikan berkaitan erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu. Banyak faktor yang



menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat dan tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa. Pelayanan pendidikan di sekolah adalah menjadi peran dari komite sekolah bersama dengan sekolah. Keberadaan komite sekolah diperkuat dari aspek yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 menyebutkan bahwa: "Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan" dan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite.

Pembahasan

Kelahiran Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah (KS)

Ketentuan mengenai Dewan Sekolah dan Komite Sekolah tertuang dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 merupakan "ibu" yang melahirkan Dewan sekolah dan Komite Sekolah. Bappenas berhasil memfasilitasi perumusan ketentuan tersebut berdasarkan hasil studi banding di beberapa negara maju, seperti Kanada.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, akhirnya istilah itu berubah menjadi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Mendiknas Nomor 044/u/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Mengapa Dewan Sekolah diubah menjadi Dewan Pendidikan? Hal ini lebih dikarenakan agar istilah Dewan Pendidikan dapat mewadahi jalur Pendidikan luar sekolah. Dengan alasan yang sama, istilah yang semula digunakan untuk Komite Sekolah adalah komite Pendidikan. Namun akhirnya digunakan istilah Komite Sekolah. Nama ini sebenarnya diadopsi dari nama *School Board* atau *School Cousel* dan *Board of Education* yang ada di beberapa negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat (Sri Renani, dkk. 2002).

Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Lembaga ini merupakan badan mandiri yang berkedudukan di setiap sekolah dan berperan untuk meningkatkan mutu layanan, serta efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, komite bergerak secara profesional, demokratis, gotong-royong, independen, dan akuntabel. Adanya komite ini diharapkan dapat membuat instansi sekolah senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada seluruh peserta didiknya. Dasar hukum Komite Sekolah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

tentang Komite Sekolah. Peraturan ini memiliki 16 pasal dan telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 30 Desember 2016.

Komite Sekolah juga merupakan mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai mitra sekolah, komite sekolah harus menjadi badan yang otonom agar memiliki posisi yang sejajar dengan sekolah. Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga mewadahi partisipasi para stakeholder untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah oleh karena itu Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan Pendidikan disatuan Pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur Pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan supaya terdapat suatu organisasi mandiri yang memiliki komitmen serta kepedulian terhadap kualitas pendidikan yang disediakan dan dijalankan pada suatu instansi sekolah atau satuan pendidikan. Dengan begitu, kualitas pendidikan pada instansi sekolah tersebut dapat selalu ditingkatkan karena terdapat lembaga yang membantu mengontrol dan mengawasi mutu layanan pendidikan yang diberikan. agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan Pendidikan.

Anggota Komite

Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota komite juga terdiri atas beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur keanggotaan komite yakni sebagai berikut:

1. Orang tua atau wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen).



2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan:
 - a. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat.
 - b. Anggota atau pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota atau pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
3. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - a. Pensiunan tenaga pendidik.
 - b. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
4. Persentase yang telah disebutkan menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Selain ketentuan di atas, keanggotaan Komite Sekolah juga dilarang atau tidak diperbolehkan berasal dari unsur:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
2. Penyelenggara sekolah yang bersangkutan.
3. Pemerintah desa.
4. Forum koordinasi pimpinan kecamatan.
5. Forum koordinasi pimpinan daerah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
7. Pejabat pemerintah atau pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Kepemimpinan Komite Sekolah

Organisasi komite sekolah tidak dapat dilepaskan dari konteks partisipasi masyarakat dan orang tua siswa terhadap penyelenggaraan mutu Pendidikan di sekolah atau madrasah. Keberadaan komite sekolah ini, menuntut adanya kepemimpinan dan iklim yang dapat membangun sinergisitas antara komite sekolah dengan pihak sekolah. Untuk itu, model kepemimpinan partisipatif dan model manajemen kolaboratif dapat menjadi alternatif bagi ketua dan pengurus komite sekolah (Suhadi, 2021).

Menurut Komara (2023) mengatakan bahwa: Konsep kepemimpinan partisipatif Kepemimpinan partisipatif melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. Melalui partisipasi aktif, anggota tim memiliki kesempatan untuk berkontribusi, berbagi ide, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Hal ini memberikan rasa dihargai dan diakui kepada anggota tim sebagai bagian penting dalam proses manajemen pendidikan.

Menurut Kasmawati (2021) mengatakan bahwa: Kepemimpinan kolaboratif merupakan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi perubahan, untuk mengatasinya membutuhkan kolaborasi, mendengarkan, mempengaruhi dan adaptasi sehingga kepemimpinan masa depan termasuk kepemimpinan suatu sekolah, membutuhkan pemimpin yang mampu mendorong dialog untuk pengembangan bersama, mampu memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman praktis seluruh anggota, mampu bersikap adil dengan memberikan ruang dan waktu untuk proses kolaboratif, mampu bersikap adil dalam distribusi kekuasaan dan mampu mendorong kondisi pembelajaran yang inovatif.



Partisipasi Komite Sekolah dalam Pengawasan Mutu Pendidikan

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 disebutkan bahwa, tugas komite sekolah adalah mengawasi pelaksanaan pelayanan di sekolah, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi peserta didik, orang tua atau ahli siswa, masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Tugas ini menuntut komite sekolah untuk melakukan Tindakan nyata di semua aspek aktivitas manajerial di sekolah. Aktifitas komite sekolah yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengadakan rapat secara rutin dan incidental sesuai kebutuhan dengan kepala sekolah, dewan guru, dan staf terkait dengan program sekolah dan rancangan kegiatan anggaran sekolah.
2. Mengadakan dan melakukan silaturahmi dengan pihak sekolah.
3. Meminta penjelasan kepada pihak sekolah tentang hasil belajar peserta didik.
4. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam penelusuran dan pemberdayaan alumni untuk membantu kegiatan sekolah.

Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Fungsi Komite Sekolah sebenarnya merupakan penjabaran peran Komite Sekolah tersebut, artinya satu peran komite sekolah terkait dengan fungsi Komite Sekolah yaitu: sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Pemberi Pertimbangan yang diberikan oleh Komite Sekolah didasarkan atas kepercayaan, rasa hormat, dan komitmen untuk visi bersama sehingga Komite Sekolah harus ikut serta dalam mengembangkan visi bersama dan rencana-rencana kemajuan sekolah serta melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan dalam program atau layanan sekolah bagi siswa dan orang tua. Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan pada tahap awal kegiatan bersama dengan komunitas sekolah, yaitu membangun suatu visi masa depan bersama, sebab visi bersama



merupakan kunci petunjuk untuk menerapkan peranan Komite Sekolah (Syam, 2017).

2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Salah satunya adalah keterlibatan komite sekolah dalam program pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Peran pendukung yang dipegang oleh Komite Sekolah mampu mendorong dan menyadarkan para orang tua lainnya dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan karena lembaga pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa sokongan dari masyarakat, maka sudah semestinya antara lembaga pendidikan dengan masyarakat senantiasa terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan terarah.
3. Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengontrol, terdapat faktor yang mendukung peran serta komite sekolah yaitu adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap peran komite sekolah dalam peningkatan mutu atau kualitas fasilitas pendidikan. Sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, sekolah dapat membantu dengan memberikan penjelasan rincian dana terkait RAPBS sehingga komite sekolah dapat mengawasi apa saja yang harus direalisasikan oleh sekolah agar tidak ditemukan penggelapan atau penyelewengan dana oleh sekolah, maka dari itu sekolah dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam RAPBS nya dan tidak ada kesulitan bagi sekolah untuk memenuhi setiap kebutuhan para peserta didik akan fasilitas pendidikan. Mengawasi pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dan mengalokasikan dana dan sumber daya untuk pelaksanaan program di sekolah merupakan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh komite sekolah. Komite sekolah juga memantau keberhasilan sekolah dalam aspek kualitas output atau lulusan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan amplifikasi kualitas fasilitas pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*executive*), dengan masyarakat di satuan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai penghubung atau mediator. Komite sekolah dapat sebagai penyambung aspirasi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dapat dimaknai bahwa wali murid dan masyarakat dapat menyampaikan keinginan mereka ataupun sekolah terhadap orang tua siswa dapat menyatakan bantuannya melalui perantara komite sekolah. Peran komite sekolah sebagai mediator memerlukan ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan, harapan, kepentingan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Hal-hal tersebut yang disalurkan melalui komite sekolah seharusnya dipergunakan oleh sekolah bagi perbaikan untuk kedepannya. (Febrianti *et.al*, 2023).

Simpulan

Komite sekolah suatu wadah bagi orang tua siswa dan masyarakat yang peduli dalam mendorong atau memajukan sekolah dalam satuan pendidikan

seperti membantu menyiapkan fasilitas perlengkapan pembelajaran serta peningkatan dalam mensejahterakan guru. Dengan demikian bahwa tugas dari komite sekolah dapat mempercepat dan mempermudah dalam pengoptimalan perencanaan program-program yang telah disusun, seperti 1) pemberi pertimbangan dalam peningkatan mutu yaitu melakukan koordinasi, memberi nasehat dan koreksi serta penampung dan penyampaikan aspirasi; 2) sebagai pengontrol dalam peningkatan mutu yaitu melakukan pengawasan dan mengecek pembagunan sekolah dari dana yang dialokasikan; 3) sebagai pendukung dalam peningkatan mutu yaitu memberi dukungan finansial serta memberi dukungan tenaga dan pikiran; dan 4) sebagai mediator dalam peningkatan mutu yaitu melakukan perundingan, dan penyampai informasi kepada masyarakat.

Diakhir tulisan ini saya menyarankan agar anggota yang terlibat dalam susunan pengurus komite sekolah dapat menjalankan tugas dengan baik dengan cara banyak membaca buku (aturan) yang ditetapkan pemerintah dan mengadakan kunjungan ke sekolah lain sebagai bahan perbandingan untuk memajukan sekolah tempat kita berada dan mengadakan kegiatan bersama orang guru dan orang tua siswa.



BAB VIII

MANAJEMEN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

Monovatra Predy Rezky

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara
monovatra@gmail.com

Pendahuluan

Manajemen satu kata yang bermakan pengelolaan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan menurut kamus ilmiah populer (Farid, 2000).

Manajemen dalam arti yang lain merupakan sebuah pengelolaan yang dilakukan dengan baik, tepat, teratur dan tuntas, tanpa proses manajemen maka hasilnya juga akan kurang baik, sebaliknya sesulit dan sebesar apapun suatu hal apabila diproses dengan manajemen yang baik maka bisa dipastikan akan berhasil dengan baik, efektif dan efisien (Wahyu, 2021).

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, mengartikan bahwa Pendidikan merupakan "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara." Berdasarkan pernyataan tujuan pendidikan di atas, untuk mencapai pendidikan yang baik dan berkualitas, perlu ada manajemen kurikulum yang efektif. Manajemen kurikulum ini harus mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk tujuan, isi, dan bahan ajar, pelaksanaan, dan evaluasi perbaikan (Awaluddi, 2021).

Ada 4 Pilar Dalam prinsip Manajemen, Terry dalam (Monovatra, 2021) mengatakan bahwa rangkaian dari manajemen diantaranya teruraikannya sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Pembahasan

Kurikulum adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat setelah mereka menyelesaikan sekolah. Kurikulum selalu didasarkan pada budaya bangsa, berdasarkan sejarahnya, masa kini, dan ramalan masa depan.

Teori kurikulum adalah alat pernyataan yang memberikan makna kepada kurikulum sekolah atau madrasah. Teori kurikulum mencakup topik seperti pengambilan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum (Sukmadinata, 2009).

Di era Society 5.0 yang begitu pesat perkembangannya, pendidikan menjadi wahana bagi pengembangan generasi milenial. Untuk itu, maka di perlukannya SDM yang kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan generasi milenial yang siap akan problematika dan tantangan, sehingga dapat dengan mudah mengikuti perkembangan system Pendidikan yang juga salah satu didalamnya



sebuah kurikulum yang begitu dinamis berubah dari waktu ke waktu (Rezky dkk., 2019).

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi (Nur Ahid, 2006).

Konsep Pertama, Kurikulum dipandang sebagai suatu dasar, yaitu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai visi misi sekolah tersebut. Kurikulum juga dapat menjadi ringkasan sebuah dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi.

Konsep Kedua, Kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu karena sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem utuh yang ada di sekolah bahkan luar sekolah. Sistem kurikulum mencakup segala bentuk yang bersifat administrasi, maupun non administrasi yang tersusun berdasarkan tata Kelola manajemen yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kurikulum. Tujuan sistem kurikulum dibangun yaitu untuk memastikan bahwa kurikulum tetap berlanjut.

Konsep ketiga, Kurikulum sebagai bidang studi adalah studi tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang kurikulum dan sistem kurikulum.

Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan satu bagian dari banyak hal yang dapat dikelola dalam sebuah pendidikan. Sebelum melangkah kemateri yang lebih lanjut tentang manajemen kurikulum, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang basic dari manajemen kurikulum itu sendiri.

Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu “manajemen” dan “kurikulum”. Kurikulum merupakan segala bentuk kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi proses perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di dalam sekolah maupun di luar agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan (Zainal Arifin, 2014).

Perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia telah disertai dengan berbagai perubahan konten dan struktur. Tujuannya adalah salah satu tujuan dari perubahan kurikulum yang ada adalah untuk salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Penyempurnaan kurikulum tersebut adalah. Hal ini untuk mempermudah pencapaian tujuan Pendidikan sehingga menjadi tantangan besar bagi para pendidik dan tenaga pengajar. Proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam konteks perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum Manajemen kurikulum Manajemen kurikulum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah akan Mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan lebih mudah dicapai. Undang-undang No. 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Kurikulum adalah perangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.



Bagian penting dari KTSP dan MBS adalah manajemen kurikulum. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada KTSP, lebih penting untuk menyesuaikan kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang relevan. Sehingga kurikulum tersebut sesuai dengan kondisi siswa dan begitu juga lingkungan sekolah.

Proses Perencanaan Kurikulum Dalam Pendidikan



Gambar 1. Proses Perencanaan Kurikulum Dalam Pendidikan

1. Perencanaan Kurikulum merupakan awal dari proses manajemen dan mengelola daripada kurikulum itu sendiri, yang bertujuan untuk mendampingi siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan mengevaluasi sampai dimana transformasi yang telah terjadi pada siswa. Pada proses ini kita sudah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan konten pembelajaran, relevansi dan ketepatan konten dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, selanjutnya metode pengajaran penting kita sudah rancang sampai dengan bagaimana strategi evaluasi yang digunakan untuk mengukut tercapainya tujuan pembelajaran dan penilaian formatif maupun sumatif kita sudah rancang mulai dari kisi-kisi sampai dengan penentuan skor pembobotan.
2. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum, pada proses tersebut kita sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar, penetapan tujuan berdasarkan skala prioritas dan Menyusun rencana aksi pada proses

selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum, dalam hal menyiapkan segala kebutuhan yang telah kita rencanakan diawal agar kurikulum bisa dilakukan. Kegiatan kurikulum dibagi 2 yaitu :

- a. Kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- b. Para guru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum tingkat kelas.

Pada manajemen pelaksanaan kurikulum masing-masing memiliki peran, yaitu :

- a. Pemimpin pembelajaran dalam hal ini kepala sekolah.
 - b. Kepemimpinan bersama dalam hal ini kepala sekolah dalam.
 - c. Manajemen kurikulum dalam hal ini wakil kepala sekolah
3. Supervisi Pelaksanaan Kurikulum. Supervisi kurikulum, juga dikenal sebagai pemantauan kurikulum, adalah proses pengumpulan informasi yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli dengan tujuan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kurikulum.
 4. Penilaian kurikulum adalah bagian dari sistem manajemen. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam rangka membuat keputusan apakah kurikulum harus diubah atau diganti.
 5. Perbaikan Kurikulum: Perubahan lingkungan mempengaruhi perbaikan kurikulum, yang memerlukan penyesuaian untuk memenuhi permintaan. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah tujuan utama perbaikan kurikulum, yang dapat ditunjukkan melalui dua elemen, yaitu proses dan produk.
 6. Sentralisasi dan desentralisasi kurikulum berarti bahwa semua wewenang diberikan kepada para manajer yang lebih kecil atau yang berada di puncak struktur organisasi. Kelemahan sistem ini adalah bahwa orang-orang di pemerintah pusat membuat kebijakan dan keputusan pemerintah daerah, yang memakan waktu (Fatkhul Ma'arif, 2020).

Simpulan

Manajemen kurikulum merupakan proses pengelolaan yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum di suatu lembaga Pendidikan. Diperlukan perencanaan yang matang dalam rangka mendapatkan hasil yang memuaskan mulai dari sisi tujuan pembelajaran, metode, teknik sampai dengan penilaian dan perbaikan. Selanjutnya pada pelaksanaan kurikulum pada fase ini antara guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk saling besinergi bagaimana guru pada praktik baiknya yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai media kontrol dan supervisi dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya pada fase mengevaluasi yaitu fase menilai dan menganalisis proses yang telah terjadi pada fase sebelumnya yaitu pelaksanaan dalam fase evaluasi segala bentuk yang telah dilaksanakan akan direvisi untuk diperbaiki yang selanjutnya akan Kembali ke fase awal yaitu proses perencanaan.



BAB IX

MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN

Turno

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
turnopagilaran@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses transmisi budaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan yang berkualitas harus diselenggarakan dengan manajemen yang baik. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien (Danarwati, 2013).

Manajemen pembelajaran dalam Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan. Manajemen pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien dan produktif, (Efendy, 2018). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, keberhasilan dalam proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar (Pane & Darwis Dasopang, 2017).

Pembahasan

Konsep Manajemen Pembelajaran Dalam Pendidikan

Manajemen pembelajaran merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar guna mencapai tujuan. Pengertian manajemen pembelajaran demikian dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan proses belajar mengajar mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran.

Manajemen pembelajaran merupakan interaksi antara berbagai komponen pengajaran, yang pada hakekatnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen utama, yaitu guru, isi atau materi pelajaran dan siswa. (Muhammad Ali, 2002) Interaksi antara ketiga komponen tersebut tentu juga melibatkan beberapa unsur yang lain yaitu, sarana-prasarana, metode, media, penataan lingkungan tempat belajar, pembiayaan, dan sistem evaluasi. Ada kecenderungan dewasa ini, untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi



mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang.

Manajemen pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai kualitas pembelajaran. Manajemen pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien dan produktif, (Efendy, 2018). Karena pembelajaran yang efektif dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran (Yusuf, 2017). Apabila proses pembelajarannya efektif, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah.

Prinsip Manajemen Pembelajaran Dalam Pendidikan

Prinsip-prinsip manajemen pembelajaran adalah prinsip-prinsip universal yang meliputi prinsip kesatuan arah atau *goal oriented*, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip *utilitas*, prinsip keteraturan, prinsip hierarki, prinsip jenjang komando, prinsip kesatuan komando, prinsip partisipasi dan kerjasama, prinsip koordinasi, prinsip rentangan kontrol, prinsip delegasi, prinsip moril, prinsip sub ordinasi, dan prinsip remunerasi.

Menurut McGregor (1960), prinsip-prinsip manajemen pembelajaran antara lain: a). Mementingkan tujuan pendidikan daripada kepentingan sendiri serta kelompok, b). Mengatur wewenang dan tanggung jawab, c). Memperhatikan staf dalam pemberian tugas serta tanggung jawab, d). Revitalisasi nilai-nilai.

Fungsi-Fungsi Manajemen Pembelajaran Dalam Pendidikan

Fungsi manajemen pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dapat menjadi solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan yang baik akan membantu sekolah dalam menentukan tujuan dan strategi dalam proses pembelajaran. Pengorganisasian yang efektif akan memastikan bahwa sumber daya pendidikan tersedia secara memadai dan terorganisir dengan baik. Pengarahan yang baik akan membantu siswa untuk fokus pada pembelajaran, sedangkan pengendalian akan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik (Suherman, 2017).

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses manajemen pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan merupakan elmen yang penting sebelum melakukan elmen yang lain. Perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini dilakukan agar guru dapat menilai diri sendiri selama melaksanakan pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam kemampuan merencanakan pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut: a). Menguasai silabus, b) Menyusun Analisis Materi Pelajaran (AMP), c). Menyusun program tahunan, d). Menyusun program semester, e). Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya pembelajaran di kelas yang merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah, yakni proses



interaksi guru dengan peserta didik dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam fungsi ini memuat kegiatan pengorganisasian dan pengarahan pembelajaran yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pengorganisasian pembelajaran sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang berkaitan. Pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan melalui guru serumpun dalam satu mapel, materi, pemilihan isi, penataan urutan isi, mengintegrasikan mutu akademik dengan tidak meninggalkan nilai-nilai karakter siswa dan *output* yang bermutu melalui prinsip (a) kejelasan tugas dan pertanggungjawaban, (b) pembagian kerja berdasarkan professional, (c) kesatuan arah kebijakan, (d) teratur, (e) disiplin, (f) adil (seimbang), (g) inisiatif, (h) semangat (i) kebersamaan, (j) sinergis, dan (k) ikhlas. Setiap guru diberikan kesempatan menjadi *leader* di kelas yang telah ditentukan untuk mengelola dan mengorganisir kelas.

Dalam pengorganisasian perlu diperhatikan semua kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Pengorganisasian pembelajaran yang diperkaya dengan kurikulum, bahasa dan agama, pengorganisasian alokasi waktu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: (1) memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2) mengarahkan tujuan pengajaran, (3) menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran, (4) melakukan pemantapan belajar, (5) menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, (6) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki program belajar mengajar, dan (8) melaksanakan hasil penilaian belajar.

Monitoring pembelajaran yang menyatakan bahwa pengawasan pembelajaran usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasai dan mengambil tindakan koreksi yang penjaminan bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. kepengawasan harus bersifat demokratis pula.

Supervisi merupakan pembinaan pendidikan secara kooperatif. Dalam tingkat ini, supervise bukan lagi suatu pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan merupakan pekerjaan-pekerjaan bersama yang di koordinasikan dan disusun dengan substansai hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil evaluasi. Tindak lanjut diberikan dalam bentuk penguatan, penghargaan, teguran, dan saran mengikuti pelatihan dengan prinsip (a) adaptif dan antisipatif/proaktif dalam kegiatannya, (b) memiliki jiwa kewirausahaan tinggi, (c) bertanggungjawab terhadap keberhasilan program dan kegiatan; (d) memiliki kontrol kualitas, kualifikasi, dan spesifikasi yang kuat dalam manajemen dan sumberdaya sesuai dengan tuntutan program dan kegiatan; (e) memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi pelaksanaan (waktu, target, personil, tempat, sasaran, pendanaan, dan sebagainya); (f) komitmen yang tinggi pada dirinya sebagai pelaksana; dan (g)

menggunakan tolok ukur prestasi dalam melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada perolehan informasi tentang seberapa jauh perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik dan fungsi seleksi. Fungsi manajemen pembelajaran merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Penerapan fungsi manajemen pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Latifah, Warisno, & Hidayah, 2021).

Unsur-Unsur Manajemen Pembelajaran Dalam Pendidikan

Unsur-unsur manajemen, pada umumnya terdiri dari 6 (enam) yang dikenal dengan the six MS, yaitu *Men, Money, Materials, Teachers, Methods and Students*. (Winardi, 1983) Diantara seluruh unsur tersebut, *men* (manusia) adalah unsur yang paling penting di dalam proses manajemen, sebab manajemen itu ada karena adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah dipakati bersama. Hal ini berarti manusia merumuskan tujuan, manusia yang menyusun organisasi sebagai wadah pencapaian tujuan, manusia pula yang bekerja untuk mencapai tujuan dan sekaligus manusia pula yang mengendalikan serta menikmati hasil-hasil yang dicapai.

Unsur-unsur pembelajaran yang dikemukakan oleh Meir (2002: 103) sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap ini peserta didik disiapkan untuk belajar yang memiliki tujuan menumbuhkan minat peserta didik, memberi perasaan yang positif, dan memposisikan peserta didik pada kondisi yang optimum untuk belajar.

2. Penyampaian

Tahapan ini adalah proses mempertemukan antara peserta didik dan materi belajar. Tahap ini memiliki tujuan membantu peserta didik dalam mendapatkan materi belajar baru dengan cara yang relevan, menyenangkan, menarik, dan melibatkan panca inderanya.

3. Latihan

Tahapan ini merupakan tahap keberlangsungan proses pembelajaran. Pada tahap ini pendidik menjadi pelopor dalam proses belajar serta menciptakan suasana belajar.

4. Penampilan Hasil

Pada tahap ini, nilai dari program belajar akan dapat diketahui. Tahap ini merupakan bagian dari seluruh proses belajar, sehingga pada tahap ini penting disadari. Tujuannya yakni agar mengetahui bahwa pembelajaran akan tetap melekat serta berhasil diamalkan.

Ciri-Ciri Manajemen Pembelajaran Dalam Pendidikan

Agar mendapatkan hasil belajar bagus serta istimewa bukan suatu hal yang mudah. Tentu terjadi banyak faktor dan hambatan yang akan mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, diperlukan pemahaman terhadap ciri-ciri



pembelajaran. Terdapat beberapa ciri pembelajaran secara umum, diantaranya: a). Merupakan upaya sadar dan disengaja, b). Pembelajaran harus membuat siswa belajar, c). Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, d). Pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Hamalik (1994:65) menyatakan bahwa terdapat tiga ciri-ciri dalam manajemen pembelajaran yang perlu ada pada bidang pendidikan yaitu:

1. Rencana

Rencana merupakan pembentukan ketenagaan, material dan proses. Hal ini menggambarkan bagian dari komponen pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada (Sanjaya, Wina, 2016). Rencana yang berhasil membahas dan mengintegrasikan ketiga komponen kunci berikut: 1). Tujuan pembelajaran, 2). Kegiatan belajar/mengajar, 3). Strategi untuk memeriksa pemahaman peserta didik.

2. Saling ketergantungan (*interdependence*)

Saling ketergantungan merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang sesuai kelengkapan. Setiap komponen bersifat absolut dan tiap-tiap komponen tersebut memberi kontribusinya terhadap komposisi belajar mengajar.

3. Tujuan (*goal*)

Sistem pembelajaran memiliki target yang ingin diraih. Ciri menjadi suatu dasar yang membedakan antara sistem yang dibentuk oleh manusia dan sistem yang bersifat alamiah.

Pendekatan Manajemen Pembelajaran Dalam Pendidikan

Pendekatan pembelajaran adalah sebuah proses belajar yang dibuat oleh pendidik dan dikuasainya ketika melaksanakan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2006:36), Masitoh dan Dewi (2009:39) mengemukakan bahwa ada dua pendekatan pembelajaran yakni pendekatan fokus kepada pendidik dan pendekatan fokus kepada peserta didik.

1. Pendekatan pembelajaran yang fokus kepada pendidik.

Pendekatan pembelajaran berorientasi pada pendidik adalah pendekatan yang berpusat pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia pada kurikulum-kurikulum terdahulu. Ciri utama dari pendekatan ini adalah manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru sepenuhnya. Siswa hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru sehingga siswa cenderung pasif.

2. Pendekatan pembelajaran yang fokus kepada peserta didik

Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa atau *student centered approaches* adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pendekatan pembelajaran ini, siswa berperan sebagai subjek belajar sehingga dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Pendekatan pembelajaran ini juga memberikan siswa kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan

keinginannya. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Manajemen pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai kualitas pembelajaran.
2. Prinsip-prinsip manajemen pembelajaran adalah prinsip-prinsip universal yang meliputi prinsip kesatuan arah atau *goal oriented*, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip *utilitas*, prinsip keteraturan, prinsip hierarki, prinsip jenjang komando, prinsip kesatuan komando, prinsip partisipasi dan kerjasama, prinsip koordinasi, prinsip rentangan kontrol, prinsip delegasi, prinsip moril, prinsip sub ordinasi, dan prinsip remunerasi.
3. Fungsi manajemen pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dapat menjadi solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan.



BAB X

MANAJEMEN EVALUASI PENDIDIKAN

Citra Dewi

Universitas Dehasen Bengkulu
citravioleta04@unived.ac.id

Pendahuluan

Manajemen merupakan prosesi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pemberdayaan sumber daya pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Manajemen ialah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menertentukan serta mencapai sasaran yang telah dirumuskan melalui pemanfaatan SDM serta sumbe-sumber lain. Dengan kata lain pengertian manajemen adalah capaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya menggunakan kegiatan orang lain. Dapat dikatakan juga bahwa manajemen adalah seni atau kreatifitas dalam mengatur sistem, baik orang maupun perangkat lain supaya dapat berjalan serta bekerja sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang terdiri dari berbagai aktivitas

Secara etimologi evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang artinya penilaian. Sedangkan menurut istilah atau terminologi evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan mengukurnya menggunakan instrumen yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dan dijadikan sebuah tolak ukur tertentu sebagai perolehan kesimpulan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara secara berlangsung seumur hidup. Maka dari pengertian di atas evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan.

Pembahasan

Ruang Lingkup Evaluasi Pendidikan

Ruang lingkup evaluasi pendidikan berguna untuk melihat suatu sistem dalam kegiatan proses pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pendidikan ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. Ruang Lingkup Evaluasi Program Pembelajaran

Ruang lingkup ini meliputi: program tahunan, semester, modul, mingguan, dan harian. evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Apapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan



apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Dalam bidang pendidikan ditinjau dari sarasannya/evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Evaluasi yang bersifat makro sarasannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Mardapi, 2000:2). Guru mempunyai tanggung jawab menyusun dan melaksanakan program pembelajaran di kelas, sedangkan pimpinan sekolah bertanggung untuk mengevaluasi program pembelajaran yang disusun dan dilaksanakan oleh guru. Dalam buku yang lain Suharsimi (2008: 291) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Menurut Yusuf (2000:9) program diartikan sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam buku ini program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu:

- a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dengan kata lain ada keterkaitan antar-kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal bukan kegiatan individual.
- d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain.

Pembelajaran merupakan salah satu bentuk program, karena pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai orang, baik guru maupun siswa, memiliki keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan kegiatan pembelajaran yang lain, yaitu untuk mencapai kompetensi bidang studi yang pada akhirnya untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan, serta berlangsung dalam organisasi. Agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu kiranya dibuat suatu program pembelajaran. Program pembelajaran yang biasa disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan panduan bagi guru atau pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Program pembelajaran yang dibuat oleh guru tidak selamanya bisa efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu agar program pembelajaran yang telah dibuat yang memiliki



kelemahan, tidak terjadi lagi pada program pembelajaran berikutnya, maka perlu diadakan evaluasi program pembelajaran.

2. Ruang Lingkup Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Ruang lingkup ini meliputi: kesesuaian antara proses belajar mengajar, kesiapan guru, kesiapan siswa, minat siswa, keaktifan siswa, peranan pembimbingan penyuluhan, komunikasi dua arah antar guru dan siswa, motivasi untuk siswa, tugas yang diberikan pada siswa, dan upaya menimbulkan dampak negatif dari kegiatan di sekolah. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

Menurut Sudirman N, dkk, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah: a. Mengambil keputusan tentang hasil belajar b. Memahami peserta didik c. Memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Selanjutnya pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketidakberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain, sebagai berikut: a. Kemampuan peserta didik rendah. b. Kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak. c. Jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. d. Komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Di samping itu, pengambilan keputusan juga sangat diperlukan untuk memahami peserta didik dan mengetahui sampai sejauhmana dapat memberikan bantuan terhadap kekurangan-kekurangan peserta didik.

3. Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran

Ruang lingkup ini meliputi: evaluasi mengenai tingkat penguasaan siswa dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian siswa. Bagi siswa dengan evaluasi akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah semakin menurun. Apakah naik kelas atau tidak, ataukah lulus dalam ujian sekolah atau tidak lulus. Bagi orang tua, mereka akan mudah untuk mengetahui bahwa anaknya memiliki kualitas atau tidak, naik ke kelas berikutnya atau tidak. Ini dapat dilihat dari buku laporan hasil pendidikannya. Begitu juga bagi pihak sekolah. Kepala sekolah serta semua guru-guru akan dapat mengetahui bagaimana perkembangan grafik kelulusan siswanya setiap tahun. Demikian juga dengan siswa-siswanya yang tidak naik ke kelas berikutnya. Masyarakat juga akan mengetahui dengan evaluasi tersebut, apakah sekolah yang ada di sekelilingnya tersebut memiliki mutu atau tidak. Kemudian masyarakat dapat membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lain dalam hal menyekolahkan atau melanjutkan pendidikan putra-putrinya.



Apalagi masyarakat bila menjadikan output dan lembaga pendidikan itu untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai, lalu bagaimana dengan produktifitasnya sehubungan dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki itu. Jadi masyarakat sebagai pengguna tenaga lulusan dari sekolah itu akan melihat dengan sendirinya dari hasil evaluasi itu sendiri. Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, berikut dikemukakan beberapa fungsi evaluasi, antara lain: 1. Penilaian Berfungsi Selektif Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain; a. Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. b. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. c. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. d. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. 2. Penilaian Berfungsi Diagnostik Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab musabab kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasi. 3. Penilaian Berfungsi sebagai penempatan sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara Barat, adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendirisendiri sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi disebabkan karena keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan, adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. 4. Penilaian Berfungsi Sebagai Pengukur Keberhasilan Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan system administrasi.

Manajemen Evaluasi Pendidikan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan institusional tersebut, tujuan yang masih bersifat umum itu perlu dijabarkan di dalam satu susunan atau sistematika tujuan secara hirarchis sehingga memudahkan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan itu. Kalau tujuan lembaga itu merupakan tujuan akhir sesuatu usaha pendidikan, maka tujuan lainnya yang terarah pada perwujudan tujuan tersebut dapat disebut tujuan intermedier. Kesementaraan tujuan itu terletak di dalam kenyataan bahwa apabila tujuan itu telah tercapai, maka tujuan itu menjadi alat untuk mencapai tujuan di atasnya begitulah seterusnya.



Tujuan pendidikan nasional menjadi dasar, arah bagi kebijakan pemerintah dalam merumuskan visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara agar berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi itu dirumuskan misi pendidikan nasional sebagai berikut : (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan internasional; (3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan keterampilan pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian tujuan pendidikan nasional merupakan arah pencapaian daripada bermacam-macam tujuan institusional.

Tujuan institusional umumnya dirumuskan dalam rencana pelajaran, rencana pendidikan dan pengajaran, kurikulum untuk lembaga pendidikan tersebut. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan itu. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari pada tujuan institusional / program studi. Sedangkan tujuan instruksional merupakan penjabaran lebih lanjut daripada tujuan kurikuler. Dengan demikian tujuan kurikuler merupakan arah pencapaian daripada tujuan instruksional. Dalam proses interaksi edukatif, tujuan inilah yang menjadi arahan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sebab tujuan ini dirumuskan dari segi proses. Sedangkan tujuan lembaga dan tujuan program studi merupakan tujuan pendidikan yang dirumuskan dari segi normatif. Dengan demikian keberhasilan dalam pencapaian tujuan instruksional akan menentukan sekali keberhasilan dalam mencapai tujuan lembaga.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendidikan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi proses dan hasil belajar pada satuan-satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar satuan pendidikan menengah maupun satuan pendidikan tinggi. Evaluasi tersebut dilakukan oleh guru, sekolah dan pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana yang dituntut dalam silabus atau kurikulum mata pelajaran. Evaluasi yang dilakukan sekolah untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran dan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan dari sekolah. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Oleh karena itulah fungsi penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

sangat penting dilaksanakan pada satuan-satuan pendidikan dalam usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Sehubungan dengan itu guru sebagai tenaga pengajar yang profesional harus mengetahui dan memahami tentang bagaimana prosedur melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang benar. Disamping itu pula hasil dari evaluasi proses dan hasil belajar dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajarmengajar melalui penelitian tindakan kelas. Kita tidak dapat melakukan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Mengadakan evaluasi meliputi kegiatan mengukur dan menilai. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. (P.P RI Nomor: 19 Tahun 2005). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi kinerja pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi : 1) Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2) Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler 3) Hasil belajar peserta didik 4) Realisasi anggaran. (P.P RI Nomor: 19 Tahun 2005). Penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar adalah kegiatan untuk menentukan mutu proses dan hasil belajar dalam suatu satuan pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi berkaitan dengan proses dan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat pengukuran berupa tes dan non tes.

Simpulan

Ruang lingkup dalam evaluasi pendidikan terdiri atas empat komponen, yaitu; ruang lingkup program pembelajaran, ruang lingkup kegoatan pembelajaran, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang dapat dijadikan sasaran penilaian untuk menentukan efektif tidaknya proses pembelajaran yang berlangsung antara lain : a) Kurikulu/materi; b) Strategi dan metode pembelajaran; c) Sarana pendidikan/media/sumber belajar; d) Sistem administrasi; e) Aktivitas belajar siswa dan f) Lingkungan belajar siswa. Evaluasi hasil belajar di sekolah. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendidikan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi proses dan hasil belajar pada satuan-satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar satuan pendidikan menengah maupun satuan pendidikan tinggi. Evaluasi tersebut dilakukan oleh guru, sekolah dan pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana yang dituntut dalam silabus atau kurikulum mata pelajaran. Evaluasi yang dilakukan sekolah untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran dan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan dari sekolah.



BAB XI

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN

Reina A. Hadikusumo
Universitas Surabaya
reina_hadikusumo@yahoo.com

Pendahuluan

Manajemen Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting dalam sektor pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menciptakan budaya perusahaan dan mencapai misi serta tujuan keseluruhannya melalui manajemen karyawan (Coursera, 2023). Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif dapat menghantar keberhasilan dan pertumbuhan lembaga pendidikan ke arah yang lebih baik.

Lembaga Pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bertujuan mengubah perilaku dan sikap seseorang, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri seseorang, serta mengasah keterampilan seseorang (Larasati, 2023). Lembaga pendidikan meliputi dua sektor, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan formal meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, Institut, dan Universitas. Lembaga pendidikan non formal meliputi lembaga belajar, lembaga pelatihan, dan kursus.

Kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia pada lembaga pendidikan formal dan non formal harus dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan seperti Rekrutmen dan Seleksi, Pelatihan dan Pengembangan, Penilaian Kinerja, Kompensasi, Kesehatan dan Keselamatan para karyawan, yang meliputi tenaga pengajar (guru, dosen, pelatih) dan staf (selain tenaga pengajar).

Pembahasan

Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan

Tenaga kerja di dalam organisasi harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan memberikan keuntungan bagi organisasi dalam jangka panjang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen di dalam suatu organisasi meliputi pengelolaan tenaga kerja, waktu, modal (uang dan peralatan).

Menurut Dessler (2016), *“Human Resource Management is a process of acquiring, training, appraising, and compensating employees and attending to their labor relations, health and safety, and fairness concerns”* (Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan serta memperhatikan masalah hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan, serta keadilan).

Manajemen Sumber Daya Manusia sangat diperlukan oleh perusahaan maupun lembaga pendidikan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan siap memajukan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia di sebuah

organisasi sangat mempengaruhi kinerja karyawan, rekrutmen dan seleksi karyawan, serta retensi karyawan (Dessler, 2016). Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tepat dalam lembaga pendidikan akan mempengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kinerja Tenaga Pengajar**
Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para tenaga pengajar dan staf sehingga dapat menentukan program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja mereka.
2. **Rekrutmen dan Seleksi yang Efektif**
Dengan memanfaatkan proses rekrutmen yang strategis, lembaga pendidikan dapat menarik calon para tenaga pengajar dan staf yang paling memenuhi syarat dan sesuai untuk posisi yang dibutuhkan.
3. **Retensi Staf**
Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat di lembaga pendidikan menjamin dipertahankannya para tenaga pengajar dan staf yang terampil dan berpengalaman sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan kontinuitas dalam organisasi.

Strategi Utama dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa strategi utama dan efektif dalam Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu: Rekrutmen dan Seleksi, Pelatihan dan Pengembangan, Penilaian Kinerja, Kompensasi, Kesehatan dan Keselamatan (Dessler, 2016). Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan meliputi kegiatan:

1. **Rekrutmen Dan Seleksi**
Proses rekrutmen yang efektif merupakan dasar dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Jika lembaga pendidikan dapat merekrut para tenaga pengajar dan staf yang terampil, maka lembaga pendidikan dapat mengembangkan keterampilan mereka dan berinvestasi selama bertahun-tahun karena mereka memberikan nilai tambah bagi organisasi. Terdapat beberapa cara rekrutmen umum yang biasanya digunakan oleh pihak Manajemen Sumber Daya Manusia untuk menginformasikan lowongan kerja seperti Indeed, Foundit, Naukri, wawancara video, dan LinkedIn. Rekrutmen dan seleksi di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan cara:
 - a. Memanfaatkan teknik periklanan yang efektif untuk menarik calon para tenaga pengajar dan staf yang potensial.
 - b. Melakukan proses penyaringan dan seleksi yang ketat untuk mengidentifikasi posisi yang paling cocok untuk mengajar.
2. **Pelatihan Dan Pengembangan**
Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan menerapkan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas para tenaga pengajar dan staf. Pelatihan dan pengembangan adalah proses strategis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan membuat mereka tetap terlibat (Landau, 2023). Setiap karyawan menginginkan peluang untuk maju dan merasa kompeten serta dihargai dengan apa yang telah mereka berikan pada organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan dapat memberikan



kesempatan belajar kepada para tenaga pengajar dan staf yang mencakup program penggantian biaya sekolah, pilihan pelatihan di tempat kerja, konferensi, konvensi, atau program sertifikasi. Manajemen Sumber Daya Manusia juga dapat menggunakan pengembangan dan pengetahuan para tenaga pengajar dan staf untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan organisasi, seperti peningkatan sistem, pergeseran teknologi, dan kebijakan baru. Pelatihan dan Pengembangan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan cara:

- a. Melaksanakan sesi pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para tenaga pengajar dan staf;
- b. Mendorong partisipasi dalam lokakarya dan konferensi agar para tenaga pengajar dan staf tetap mengetahui praktik pendidikan terkini.

3. Penilaian Kinerja

Manajemen Sumber Daya Manusia akan melakukan penilaian kinerja secara berkala terhadap para tenaga pengajar dan staf dan menggunakan data kinerja tersebut untuk memastikan tenaga kerja yang sangat terlatih dan cakap. Data kinerja yang dikumpulkan juga dapat digunakan untuk menerapkan metode pelatihan yang paling tepat dan menerapkan sistem kenaikan gaji berdasarkan prestasi. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat maka pihak Manajemen Sumber Daya Manusia akan menggunakan ukuran formal seperti tinjauan kinerja dan teknik informal seperti wawancara atau survei. Menurut Robbins & Coulter (2016), terdapat beberapa indikator penilaian kinerja karyawan, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penilaian kinerja di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan cara:

- a. Melakukan evaluasi kinerja yang adil dan obyektif untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada para tenaga pengajar dan staf.
- b. Menggunakan penilaian kinerja yang tepat untuk mengidentifikasi bidang yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan rencana pertumbuhan profesional secara personal.

4. Kompensasi

Kompensasi meliputi gaji, bonus, tunjangan, libur, dan tunjangan non-moneter lainnya. Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan akan menetapkan suatu standar untuk menentukan jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan libur. Hal ini untuk memastikan adanya keadilan serta memungkinkan standar kompensasi yang tepat dan konsisten. Lembaga pendidikan juga akan menggunakan tinjauan kinerja untuk menyesuaikan gaji para tenaga pengajar dan staf. Semakin baik kinerja seseorang maka akan meningkatkan kredibilitasnya untuk layak memperoleh kompensasi yang semakin tinggi. Kompensasi di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan cara:

- a. Memberikan jumlah gaji yang layak dan sepadan serta kompetitif untuk menarik dan mempertahankan staf pengajar dan staf yang berkualitas;
- b. Menawarkan manfaat tambahan seperti cuti berbayar (untuk karyawan wanita yang hamil dan melahirkan), serta tunjangan pengembangan profesional (pelatihan, seminar, webinar).

5. Kesehatan dan Keselamatan

Kesehatan dan keselamatan para tenaga pengajar dan staf merupakan aspek yang sangat penting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan. Kesehatan dan keselamatan mencakup banyak hal, seperti keselamatan dari diskriminasi, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, keamanan fisik dari kebakaran gedung, dan keamanan informasi pribadi karyawan. Banyak hal yang harus diperhatikan dengan seksama dan dilakukan dengan baik oleh pihak Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan untuk melindungi seluruh aspek kesehatan dan keselamatan para tenaga pengajar dan staf. Kesehatan dan keselamatan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan cara:

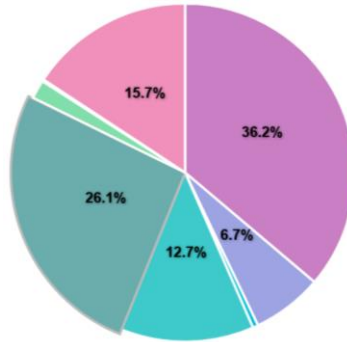
- a. Menerapkan sistem keamanan dan keselamatan dengan memasang kamera keamanan berupa CCTV (*Closed Circuit Television*), menegakkan aturan penggunaan internet, menerapkan kebijakan tanpa toleransi, dan membuat area akses terbatas;
- b. Mengikutsertakan para tenaga pengajar dan staf pada asuransi kesehatan seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Terdapat beberapa macam BPJS, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Hari Tua, BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Jaminan Kematian, BPJS Jaminan Pensiun, BPJS Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Link Aja, 2022). Selain peserta perorangan, saat ini semakin banyak perusahaan dan lembaga pendidikan yang merasakan manfaat dari mengikutsertakan karyawan dalam BPJS.

Menurut Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat 267.311.566 jumlah peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dengan perincian sebagai berikut:

- Penerima Bantuan Iuran
36,2% = 96.753.724 orang
- Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara
6,7% = 18.002.569 orang
- Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara – BUMN
0,50% = 1.367.752
- Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara - Swasta
12,7% = 34.066.988 orang
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
26,1% = 69.805.619 orang
- Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara
1,78% = 4.782.097 orang
- Bukan Pekerja (BP) Non Penyelenggara Negara
0,18% = 481.130 orang
- Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah
15,7% = 42.051.687 orang





Gambar 1
Data Jaminan Kesehatan Nasional per tanggal 31 Desember 2023
 Sumber: <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/>

Keterangan:

- Penerima Bantuan Iuran
- Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara
- PPU Non Penyelenggara Negara - BUMN
- PPU Non Penyelenggara Negara - Swasta
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP)
- Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara
- Bukan Pekerja (BP) Non Penyelenggara Negara
- Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah

Peran teknologi pada Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bidang pendidikan

Teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan praktik Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dengan menyederhanakan proses, meningkatkan komunikasi, dan memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan strategis. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan harus selalu mengikuti inovasi terbaru untuk mengoptimalkan manajemen tenaga kerja. Peran teknologi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di sektor pendidikan menjadi semakin signifikan, mengubah praktik sumber daya manusia tradisional dan berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien.

Terdapat beberapa aspek kunci bagaimana teknologi mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan:

1. *Recruitment and Talent Acquisition* (Rekrutmen dan Akuisisi Talenta)
 - a. *Online Job Portals* (Portal Pekerjaan Daring)
 Lembaga pendidikan memanfaatkan *online platform* untuk memposting lowongan pekerjaan, sehingga memungkinkan mereka menjangkau khalayak yang lebih luas dan menarik kandidat tenaga pengajar dan staf yang potensial.
 - b. *Applicant Tracking Systems* (Sistem Pelacakan Pelamar)
 Sistem ini membantu menyederhanakan proses rekrutmen dengan mengelola lamaran, menyaring resume, dan melacak kemajuan kandidat tenaga pengajar dan staf melalui berbagai tahapan.



2. *Learning Management Systems* (Sistem Manajemen Pembelajaran)
 - a. *Training and Development* (Pelatihan dan Pengembangan)

Learning Management Systems Platform memfasilitasi pengelolaan program pelatihan dan peluang pengembangan profesional bagi para tenaga pengajar dan staf. Ini termasuk kursus *online*, lokakarya, dan sertifikasi.
 - b. *Skill Tracking* (Pelacakan Keterampilan)

Teknologi memungkinkan Manajemen Sumber Daya Manusia profesional untuk melacak keterampilan dan kompetensi para tenaga pengajar dan staf, membantu mereka mengidentifikasi kesenjangan, dan merancang program pelatihan yang ditargetkan.
3. *Employee Engagement and Communication* (Keterlibatan dan Komunikasi Karyawan)
 - a. *Communication Platforms* (Platform Komunikasi)

Manajemen Sumber Daya Manusia dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dalam organisasi melalui platform seperti *e-mail*, pesan instan, dan alat kolaborasi, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para tenaga pengajar dan staf.
 - b. *Employee Feedback Tools* (Alat Umpan Balik Karyawan)

Survei dan mekanisme umpan balik yang didukung oleh teknologi memberikan wawasan kepada Manajemen Sumber Daya Manusia tentang kepuasan para tenaga pengajar dan staf serta membantu perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja lembaga pendidikan.
4. *Performance Management* (Manajemen Kinerja)
 - a. *Performance Evaluation Software* (Perangkat Lunak Evaluasi Kinerja)

Teknologi membantu mengotomatiskan proses penilaian kinerja, menjadikannya lebih obyektif dan berbasis data. Ini termasuk menetapkan tujuan, melacak kemajuan, dan melakukan penilaian rutin.
 - b. *Data Analytics* (Analisis Data)

Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dapat memanfaatkan analisis data untuk mendapatkan wawasan tentang tren kinerja para tenaga pengajar dan staf, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengenali individu yang berkinerja tinggi.
5. *HR Analytics and Reporting* (Analisis dan Pelaporan Sumber Daya Manusia)
 - a. *Data-driven Decision Making* (Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data)

Teknologi memungkinkan Manajemen Sumber Daya Manusia profesional dalam menganalisis kumpulan data yang besar untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perencanaan jumlah tenaga pengajar dan staf yang dibutuhkan, alokasi sumber daya, dan inisiatif sumber daya manusia yang strategis.
 - b. *Predictive Analytics* (Analisis Prediktif)

Alat analisis prediktif membantu memperkirakan tren, seperti mengidentifikasi potensi risiko pergantian atau menentukan kebutuhan jumlah tenaga pengajar dan staf di masa depan.



6. *Employee Self-Service Portals* (Portal Layanan Mandiri Karyawan)
 - a. *Automation of HR Processes* (Otomatisasi Proses Sumber Daya Manusia)

Portal layanan mandiri karyawan memungkinkan individu mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka, meminta cuti, dan melihat tunjangan, sehingga mengurangi beban administratif pada tim Manajemen Sumber Daya Manusia.
7. *Cybersecurity and Data Protection* (Keamanan Siber dan Perlindungan Data)
 - a. *Security Measures* (Tindakan Keamanan)

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, memastikan keamanan data sensitif karyawan menjadi hal yang sangat penting. Manajemen Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan harus menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi informasi rahasia para tenaga pengajar dan staf.
8. *Remote Work and Flexibility* (Pekerjaan Jarak Jauh dan Fleksibilitas)
 - a. *Virtual Collaboration Tools* (Alat Kolaborasi Virtual)

Manajemen Sumber Daya Manusia memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi virtual, manajemen proyek, dan komunikasi untuk menjaga alur kerja yang efisien dalam menangani pekerjaan jarak jauh, khususnya bagi para tenaga pengajar.

Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pendidikan

Manajemen Sumber Daya Manusia di lembaga pendidikan memiliki tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. *Tingkat Turnover*

Lembaga pendidikan dapat menghadapi tingkat *turnover* dari para tenaga pengajar dan staf karena berbagai faktor seperti gaji yang rendah, beban kerja yang berat, dan terbatasnya peluang kemajuan karir. Oleh sebab itu perlu kiranya diperhatikan tingkat kesejahteraan dari para tenaga pengajar dan staf sehingga mereka tidak mengundurkan diri dan berpindah ke lembaga pendidikan atau perusahaan lain.
2. *Kendala Anggaran*

Lembaga pendidikan seringkali beroperasi dengan anggaran yang terbatas, sehingga sulit untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan pengelolaan fasilitas dan tenaga kerja. Jumlah anggaran yang terbatas akan berpengaruh pada jumlah dan kualitas fasilitas yang merupakan sarana pembelajaran bagi para siswa.
3. *Aspek Pendidikan*

Kemajuan teknologi yang pesat dan praktik pendidikan yang terus berkembang memerlukan adaptasi dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan dari para tenaga pengajar dan staf.

Simpulan

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sangat penting bagi keberhasilan lembaga pendidikan. Dengan menerapkan strategi seperti Rekrutmen dan Seleksi, Pelatihan dan Pengembangan, Penilaian Kinerja, Kompensasi, Kesehatan dan Keselamatan, maka lembaga pendidikan dapat memastikan pertumbuhan dan peningkatan para tenaga pengajar dan staf secara

berkelanjutan. Mengatasi tantangan seperti tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan anggaran sangat penting untuk mengoptimalkan praktik pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Pada akhirnya, investasi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia berkontribusi pada kualitas pendidikan yang diberikan, sehingga memberikan manfaat bagi para tenaga pengajar dan para siswa.



BAB XII

MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENDIDIKAN

Darul Prayogo

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
darul@pip-semarang.ac.id

Pendahuluan

Setiap orang tua memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya. Namun terkadang, tidak semua orang tua memiliki kesempatan tersebut karena biaya sekolah yang selalu dianggap mahal (Sefhia Naila Sabrina, 2022). Disatu sisi, mencerdaskan anak demi masa depan adalah sebuah dambaan. Namun jika dipakai sekolah, kebutuhan sehari-hari akan terganggu. Saat ini, biaya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk anak kita (Sudarmono et al., 2021). Orang tua rela menghabiskan jutaan rupiah untuk iuran sekolah serta kebutuhan anak lainnya.

Pada Tahun 2018, dilakukan survei oleh HSBC, bahwa negara Indonesia masuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan yang mahal (Herdi Alif Al Hikam, 2019). Posisi pertama ditempati Hong Kong, sementara Indonesia berada di peringkat 13. Orang tua di Hong Kong membayar untuk pendidikan anaknya, rata-rata US\$132.161 dari pendidikan dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi. Orang percaya, anaknya akan memiliki masa depan yang cerah jika memiliki pendidikan yang tinggi.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Bangsa yang maju adalah bangsa yang terdidik (Angga et al., 2022). Namun keuangan Negara berkembang ibaratnya seperti keuangan rumah tangga yang pas-pasan. Kadang kadang tak terduga anak sakit, sehingga butuh pengeluaran lebih, hutang tetangga/bank/koperasi untuk membiayai. Begitupun rumah tangga negara, suatu ketika daerah tertentu terjadi bencana alam. Sehingga butuh bantuan negara lain dalam hal sandang, pangan, papan. Tidak selamanya bantuan datang, sehingga untuk massa pemulihan butuh pinjaman.

Ketika dalam ekonomi rumah tangga akan membeli perabotan misalnya, namun disaat yang bersamaan adalah saat anak kedua akan masuk misalnya SMP. Maka akan lebih mendahulukan prioritas pendidikan anak kedua. Seperti halnya dengan ekonomi negara, disaat akan mengembangkan model kurikulum misalnya. Namun, daerah lain bangunan sekolah sudah sangat mempritahinkan sehingga prioritas pengembangan akan ditunda terlebih dahulu.

Ketika dalam keluarga ekonomi pas-pasan dengan banyak anak, beban ekonomi akan terasa berat. Seperti halnya dengan ekonomi negara ini, pendapatan pas-pasan dengan enam belas ribuan pulau tersebar serta 34 provinsi dengan 275 juta jiwa (Adi Ahdiat, 2023) merupakan beban ekonomi yang berat.

Pembahasan

Biaya seringkali menjadi perbincangan dalam pendidikan. Beberapa orang berpendapat bahwa biaya pendidikan terlalu tinggi dan menjadi beban finansial



yang berat, sedangkan yang lain memandangnya sebagai investasi berharga untuk masa depan (Fauzi, 2020). Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya sekedar pengeluaran, melainkan investasi yang memiliki dampak jangka panjang. Biaya mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan. Tanpa ada biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan (Usman et al., 2016).

Biaya pendidikan adalah investasi (Irwan Suryadi, 2021). Dengan membayar biaya pendidikan, seseorang membuka pintu menuju pengetahuan yang mendalam, keterampilan yang diperlukan, dan pengalaman yang tak ternilai. Pendidikan merupakan investasi yang berkelanjutan, karena keahlian dan pengetahuan yang diperoleh akan tetap ada dan dapat digunakan sepanjang hidup.

Pendidikan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Indriyanti et al., 2013). Banyak perusahaan dan industri mengutamakan calon yang memiliki pendidikan formal yang tinggi. Dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang baik, seseorang dapat bersaing di pasar kerja.

Biaya pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan. Pendidikan memberikan kesempatan untuk mengasah *soft skills* seperti kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Kemampuan ini menjadi kunci sukses tidak hanya dalam karir, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari.

Pendidikan bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakat memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan menciptakan pondasi yang kuat untuk perkembangan dan perubahan positif.

Berbagai penelitian dilakukan dan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi berkorelasi positif dengan kesejahteraan individu dan keluarga (Julika & Setiyawati, 2019). Secara ekonomis, pendidikan membuka pintu menuju pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan peluang pengembangan karir yang lebih baik.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa biaya pendidikan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai beban finansial, tetapi sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan membuka peluang, memperluas pandangan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan memahami pentingnya biaya pendidikan sebagai investasi yang berkelanjutan, kita dapat mengubah paradigma dan memandangnya sebagai langkah yang strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, dukungan dan aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas harus diutamakan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berinvestasi dalam dirinya sendiri dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pendidikan merupakan sebuah investasi. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan (Nurhayati et al., 2022). Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan pembiayaan. Pada umumnya, biaya pendidikan merupakan suatu kompleksitas yang terdapat keterkaitan pada berbagai komponen diantaranya: sumber biaya, manajemen pengelolaan, hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan.



Terkadang kondisi di lapangan, penyelenggaraan pendidikan terdapat perbedaan kelas dalam pembiayaan pendidikan. Lembaga pendidikan seolah olah dibedakan berdasarkan biaya maupun kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas bukan berarti pendidikan yang mahal biayanya. Sehingga masyarakat merasa belum mampu mengenyam pendidikan berkualitas jika biaya berbanding dengan kualitas. Sesungguhnya pendidikan yang berkualitas tersebut berlaku bagi seluruh warga negara. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang diberikan secara merata.

Terdapat berbagai faktor penyebab mahalnya biaya pendidikan sehingga diperlukan adanya kebijakan yang tepat untuk mengatasi biaya pendidikan ini. Menurut konsep dasar pembiayaan pendidikan, terdapat dua komponen biaya pendidikan yaitu biaya keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*) (Saudin, 2019). Biaya keseluruhan merupakan biaya total yang dibelanjakan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun ajaran. Sedangkan Biaya satuan merupakan biaya yang berasal dari orangtua, masyarakat atau pemerintah, yang dibelanjakan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun ajaran.

Total cost adalah gabungan biaya tiap komponen input pendidikan pada tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah.

Biaya satuan setiap siswa merupakan ukuran besaran biaya yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Dengan melakukan analisa biaya satuan, memudahkan kita untuk mengetahui efisiensi sumber pembiayaan sekolah, sumber investasi pendidikan, pemerataan pengeluaran masyarakat, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

Manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya keuangan suatu pada lembaga. Efektivitas manajemen keuangan sangat berdampak pada ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Berdasarkan analisa manajemen keuangan, Manajemen Keuangan dalam pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan yang matang merupakan langkah awal dalam manajemen keuangan pendidikan. Lembaga pendidikan perlu merancang anggaran yang realistis, mempertimbangkan kebutuhan operasional, pembangunan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan pelatihan staf administrasi. Dengan perencanaan dan rincian alokasi anggaran, lembaga dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien.

2. Pelaksanaan Keuangan

Dalam pelaksanaan pendidikan, Lembaga pendidikan harus menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pembuatan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait, seperti pengajar, siswa, orang tua, hingga donatur/sponsor. Dengan memberikan akuntabilitas, lembaga pendidikan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan dukungan finansial.



3. Evaluasi Pendanaan

Mengandalkan satu sumber pendanaan saja dapat menjadi risiko besar bagi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi dan tambahan sumber pendanaan menjadi penting. Lembaga sebaiknya mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, donatur, maupun mitra industri. Misalnya produk makanan/minuman dan sejenisnya. Dengan cara ini, lembaga dapat mengurangi risiko keuangan dan memperoleh dukungan yang berkelanjutan. Walaupun cara tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu bagi pendidikan.

Manajemen keuangan dalam pendidikan tidak berhenti pada perencanaan dan alokasi dana. Proses pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus diperlukan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.

Manajemen keuangan dalam pendidikan yang baik harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya pada alokasi biaya operasional, namun juga harus memperhitungkan terhadap pengembangan kurikulum, sarana prasarana, teknologi pendidikan, hingga investasi SDM. Peningkatan mutu pendidikan berdampak positif jangka panjang dalam memberikan manfaat kepada civitas pendidikan dan meningkatkan daya saing lembaga.

Simpulan

Biaya pendidikan merupakan sebuah investasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan diinvestasikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang tak ternilai. Pendidikan merupakan investasi yang berkelanjutan, karena keahlian dan pengetahuan yang diperoleh akan tetap ada dan dapat digunakan sepanjang hidup. Diperlukan Perencanaan Keuangan yang matang sebagai langkah awal dalam manajemen keuangan pendidikan untuk kebutuhan operasional, pembangunan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan pelatihan staf administrasi. Dengan perencanaan dan rincian alokasi anggaran, lembaga dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien. Dalam pelaksanaan pendidikan, Lembaga pendidikan harus menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pembuatan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait, seperti pengajar, siswa, orang tua, hingga donatur/sponsor. Dengan memberikan akuntabilitas, lembaga pendidikan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan dukungan finansial. Langkah terakhir menurut penulis dalam Manajemen Keuangan dalam Pendidikan adalah Evaluasi Pendanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan hingga laporan berjalan sesuai kaidah manajemen pendidikan. Kemudian dilakukan langkah perbaikan dan evaluasi untuk tahun berikutnya.



BAB XIII

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Moh. Nasir

STAI Hasan Jufri Bawean
muhammadnashir07@gmail.com

Pendahuluan

Dalam konteks sistem pendidikan yang kompleks, peran manajemen, sarana, dan prasarana memiliki pengaruh yang tak terbantahkan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai fondasi utama dalam mencerdaskan bangsa memerlukan tidak hanya upaya penyelenggaraan proses pembelajaran, tetapi juga perlunya koordinasi yang erat antara berbagai elemen yang terlibat.

Efektivitas sebuah sistem pendidikan tidak hanya tergantung pada kemampuan para pengelola dalam mengatur administrasi atau menyusun kurikulum, tetapi juga bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sarana serta prasarana yang memadai. Fasilitas pendidikan, yang meliputi segala aspek dari gedung hingga perlengkapan, memiliki peran krusial dalam mendukung proses pembelajaran. Ruang kelas yang memadai, media pembelajaran yang modern, serta lingkungan fisik yang kondusif adalah beberapa contoh dari faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan.

Namun, tidak hanya fasilitas yang langsung terlibat dalam proses pembelajaran yang penting. Fasilitas atau prasarana yang secara tidak langsung mendukung, seperti halaman sekolah atau jalan menuju ke sekolah, juga turut memengaruhi lingkungan belajar secara keseluruhan. Pengelolaan yang baik atas berbagai aspek fasilitas pendidikan, yang terdiri dari tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah, menjadi kunci dalam memastikan kontribusi optimal terhadap proses pendidikan.

Dalam rangka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses belajar-mengajar, manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan haruslah sistematis dan terencana. Hal ini meliputi perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya, pemeliharaan rutin, serta peningkatan secara berkelanjutan terhadap fasilitas pendidikan.

Dengan demikian, kesuksesan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau kebijakan pembelajaran yang diadopsi, tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana fasilitas pendidikan tersebut dikelola. Kita akan menguraikan lebih lanjut tentang pentingnya manajemen sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan utama pendidikan serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi fasilitas pendidikan terhadap proses belajar-mengajar.

Kualitas suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarananya. Saat sarana dan prasarana tersedia dengan baik, hasil pendidikan cenderung lebih baik. Misalnya, keberadaan laboratorium komputer di lembaga pendidikan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan komputer. Sebaliknya, lembaga pendidikan tanpa fasilitas serupa memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi.

Sarana dan prasarana sangat penting untuk kelancaran pembelajaran. Dalam pendidikan, di mana fasilitas yang memadai dibutuhkan, penting untuk menggunakan sarana dan prasarana dengan intensitas dan kreativitas tinggi oleh pendidik dan siswa.

Pentingnya sarana dan prasarana diakui oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini mencakup kriteria minimal untuk ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan sumber belajar lainnya yang mendukung pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Meskipun sarana dan prasarana adalah indikator mutu sekolah, banyak fasilitas yang belum dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan sekolah. Manajemen yang baik akan memastikan fasilitas terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.

Manajemen yang efektif juga menjamin keberlanjutan dan kejelasan fungsi fasilitas di lembaga pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, kegunaan fasilitas dapat dijaga dengan baik, memberikan dampak positif bagi seluruh proses pendidikan di institusi tersebut.

Pembahasan

Definisi Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari pengelolaan lembaga pendidikan yang berperan penting dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, perlu diberikan definisi yang jelas tentang manajemen sarana dan prasarana.

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Koontz dan O'Donnell (1976), "Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi."

Dalam konteks pendidikan, manajemen bukan hanya terbatas pada kegiatan administratif tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai aspek, termasuk sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur pendidikan mendukung efektivitas pembelajaran.

Sedangkan sarana pendidikan melibatkan berbagai fasilitas fisik yang digunakan dalam proses pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Sementara itu, prasarana mencakup berbagai infrastruktur yang mendukung kegiatan pendidikan, seperti teknologi informasi, jaringan internet, dan fasilitas transportasi.

Menurut Depdiknas (2003), "Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang menunjang kelancaran dan kelangsungan kegiatan pendidikan." Dengan demikian, manajemen sarana dan



prasarana pendidikan mencakup upaya untuk mengelola dengan efisien dan efektif semua aspek fisik dan infrastruktur yang berkontribusi pada pembelajaran.

Dari beberapa pengertian di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu pendekatan atau proses pengelolaan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas fisik serta infrastruktur pendukung suatu organisasi atau lembaga. Dalam konteks pendidikan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan melibatkan perencanaan, organisasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap semua aspek fisik dan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Pentingnya Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Dalam literatur pendidikan, pentingnya manajemen sarana dan prasarana diakui sebagai faktor krusial yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Menurut UNESCO (2005), sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memfasilitasi kegiatan pembelajaran, dan berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan juga terkait erat dengan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Drucker (1999) menyatakan, "Keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan." Dengan kata lain, manajemen yang baik terhadap sarana dan prasarana dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan sumber daya, waktu, dan tenaga, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih produktif.

Peran Sarana dan Prasarana dalam Proses Pembelajaran

Sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Kualitas fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga tidak hanya memengaruhi kenyamanan siswa, tetapi juga dapat memberikan dampak signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan kognitif mereka. Pada dasarnya, kondisi sarana dan prasarana menciptakan konteks tempat belajar yang memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran.

Bransford et al. (2000) menekankan pentingnya fasilitas fisik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Mereka menyatakan, "Fasilitas fisik dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung perkembangan kognitif siswa." Pernyataan ini menyoroti kontribusi positif dari sarana dan prasarana terhadap pengalaman belajar siswa.

Ruang kelas yang nyaman menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran. Laboratorium yang lengkap memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen dan pengamatan secara langsung, meningkatkan pemahaman konsep-konsep tertentu. Selain itu, perpustakaan yang terorganisir dengan baik menjadi sumber informasi yang mudah diakses oleh siswa, mendukung pengembangan literasi, dan membentuk kebiasaan membaca yang

positif. Fasilitas olahraga yang baik juga memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan fisik siswa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi konsentrasi dan fokus dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks ini, penting bagi lembaga pendidikan untuk memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang memadai harus menjadi prioritas, seiring dengan pemahaman bahwa kondisi fisik yang baik dapat menciptakan atmosfer positif yang mendukung kesuksesan siswa.

Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang kompleks dan terstruktur untuk memastikan infrastruktur pendidikan berfungsi optimal dan mendukung kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, sub-bab akan menguraikan setiap tahapan dari proses tersebut.

1. Perencanaan

Proses perencanaan menjadi langkah awal yang krusial dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan.

a. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat memberikan lingkungan yang optimal bagi proses pembelajaran. Dalam perspektif ini, Sutjipto (2008) menekankan bahwa analisis kebutuhan melibatkan evaluasi yang mendalam terhadap fasilitas yang sudah ada, sekaligus memahami kebutuhan aktual pendidikan. Proses ini melibatkan pemetaan sarana dan prasarana yang telah tersedia, sekaligus mengidentifikasi kekurangan dan peluang pengembangan.

Pemetaan sarana dan prasarana yang sudah ada menjadi dasar utama dalam analisis kebutuhan ini. Dalam memahami keberhasilan suatu lembaga pendidikan, penting untuk menilai infrastruktur yang telah ada dan sejauh mana infrastruktur tersebut dapat mendukung proses pembelajaran. Pemetaan ini mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas olahraga dan seni. Dengan mengevaluasi infrastruktur yang ada, lembaga pendidikan dapat menentukan sejauh mana kebutuhan aktual dapat dipenuhi dan diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan.

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan aktual, tetapi juga untuk mengakomodasi pertumbuhan siswa. Pertumbuhan siswa menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan infrastruktur pendidikan. Dengan menguraikan kebutuhan ini, lembaga pendidikan dapat merencanakan ruang kelas tambahan, fasilitas pendukung, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur.

Pentingnya proses ini juga terkait dengan kecocokan infrastruktur dengan perkembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan terus berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur pendidikan perlu diperbarui dan disesuaikan untuk mendukung implementasi kurikulum yang sesuai dan efektif. Sejalan



dengan pandangan ini, Sutjipto (2008) menyatakan bahwa analisis kebutuhan sarana dan prasarana membantu lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dimiliki sesuai dengan perkembangan kurikulum yang sedang berlangsung.

Dalam melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, lembaga pendidikan dapat melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Partisipasi mereka memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang kebutuhan aktual dan harapan terhadap fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan komunitas sangat diperlukan dalam proses ini.

Secara keseluruhan, analisis kebutuhan sarana dan prasarana merupakan langkah strategis yang memberikan dasar kuat bagi perencanaan dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Dengan merinci kebutuhan, mengidentifikasi kekurangan, dan mengakomodasi pertumbuhan siswa, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa lingkungan pembelajaran yang optimal dapat diberikan kepada siswa. Kesesuaian infrastruktur dengan perkembangan kurikulum juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa lembaga pendidikan tetap relevan dan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas.

b. Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur

Setelah menyelesaikan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya yang krusial adalah menyusun rencana pengembangan infrastruktur. Dalam penyusunan rencana ini, aspek-aspek utama yang perlu dipertimbangkan meliputi prioritas proyek, estimasi biaya, dan jadwal pelaksanaan. Penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut tidak hanya bersifat operasional tetapi juga terintegrasi secara menyeluruh dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang lembaga pendidikan.

Menurut Depdiknas (2009), "Rencana pengembangan infrastruktur harus terintegrasi dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang lembaga pendidikan." Ungkapan ini menegaskan bahwa kesinambungan antara pengembangan fisik lembaga pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan menjadi esensial dalam perencanaan infrastruktur.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melibatkan eksekusi rencana pengembangan infrastruktur yang telah disusun.

a. Proses Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Pelaksanaan Proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan melibatkan serangkaian langkah penting untuk menciptakan dan menjaga lingkungan pembelajaran yang optimal. Tahapan ini mencakup perencanaan, eksekusi pembangunan, serta upaya pemeliharaan yang berkala.

Pertama-tama, dalam tahap perencanaan, lembaga pendidikan perlu merinci kebutuhan dan visi jangka panjang mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Depdiknas (2009), "Perencanaan yang matang merupakan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan yang

diinginkan." Analisis kebutuhan, identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan, serta penyusunan rencana strategis menjadi esensial dalam menetapkan langkah-langkah pembangunan yang sesuai.

Setelah perencanaan, proses pembangunan melibatkan eksekusi rencana yang telah dirumuskan. Manajemen konstruksi yang efektif, pemilihan kontraktor yang berkualitas, dan pemantauan progres secara berkala menjadi kunci keberhasilan tahap ini. Pada tahap ini, pembangunan harus mematuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku untuk memastikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan aman bagi pengguna (Soewardi, 2015).

Selanjutnya, pemeliharaan menjadi fokus setelah pembangunan selesai. Pemeliharaan tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan yang muncul, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang dapat dihindari. Dalam perspektif ini, Soewardi (2015) menekankan, "Pemeliharaan secara rutin diperlukan agar fasilitas tetap beroperasi optimal."

Pentingnya kolaborasi dan partisipasi antara berbagai pihak, termasuk manajemen lembaga pendidikan, kontraktor, dan pihak terkait lainnya, tidak bisa diabaikan. Komunikasi yang baik dan kerja sama tim menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan proyek dan tanggung jawab masing-masing.

b. Manajemen Keuangan untuk Sarana dan Prasarana

Manajemen keuangan untuk sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya finansial secara efisien dan efektif untuk memastikan tersedianya dana yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan keuangan lembaga pendidikan guna memastikan dana yang dikelola dapat digunakan secara optimal.

Pertama-tama, dalam tahap perencanaan, lembaga pendidikan perlu merinci kebutuhan keuangan yang terkait dengan sarana dan prasarana. Soewardi (2010) mengungkapkan, "Perencanaan keuangan yang matang menjadi landasan untuk pengelolaan dana yang efektif dan berkelanjutan." Analisis kebutuhan keuangan, estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan, serta penetapan prioritas penggunaan dana menjadi langkah kunci dalam perencanaan keuangan.

Selanjutnya, dalam tahap pengorganisasian, lembaga pendidikan perlu menyusun struktur keuangan yang jelas dan tanggap terhadap dinamika kebutuhan fasilitas pendidikan. Ini mencakup alokasi anggaran, identifikasi sumber pendanaan, dan pemberian wewenang kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan.

Pengendalian keuangan merupakan tahap penting dalam mencegah pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efisien. Pengendalian ini mencakup pembuatan anggaran yang terukur, pemantauan pengeluaran



secara berkala, dan implementasi mekanisme evaluasi untuk menilai efektivitas penggunaan dana.

Dalam konteks pemantauan, Soewardi (2010) menegaskan, "Pemantauan yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan." Proses ini melibatkan pemantauan pelaksanaan anggaran, evaluasi efektivitas penggunaan dana, dan penyesuaian rencana keuangan jika diperlukan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan juga menjadi bagian integral dari manajemen keuangan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholder membangun kepercayaan dan mendukung tanggung jawab manajemen keuangan.

Dalam proses ini, kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta juga dapat menjadi faktor penentu. Kerja sama ini dapat mencakup sumber pendanaan tambahan, pembiayaan proyek bersama, atau dukungan keuangan lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan untuk sarana dan prasarana berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan."

3. Pengawasan

Pengawasan adalah tahap evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

a. Evaluasi Kinerja Fasilitas Pendidikan

Pengawasan mencakup evaluasi kinerja fasilitas pendidikan, mengukur sejauh mana infrastruktur mendukung proses pembelajaran. Evaluasi ini bisa melibatkan indikator seperti kapasitas penuhnya fasilitas, keamanan, dan kenyamanan. Menurut UNESCO (2017), "Evaluasi kinerja fasilitas pendidikan harus berfokus pada dampaknya terhadap pembelajaran dan perkembangan siswa."

b. Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan

Hasil evaluasi membentuk dasar untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Perbaikan dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan, sementara peningkatan berkelanjutan mencakup upaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Dalam pandangan Ishak (2016), "Perbaikan dan peningkatan harus menjadi siklus berkelanjutan untuk memastikan sarana dan prasarana selalu relevan dengan kebutuhan pendidikan modern."

Dengan demikian, Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi perkembangan siswa.

Simpulan

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Fasilitas fisik seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang terorganisir, dan fasilitas



olahraga yang baik dapat menciptakan atmosfer positif yang mendukung proses pembelajaran. Faktor ini sejalan dengan pandangan Bransford et al. (2000) yang menyatakan bahwa fasilitas fisik dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung perkembangan kognitif siswa.

Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan melibatkan beberapa tahapan. Perencanaan menjadi langkah awal yang melibatkan analisis kebutuhan sarana dan prasarana serta penyusunan rencana pengembangan infrastruktur. Pelaksanaan mencakup proses pembangunan dan pemeliharaan, serta manajemen keuangan untuk sarana dan prasarana. Pengawasan menjadi tahap penting dalam memastikan kinerja fasilitas pendidikan dievaluasi secara berkala, dan perbaikan serta peningkatan berkelanjutan dapat dilakukan.

Pentingnya pengelolaan yang baik terlihat dalam upaya pemeliharaan fasilitas, di mana pemeliharaan berkala dan berdasarkan jenis barang menjadi strategi untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Penghapusan juga menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga efisiensi pengelolaan inventaris.



BAB XIV

MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

Noper Ardi

Politeknik Negeri Batam
noperardi@polibatam.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan, sebagai fondasi pembangunan masyarakat, menghadapi kompleksitas dinamika antarindividu dan kelompok. Dalam perjalanan pendidikan, konflik tak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting untuk merinci dan menerapkan strategi manajemen konflik yang efektif. Bab ini akan mengeksplorasi beragam dimensi dan taktik manajemen konflik dalam konteks pendidikan modern.

Kompleksitas dinamika hubungan antarindividu dan kelompok di dalam institusi pendidikan menciptakan potensi konflik yang perlu dikelola dengan bijaksana. Pentingnya manajemen konflik terletak pada kemampuannya untuk mencegah, menangani, dan mengatasi ketegangan serta pertentangan yang mungkin timbul di antara siswa, guru, orang tua, dan staf administrasi.

Manajemen konflik di pendidikan melibatkan pemahaman mendalam terhadap perbedaan persepsi, interpretasi, dan harapan di antara pemangku kepentingan. Selain itu, manajemen konflik juga menuntut keadilan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan, serta kesadaran terhadap dinamika kekuasaan dan hubungan antar kelompok di dalam lingkungan belajar. Ini melibatkan upaya untuk membuka saluran komunikasi yang efektif, memfasilitasi dialog terbuka, dan menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung keberagaman.

Dalam mengelola konflik, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pembentukan keterampilan sosial yang memungkinkan individu berinteraksi secara sehat dalam masyarakat yang heterogen. Manajemen konflik menjadi alat penting dalam membentuk keterampilan resolusi konflik, negosiasi, dan kerjasama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam lingkungan pendidikan.

Dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang efektif, pendidikan dapat menciptakan iklim belajar yang positif, mengurangi potensi gangguan akibat konflik, dan memfasilitasi pertumbuhan positif siswa. Oleh karena itu, manajemen konflik bukan hanya sebuah respons terhadap ketegangan, tetapi juga menjadi strategi proaktif untuk membentuk hubungan yang sehat dan harmonis di dalam lembaga pendidikan.

Pembahasan

Pendidikan Sebagai Pilar Utama Pembentukan Masyarakat

Pendidikan, sebagai pilar utama pembentukan masyarakat, membawa tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai, dan membimbing individu menuju kesiapan untuk berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, melainkan juga tentang membentuk individu yang memiliki



pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan peran mereka dalam dinamika masyarakat.

Pentingnya pendidikan dalam pembentukan masyarakat tercermin dalam upayanya untuk membawa dampak positif pada perilaku dan karakter individu. Pendidikan membentuk landasan moral dan etika, membantu siswa memahami perbedaan antara benar dan salah, dan mengajarkan mereka tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Melalui kurikulum yang dirancang dengan cermat, siswa diberikan kesempatan untuk menjelajahi nilai-nilai kritis seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan (Anwar, 2018).

Guru, sebagai agen utama dalam pendidikan, memegang peran kunci sebagai model peran yang memengaruhi karakter dan sikap siswa. Interaksi sehari-hari di kelas menciptakan kesempatan bagi guru untuk membimbing siswa dalam memahami pentingnya integritas, kerja sama, dan sikap positif terhadap belajar. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pembentukan nilai-nilai yang mendasar untuk kehidupan sosial yang harmonis.

Selain itu, pendidikan memberikan wadah untuk membangun keterampilan sosial yang penting dalam interaksi sosial. Melalui proyek kelompok, diskusi kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa belajar untuk berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan menghormati pandangan orang lain. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk pembentukan masyarakat yang inklusif dan berdaya (Syarifudin, 2019).

Pendidikan juga membawa peran penting dalam membentuk identitas sosial siswa. Dengan menghadirkan beragam perspektif budaya, sejarah, dan keberagaman, pendidikan memberikan siswa kesempatan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang penting dalam membentuk kepribadian mereka. Melalui pemahaman yang mendalam tentang keragaman, pendidikan menciptakan individu yang tidak hanya terampil secara akademis tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri dan masyarakat.

Dengan menyatukan semua dimensi ini, pendidikan tidak hanya menjadikan siswa sebagai individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk warga yang berdaya, memiliki karakter kuat, dan mampu berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beradab. Dengan menanamkan nilai-nilai kritis, membimbing perkembangan karakter, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif, pendidikan menjadi kekuatan utama dalam membentuk arah dan karakter pembangunan sosial. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai pilar yang tidak hanya mendukung pertumbuhan individu, tetapi juga menjadi katalisator perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan (Widiyowati et al., 2018).

Kompleksitas Dinamika Hubungan Antarindividu dan Kelompok

Dinamika hubungan antarindividu dan kelompok dalam konteks pendidikan mencakup rangkaian interaksi kompleks yang terjadi di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti siswa, guru, orang tua, dan staf administrasi. Masing-masing kelompok ini membawa dinamika dan dinamika hubungan sendiri-sendiri, menciptakan landasan interaksi yang beragam dan sering kali kompleks.



Pertama-tama, perbedaan pandangan dan interpretasi antarindividu dapat menciptakan ketegangan. Siswa mungkin memiliki harapan dan tujuan pribadi mereka terhadap pendidikan, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan guru atau orang tua. Perbedaan nilai, budaya, dan pengalaman hidup juga dapat menciptakan pemahaman yang berbeda tentang peran pendidikan dalam pembentukan masyarakat. (Wartini, 2016)

Ketidaksetaraan dalam partisipasi dan keputusan juga dapat menimbulkan kompleksitas dalam dinamika hubungan. Siswa yang merasa tidak didengar atau tidak terlibat dalam proses pembelajaran dapat merasakan ketidakadilan, menciptakan potensi konflik di dalam kelas. Manajemen ini tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga staf administrasi dan guru untuk menciptakan lingkungan partisipatif dan demokratis.

Dinamika kelompok, seperti hierarki sosial dan dinamika kekuasaan di antara siswa, dapat menciptakan tantangan tersendiri. Pergaulan dan interaksi sosial di antara kelompok dapat memengaruhi lingkungan belajar dan dapat menghasilkan situasi di mana beberapa siswa merasa diabaikan atau bahkan diintimidasi.

Dalam mengatasi kompleksitas ini, manajemen konflik menjadi kunci. Membuka saluran komunikasi yang efektif antarindividu dan kelompok, memfasilitasi dialog terbuka untuk memahami perspektif masing-masing, dan menciptakan lingkungan yang mempromosikan inklusivitas dan keberagaman adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk membimbing dinamika hubungan yang sehat dan harmonis (Nasrudin et al., 2021).

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas ini, pendidikan dapat mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang heterogen, mengembangkan keterampilan interpersonal yang mendalam, dan menjadi kontributor yang positif dalam membentuk hubungan antarindividu dan kelompok yang positif.

Tantangan Dalam Hubungan Antarindividu dan Kelompok di Pendidikan

Tantangan dalam hubungan antarindividu dan kelompok di pendidikan melibatkan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi dinamika lingkungan pembelajaran. Perbedaan latar belakang, nilai-nilai, dan harapan antarindividu menciptakan tantangan yang memerlukan manajemen konflik yang bijaksana dan solusi yang inklusif.

1. Perbedaan Persepsi dan Interpretasi

Tantangan pertama adalah perbedaan dalam persepsi dan interpretasi. Siswa, guru, dan orang tua mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan pendidikan, makna sukses, atau bahkan definisi dari pengalaman pembelajaran yang baik. Ini menciptakan potensi untuk ketegangan dan konflik yang memerlukan pemahaman mendalam dan dialog terbuka. Penting untuk mengakui bahwa perbedaan ini adalah refleksi dari keanekaragaman individu dan pengalaman hidup. Manajemen konflik dalam konteks ini melibatkan upaya untuk membuka saluran komunikasi yang memfasilitasi diskusi produktif dan memahami perspektif masing-masing pihak. Pendidikan harus menjadi wahana yang memupuk apresiasi terhadap perbedaan dan mengintegrasikan keragaman ini ke dalam pengalaman belajar.

2. Ketidaksetaraan dalam Partisipasi dan Keputusan

Tantangan selanjutnya adalah ketidaksetaraan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan. Siswa yang merasa bahwa mereka tidak memiliki suara atau pengaruh dalam proses pembelajaran dapat merasakan ketidakadilan, menciptakan potensi untuk konflik yang dapat mempengaruhi iklim kelas secara keseluruhan. Manajemen konflik di sini melibatkan pendekatan yang proaktif untuk memberdayakan siswa. Ini dapat mencakup pendekatan demokratis dalam pengambilan keputusan kelas, membentuk dewan siswa, atau menciptakan forum di mana siswa dapat menyuarakan pendapat mereka. Guru dan staf administrasi juga perlu berperan dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan siswa untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata (Panggabean, 2017).

3. Dinamika Kelompok dan Kekuasaan

Dinamika kelompok dan distribusi kekuasaan di dalam kelas atau institusi pendidikan dapat menjadi sumber ketegangan. Pergaulan, hierarki sosial, dan interaksi kekuasaan dapat memengaruhi kualitas pengalaman belajar siswa. Tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan dan cara-cara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Manajemen konflik dalam dinamika kelompok melibatkan upaya untuk mendorong kolaborasi dan meredakan ketegangan yang mungkin muncul. Ini dapat mencakup kegiatan yang mempromosikan kerjasama, pemberdayaan siswa untuk menjadi pemimpin kelompok, dan menciptakan aturan dan norma kelas yang mendukung keadilan dan inklusivitas. Dalam menghadapi tantangan ini, manajemen konflik di pendidikan bukan hanya sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua pihak terlibat. Melalui upaya ini, pendidikan dapat menjadi kekuatan yang mendorong harmoni, pemahaman, dan pertumbuhan positif dalam hubungan antarindividu dan kelompok.

Kontribusi Pendidikan terhadap Pembentukan Masyarakat

Kontribusi pendidikan terhadap pembentukan masyarakat mencakup serangkaian aspek yang melampaui sekadar transfer pengetahuan. Pendidikan memiliki potensi untuk membentuk individu secara holistik, membimbing mereka menjadi warga yang berdaya, sadar nilai, dan mampu berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beradab. Mari kita telaah lebih lanjut aspek-aspek tersebut. Pembentukan Karakter dan Nilai-nilai:

Pendidikan, sebagai pilar utama pembentukan masyarakat, memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai dalam setiap individu. Lebih dari sekadar mentransfer pengetahuan, pendidikan bertujuan menciptakan warga yang cerdas secara intelektual, moral, dan emosional.

Pendidikan bertujuan membentuk karakter yang kuat melalui integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam kurikulum. Materi pelajaran tidak hanya difokuskan pada aspek akademis, tetapi juga menyelami prinsip-prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan perilaku yang baik. Siswa diberikan kesempatan untuk memahami dan meresapi nilai-nilai tersebut melalui diskusi, kegiatan kelas, dan proyek-proyek pengembangan karakter.



Guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter siswa. Melalui perilaku dan tindakan sehari-hari, guru berfungsi sebagai model peran yang memengaruhi cara siswa memahami dan meresapi nilai-nilai. Oleh karena itu, pendidikan juga memasukkan pelatihan untuk guru dalam mengembangkan sikap yang positif, etika profesional, dan kepedulian terhadap perkembangan karakter siswa (Mz, 2018).

Selain kurikulum inti, pendidikan menghadirkan pengalaman ekstrakurikuler dan kegiatan sosial yang mendukung pembentukan karakter. Partisipasi dalam kegiatan ini memberikan siswa peluang untuk mengembangkan kepemimpinan, kerja tim, dan tanggung jawab diri, yang semuanya merupakan aspek kunci dari karakter yang terbentuk dengan baik.

Pendidikan juga berperan dalam memperkenalkan siswa pada prinsip-prinsip etika dan moral yang bersifat universal. Melalui pembelajaran tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan rasa empati, siswa diajak untuk merenung tentang makna hidup, bertanggung jawab, dan memahami dampak perbuatan mereka terhadap masyarakat.

Aspek pembentukan karakter melibatkan pengembangan keterampilan empati dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Pendidikan menciptakan situasi di mana siswa dapat memahami sudut pandang orang lain, meresapi pengalaman mereka, dan belajar untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pelatihan dalam keterampilan interpersonal dan pengembangan hubungan yang sehat.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial siswa. Melalui eksplorasi budaya, sejarah, dan keberagaman, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang penting dalam membentuk kepribadian mereka. Pendidikan menciptakan kesempatan untuk memahami dan menghormati keragaman, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya terampil secara akademis tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri dan masyarakat (Margaretha, 2019).

Penting untuk diingat bahwa evaluasi karakter dan nilai-nilai tidak dapat hanya diukur melalui pencapaian akademis. Oleh karena itu, pendidikan juga mengadopsi metode evaluasi holistik yang mencakup sikap, nilai, dan perilaku siswa. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan karakter siswa selama proses pembelajaran.

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, pendidikan tidak hanya menciptakan individu yang cerdas secara akademis tetapi juga membentuk warga yang memiliki karakter kuat, moral yang baik, dan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan mendorong pertumbuhan positif dan perkembangan karakter yang kokoh pada setiap siswa, membawa dampak positif pada pembentukan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi dalam masyarakat. Kolaborasi dalam proyek-proyek kelompok, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelajaran melalui pengalaman langsung di lapangan memungkinkan siswa untuk mengasah keterampilan interpersonal mereka. Ini tidak hanya mencakup kemampuan berkomunikasi, tetapi juga keterampilan resolusi konflik, kepemimpinan, dan kerjasama.

Selain itu, pendidikan dapat mengaktifkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat. Melalui proyek-proyek pelayanan masyarakat, magang, atau program keterlibatan komunitas lainnya, siswa dapat mengalami dampak langsung dari kontribusi mereka pada masyarakat. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab dan keterlibatan yang lebih dalam dalam pembentukan masyarakat.

Masyarakat modern ditandai oleh keragaman yang semakin meningkat, baik dalam hal budaya, agama, maupun latar belakang sosioekonomi. Pendidikan memainkan peran vital dalam membentuk pemahaman terhadap keragaman ini dan mempromosikan sikap toleransi (Budi, 2019).

Melalui kurikulum yang mencakup studi budaya, sejarah dunia, dan literatur global, siswa diberi kesempatan untuk memahami dan menghargai keberagaman masyarakat. Program-program ini juga dapat mengajarkan nilai-nilai inklusivitas, mengurangi prasangka, dan mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan.

Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Melalui pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, dan eksplorasi ide-ide baru, siswa dilatih untuk berpikir kritis terhadap tantangan masyarakat dan menghasilkan solusi yang inovatif.

Dengan mengembangkan keterampilan ini, pendidikan memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan yang konstruktif dalam masyarakat. Mereka dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebab, dan merancang solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi banyak orang.

Pendidikan yang efektif juga memastikan keselarasan antara nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses pendidikan dengan nilai-nilai masyarakat tempat lembaga pendidikan berada. Ini menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pembentukan karakter individual dan kontribusi positif pada dinamika sosial masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi pendidikan terhadap pembentukan masyarakat bukan hanya dalam hal menciptakan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk warga yang berdaya, memiliki nilai-nilai moral, dan mampu berkontribusi pada masyarakat secara berarti. Dengan menciptakan ikatan yang erat antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, pendidikan berfungsi sebagai kekuatan utama dalam membentuk arah dan karakter pembangunan sosial.

Simpulan

Secara keseluruhan, manajemen konflik dalam konteks pendidikan membuktikan kepentingannya sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dengan memahami dan mengelola kompleksitas dinamika hubungan antarindividu dan kelompok, pendidikan dapat meminimalkan potensi konflik, mempromosikan komunikasi yang efektif, dan membentuk keterampilan sosial yang kritis bagi siswa. Manajemen konflik bukan hanya tentang menangani pertentangan, tetapi juga menjadi strategi proaktif untuk membentuk hubungan yang sehat, menciptakan iklim belajar yang produktif, dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan dan perkembangan siswa di dalam lingkungan pendidikan.



BAB XV **MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN**

Sudadi

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
sudadi@uinsi.ac.id

Pendahuluan

Latar belakang manajemen mutu pendidikan berhubungan dengan perubahan dan masalah pendidikan yang terus berkembang. Pendidikan memainkan peran strategis dalam pembangunan masyarakat dan negara, dan keberhasilan pendidikan bergantung pada keberhasilan mencapai tujuan tersebut. Kebutuhan akan tenaga kerja yang kreatif dan berbakat meningkat di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Akibatnya, sistem pendidikan harus diusahakan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Manajemen kualitas pendidikan muncul sebagai pendekatan strategis untuk memecahkan masalah ini. Penekanan pada pengukuran, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan di setiap aspek pendidikan sangat penting untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, standar pendidikan diubah oleh globalisasi, yang memaksa institusi pendidikan bersaing secara global untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi.

Untuk memastikan kualitas pendidikan, sistem manajemen sangat penting. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah tugas besar yang mencakup banyak aspek yang sangat kompleks, menurut Fattah, termasuk perencanaan, efisiensi, dan efektivitas sistem pendidikan, serta pendanaan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, manajemen pendidikan juga diperlukan. Namun, fungsi sistem pendidikan menjadi lebih buruk karena komponen manajemen di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya dioptimalkan. Kegagalan manajemen pendidikan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pendidikan internal, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat putus sekolah (Albab, 2023).

Pembahasan

Pengertian Manajemen Mutu Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas adalah kesesuaian antara layanan dan hasil yang diperoleh. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada dasarnya, mutu pendidikan merupakan pencapaian lembaga pendidikan dalam memberikan layanan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara sederhana, mutu pendidikan mengacu pada proses dan hasil akhir (Zulkarmain, 2021).

Manajemen mutu pendidikan dalam konteks ini didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus utamanya terletak pada pengelolaan sumber daya manusia dan modal yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Chaniago, 2010).



Profesor W. Edwards Deming memperkenalkan konsep Total Manajemen Mutu dalam Pendidikan pada 1950-an. Konsep ini dapat diterapkan ke hampir setiap organisasi dan menitikberatkan pada peningkatan berkelanjutan melalui evaluasi terus-menerus dan penyesuaian kebijakan dan praktik pendidikan (Hadi, 2018).

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu pendidikan merupakan suatu pendekatan sistematis yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Fokus utamanya mencakup manajemen sumber daya manusia, evaluasi berkelanjutan, dan penerapan praktik yang terukur untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai agenda utama, manajemen mutu pendidikan menjadi landasan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

Prinsip-prinsip Manajemen Mutu Pendidikan

Prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan mencakup sejumlah aspek kunci yang memberikan arahan dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Pertama, adanya fokus pada penerima layanan, yakni siswa, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholder utama. Hal ini mengacu pada prinsip customer-centric, di mana kebutuhan dan harapan penerima layanan diutamakan untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan dan bermakna. Prinsip kedua melibatkan kepemimpinan yang berorientasi pada visi dan inovasi. Pemimpin pendidikan perlu memiliki visi yang jelas tentang tujuan pendidikan, sekaligus mampu menghadapi dinamika perubahan dengan inovasi dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya. Prinsip ketiga adalah pendekatan berbasis proses, di mana setiap tahap pembelajaran diidentifikasi, diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal (Smith, A., Johnson, B., & Brown, 2019).

Prinsip-prinsip mutu pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan standar dan efektivitas lembaga pendidikan. Salah satu prinsip yang mencuat dalam penelitian adalah fokus pada pelanggan. Menurut penelitian oleh Emiyati, prinsip ini menekankan pentingnya berorientasi pada kebutuhan dan harapan peserta didik. Implementasi prinsip ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan memastikan keberlanjutan pembaruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Emiyati, 2023).

Selain itu, prinsip perbaikan yang berkelanjutan juga menonjol dalam konteks manajemen mutu pendidikan. Crosby dalam penelitiannya menekankan bahwa lembaga pendidikan perlu mengadopsi siklus perbaikan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pendidikan. Konsep ini mencakup evaluasi berkala, identifikasi masalah, dan penerapan solusi secara terus-menerus. Dengan mengadopsi prinsip perbaikan yang berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat menjaga relevansi dan kualitas layanan pendidikan yang mereka berikan (Firdausi et al., 2023).

Dapat disimpulkan, Prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan adalah aspek kunci yang memberikan arahan dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Prinsip pertama adalah fokus pada penerima layanan, yakni siswa, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholder utama. Prinsip kedua melibatkan kepemimpinan yang berorientasi pada visi dan inovasi. Prinsip ketiga adalah pendekatan berbasis proses, yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan



standar dan efektivitas lembaga pendidikan. Prinsip perbaikan yang berkelanjutan juga menonjol dalam konteks manajemen mutu pendidikan, yaitu evaluasi berkala, identifikasi masalah, dan penerapan solusi secara terus-menerus.

Tujuan Manajemen Mutu Pendidikan

Tujuan utama dari penerapan manajemen mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik. Salah satu tujuan krusialnya adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Dengan merinci setiap tahap pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kebutuhan individu, manajemen mutu pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademis, keterampilan, dan karakter peserta didik. Selain itu, tujuan manajemen mutu pendidikan juga mencakup efisiensi pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan institusi pendidikan. Dengan merancang dan melaksanakan proses manajemen yang efektif, tujuan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan institusi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk mendukung kegiatan pendidikan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan penyelenggaraan pendidikan yang optimal, manajemen mutu pendidikan adalah tujuan utama. Sejumlah jurnal memberikan pandangan penting tentang tujuan ini, yang melibatkan penerapan penjaminan dan peningkatan kualitas pendidikan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti sosialisasi yang belum optimal (Maulana et al., 2020).

Pengendalian kualitas pendidikan menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup hal-hal seperti kurikulum, pembinaan siswa, dan manajemen secara keseluruhan (Herawan, 2017). Selain itu, diakui bahwa pengembangan manajemen mutu merupakan bagian penting dari membentuk masa depan generasi muda. (Oktaviani, 2023).

Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, ada kesulitan dan paradoks, seperti standarisasi pendidikan di Indonesia, yang membutuhkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah adalah bagian penting dari manajemen layanan pendidikan.

Konsep Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Manajemen mutu pendidikan adalah pendekatan terstruktur untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Konsep ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi berbagai aspek pendidikan untuk mencapai standar kualitas yang diinginkan. Konsep ini menyoroti beberapa aspek krusial, yakni: 1) perencanaan strategis, 2) pengorganisasian efektif, 3) implementasi praktis, dan 4) evaluasi berkelanjutan.

Konsep manajemen mutu pendidikan perencanaan strategis menekankan perumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas sebagai dasar perencanaan. Ini mendukung kebijakan pendidikan yang terukur dan terarah. Konsep pengorganisasian efektif menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya, termasuk tenaga pengajar, fasilitas, dan kurikulum, untuk mencapai efektivitas pembelajaran dan pengembangan siswa (Maulana et al., 2020).

Konsep implementasi praktis adalah penerapan konsep manajemen mutu memerlukan integrasi kebijakan dan praktik pendidikan yang berkelanjutan, memastikan adopsi yang konsisten di seluruh lembaga (Ajidin, 2022).

Dan konsep evaluasi berkelanjutan adalah Sistem evaluasi yang berkesinambungan mendukung peningkatan berkelanjutan. Proses ini mencakup analisis kritis terhadap data hasil belajar dan efektivitas metode pengajaran. Dengan menganalisis konsep manajemen mutu pendidikan dari berbagai perspektif, lembaga pendidikan dapat membangun sistem yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan.

Proses Manajemen Mutu Pendidikan

Proses manajemen mutu pendidikan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan melibatkan pengembangan kurikulum, pengadaan sumber daya, dan perencanaan strategis. Pelaksanaan mencakup implementasi rencana pembelajaran, pelatihan guru, dan pengelolaan kelas. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas program dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan.

Perencanaan mutu pendidikan merupakan langkah awal dalam proses manajemen mutu. Melalui perencanaan yang matang, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan standar mutu yang harus dicapai. Menurut jurnal "*Quality Management in Education*" (Smith et al., 2019), perencanaan mutu yang efektif melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi.

Langkah selanjutnya adalah implementasi program mutu pendidikan. Guru, sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, memiliki peran krusial dalam menjalankan program mutu tersebut. Menurut penelitian oleh Johnson dan Brown (2020) dalam jurnal "*Educational Quality and Effectiveness*," pelibatan guru dalam pengembangan kurikulum dan penggunaan metode pengajaran yang inovatif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Evaluasi kinerja adalah tahap yang penting dalam memastikan pencapaian tujuan mutu. Menurut penelitian oleh Garcia et al. (2021) dalam "*Assessing Educational Quality*," evaluasi tidak hanya seharusnya mencakup hasil akademik, tetapi juga aspek pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Pengukuran kinerja ini memberikan gambaran holistik terkait mutu pendidikan.

Proses manajemen mutu pendidikan tidak berhenti pada evaluasi; perbaikan berkelanjutan harus dilakukan. Mengacu pada jurnal "*Continuous Improvement in Education*" (Chen et al., 2018), langkah-langkah perbaikan dapat melibatkan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan perencanaan mutu yang matang, pelaksanaan program yang efektif, evaluasi kinerja yang holistik, dan perbaikan berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat mencapai standar mutu yang tinggi. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi, menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan dalam proses manajemen mutu pendidikan.

Dengan demikian, manajemen mutu pendidikan bukan hanya suatu keharusan, tetapi juga investasi dalam masa depan bangsa melalui pembentukan



generasi yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi ini.

Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Peran kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan visi yang jelas, kemampuan untuk memotivasi, dan kemampuan untuk mengelola perubahan. Kepemimpinan yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan profesional guru serta melibatkan semua stakeholders dalam proses pengambilan keputusan dapat membawa dampak positif terhadap mutu pendidikan.

kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengarahkan, mengelola, dan meningkatkan mutu pendidikan. Melalui kepemimpinan yang efektif, seorang kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan memberdayakan semua pemangku kepentingan. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi peran kepemimpinan kepala sekolah dengan dukungan dari literatur terkait.

Menurut Robinson et al. (2009) dalam jurnal "School Leadership and Management," kepala sekolah berperan penting dalam merumuskan visi dan misi sekolah. Sebuah visi yang jelas dan inspiratif dapat memberikan arah yang kuat bagi seluruh komunitas sekolah, menciptakan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan kepala sekolah tidak hanya berkaitan dengan aspek visi, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya secara efektif. Leithwood et al. (2012) dalam "*Educational Administration Quarterly*" menekankan pentingnya kepala sekolah dalam memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk mendukung pembelajaran, termasuk pengembangan profesional guru dan pembaruan sarana fisik.

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam pengembangan profesionalisme guru. Conley et al. (2017) dalam jurnal "*Leadership and Policy in Schools*" menyatakan bahwa kepala sekolah yang efektif dapat menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan, mendorong guru untuk terlibat dalam pelatihan, dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Kepemimpinan kepala sekolah juga mencakup kemampuan untuk membangun hubungan kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi. Menurut Hallinger (2018) dalam "*Journal of Educational Administration*," kepala sekolah yang mampu memfasilitasi komunikasi terbuka dan membangun kepercayaan dapat menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan mendukung.

Kepemimpinan kepala sekolah memegang peran kunci dalam membentuk masa depan pendidikan yang unggul. Dengan visi yang jelas, manajemen sumber daya yang efektif, pengembangan profesionalisme guru, dan pembangunan hubungan kolaboratif, seorang kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan dan memotivasi seluruh komunitas sekolah.

Dalam rangkuman, kepala sekolah adalah agen perubahan yang dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang mengelola, tetapi juga tentang menginspirasi dan menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan.



Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dari beberapa aspek. Penulis merangkum dari berbagai sumber, terdapat 9 cara, yakni:

1. Pengembangan kurikulum yang relevan dapat dilakukan melalui mengkaji dan memperbarui kurikulum secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan pasar kerja, memastikan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan implementasikan kurikulum yang mencakup kebutuhan dunia nyata, menekankan pada keterampilan abad ke-21, dan memperhatikan perubahan dalam paradigma pendidikan;
2. Pelatihan dan pengembangan guru dengan cara Menyelenggarakan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan penguasaan materi guru dan Mendorong partisipasi guru dalam program pengembangan profesional, dan fokus pada pelatihan guru yang berkelanjutan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan pengajaran dan keberlanjutan karir guru;
3. Pemanfaatan teknologi pendidikan: mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan Menyediakan pelatihan untuk guru dalam penggunaan teknologi pendidikan yang efektif;
4. Kelas berbasis proyek melalui mengadopsi metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan praktis dan kreativitas siswa dan Memberikan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata;
5. Evaluasi pembelajaran berbasis proyek melalui menerapkan metode evaluasi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dan Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk mendukung pengembangan mereka.;
6. Program bimbingan dan pembinaan melalui menyediakan layanan pembinaan dan bimbingan untuk mendukung perkembangan siswa secara holistic dan Mendorong kolaborasi antara guru, konselor, dan orang tua dalam memberikan dukungan;
7. Pengelolaan sumber daya yang efisien seperti mengelola sumber daya finansial dan fisik secara efisien untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin menghambat optimalisasi sumber daya;
8. Partisipasi orang tua dan komunitas seperti membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan komunitas dan Melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah dan dalam pengambilan keputusan sekolah;
9. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan seperti melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses pembelajaran dan kinerja siswa dan Menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan terus-menerus.

Simpulan

Manajemen mutu pendidikan memainkan peran sentral dalam memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Kesuksesan suatu lembaga pendidikan tidak hanya tergantung pada kurikulum dan fasilitas fisik, tetapi juga pada bagaimana manajemen mutu pendidikan diimplementasikan. Sementara itu, peran kepala sekolah menjadi kunci dalam memimpin dan mengelola berbagai aspek



untuk meningkatkan mutu sekolah.

Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep manajemen mutu pendidikan secara efektif, lembaga-lembaga pendidikan dapat memainkan peran krusial dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya hak, tetapi juga fondasi untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Saran untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan dan pengembangan guru, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran, kelas berbasis proyek, evaluasi pembelajaran berbasis proyek, program bimbingan dan pembinaan, pengelolaan sumber daya yang efisien, partisipasi orang tua dan komunitas dan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

BAB XVI **MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA DIGITALISASI**

Akhmad Ramli

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
akhmadramli@uinsi.ac.id

Pendahuluan

Manajemen pendidikan di era digitalisasi merupakan topik yang sangat relevan di masa kini. Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengelola dan menyampaikan pendidikan. Di era yang serba terkoneksi ini, pendidikan tidak lagi terbatas pada kelas fisik; teknologi digital telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan pendekatan pendidikan yang lebih personalisasi. Manajemen pendidikan di era ini memerlukan adaptasi terhadap teknologi baru dan metode pengajaran yang inovatif (Ambarwati et al., 2022). Penggunaan data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, integrasi alat-alat digital dalam kurikulum, dan kebutuhan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global adalah beberapa aspek kunci. Selain itu, manajemen pendidikan di era digital juga berfokus pada peningkatan akses dan inklusivitas, memastikan bahwa semua pelajar, tidak peduli latar belakangnya, dapat mengakses pendidikan berkualitas. Pentingnya memahami tren terkini dalam teknologi pendidikan dan menerapkannya dalam praktik manajemen pendidikan tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini akan membentuk masa depan dunia pendidikan (Supriani et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, yang dikenal sebagai e-learning atau pembelajaran elektronik, telah mengubah cara kita mengakses, menyajikan, dan mengelola informasi. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan di era digitalisasi memerlukan perhatian khusus dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan dan strategi agar pendidikan dapat memanfaatkan potensi penuh teknologi digital.

Pembahasan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Belajar Mengajar

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar merujuk pada integrasi berbagai alat dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Hal ini meliputi penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran online, multimedia interaktif, dan alat komunikasi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis, fleksibel, dan dapat diakses oleh siapa saja dari mana saja. Teknologi informasi memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih menarik dan interaktif, sementara siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan mereka dan mengakses sumber belajar tambahan secara online. Pemanfaatan teknologi ini juga membantu dalam pelacakan kemajuan belajar siswa dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru melalui forum online, video konferensi, dan alat kolaboratif lainnya. Secara keseluruhan, teknologi informasi telah menjadi komponen kunci dalam pendidikan modern, memberikan kesempatan belajar



yang lebih luas dan mendukung pengembangan keterampilan penting untuk abad ke-21 (Redhana, 2019).

Berikut beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar:

1. E-Learning Platform

Penggunaan platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom, atau Edmodo, di mana pengajar dapat mengunggah materi pelajaran, tugas, dan sumber daya pembelajaran. Siswa dapat mengaksesnya secara fleksibel dari mana saja.

2. Multimedia Interkatif

Penggunaan presentasi multimedia, video pembelajaran, atau animasi untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu. Teknologi ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memudahkan pemahaman siswa.

3. Simulasi dan Virtual Lab

Pemanfaatan simulasi atau laboratorium virtual dalam mata pelajaran sains atau teknologi, di mana siswa dapat melakukan eksperimen atau observasi tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu.

4. Mobile Learning (M-Learning)

Aplikasi pembelajaran yang dapat diunduh di smartphone atau tablet. Siswa dapat mengakses materi, melakukan latihan, dan berinteraksi dengan pengajar atau sesama siswa kapan saja dan di mana saja.

5. Sistem Model Pembelajaran

Penggunaan LMS untuk melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan menyediakan informasi terkait kursus. LMS juga dapat digunakan untuk mengelola administrasi pembelajaran.

6. Papan Tulis Digital

Penggunaan papan tulis digital atau tablet interaktif untuk mengajar di kelas. Guru dapat menulis, menggambar, atau menampilkan materi dengan lebih dinamis, dan siswa dapat terlibat secara langsung.

Pengembangan Kurikulum yang memperhatikan Literasi Digital

Pengembangan kurikulum yang memperhatikan literasi digital mengacu pada proses penyusunan dan penyesuaian kurikulum pendidikan agar memasukkan unsur literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif (Saputra & Nurdiansyah, 2020). Hal ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang semakin digital. Ini termasuk kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dari berbagai sumber digital, serta keahlian dalam menggunakan alat digital untuk komunikasi dan kolaborasi (Karitas & Suwartono, 2023).

Contoh dari pengembangan kurikulum yang memperhatikan literasi digital dapat dilihat dalam pengintegrasian mata pelajaran yang secara khusus mengajarkan keterampilan digital, seperti pemrograman komputer, desain grafis, atau penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Kurikulum juga bisa menyesuaikan mata pelajaran tradisional dengan teknologi, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif dalam pelajaran matematika atau

penggunaan platform media sosial untuk proyek kolaboratif dalam pelajaran bahasa.

Dalam konteks yang lebih luas, sekolah bisa menyediakan pelatihan bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam metode pengajaran mereka, serta menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan perangkat komputer atau tablet untuk siswa.

1. **Penyelarasan dengan standar kompetensi.**
Mengintegrasikan pembelajaran literasi digital ke dalam berbagai mata pelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Misalnya, mengajarkan siswa bagaimana memverifikasi keaslian informasi online atau mengenali risiko keamanan digital.
2. **Inklusi Pembelajaran Keamanan Digital**
Menyertakan aspek-aspek keamanan digital dalam kurikulum, seperti perlindungan privasi online, etika digital, dan tindakan yang aman saat menggunakan internet.
3. **Pengembangan Keterampilan Teknologi**
Menyusun rencana pembelajaran yang mencakup penggunaan alat-alat digital dan perangkat lunak terkini untuk meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Hal ini bisa mencakup pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi, serta keterampilan pencarian informasi online.
4. **Proyek pembelajaran berbasis Teknologi**
Mengintegrasikan proyek pembelajaran yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital. Misalnya, siswa dapat diminta membuat presentasi multimedia, blog, atau proyek kolaboratif online yang melibatkan riset dan analisis.
5. **Pendidikan Media dan Literasi Digital**
Memasukkan pembelajaran media dan literasi digital sebagai bagian penting dari kurikulum. Hal ini mencakup keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi, memahami pesan media, dan mengembangkan sikap yang bijaksana terhadap penggunaan media digital.
6. **Penyediaan Sumber Belajar Digital yang Mudah Diakses**
Penyediaan Sumber Belajar Digital yang Mudah Diakses mengacu pada upaya untuk menyediakan materi pembelajaran digital secara efisien dan dapat dijangkau oleh semua peserta didik. Hal ini melibatkan pembuatan, kurasi, dan distribusi sumber daya belajar digital dengan memperhatikan aksesibilitas dan keterjangkauan untuk mendukung proses pembelajaran.
7. **Platform e-Learning Terbuka**
Pendekatan ini melibatkan penggunaan platform pembelajaran online yang terbuka dan mudah diakses. Misalnya, Khan Academy, Coursera, atau edX, yang menyediakan akses gratis atau dengan biaya terjangkau ke berbagai materi pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu.
8. **Repositori Sumber Daya Pendidikan**
Membangun repositori online yang berisi sumber daya pendidikan digital, seperti e-book, video pembelajaran, dan presentasi. Contohnya adalah Project Gutenberg untuk e-book atau YouTube sebagai platform video berbagi.



9. **Aplikasi Pembelajaran Mobile**
Pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan siswa mengakses sumber belajar di ponsel atau tablet mereka dengan mudah. Contohnya adalah Duolingo untuk pembelajaran bahasa atau Photomath untuk matematika.
10. **Open Educational Resources**
Mendukung penggunaan sumber daya pendidikan yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara bebas, seperti teks pelajaran, modul pembelajaran, dan multimedia. Situs web seperti OER Commons atau OpenStax menyediakan berbagai OER untuk berbagai mata pelajaran.
11. **Konten Interaktif dan Adaptif**
Menyediakan sumber belajar yang dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan memberikan umpan balik secara langsung. Contohnya adalah aplikasi Khan Academy yang menyajikan latihan matematika adaptif. Tujuan dari penyediaan sumber belajar digital yang mudah diakses adalah untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang, terlepas dari lokasi atau keterbatasan fisik mereka, serta untuk mendukung pembelajaran yang lebih personalisasi dan mandiri.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi bagi pendidik

Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pendidik terkait teknologi pendidikan mencerminkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pendidik dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pelatihan tersebut bertujuan agar pendidik dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan era digital (Sukmawati et al., 2022).

Pendidik dapat mengikuti pelatihan untuk memahami dan menguasai penggunaan platform e-learning seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo (Masnur, 2021). Ini melibatkan kemampuan mereka dalam mengelola materi pembelajaran, memberikan tugas, dan berinteraksi secara online dengan siswa.

Pendidik dapat mengikuti pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan desain pembelajaran digital. Ini mencakup cara merancang materi pembelajaran yang menarik dan efektif menggunakan berbagai media, seperti video, gambar, dan simulasi.

Pelatihan dapat difokuskan pada penggunaan alat bantu pembelajaran interaktif seperti kahoot!, Socrative, atau Nearpod. Pendidik akan belajar cara membuat kuis interaktif, polling, atau presentasi yang dapat diakses secara online oleh siswa.

Pelatihan dapat mencakup aspek literasi digital dan keamanan online agar pendidik dapat mengajarkan siswa cara menggunakan teknologi secara etis dan aman. Ini melibatkan pemahaman tentang hak cipta, privasi online, dan perilaku digital yang bijak (Hetilaniar et al., 2023).

Perlindungan dan Pengelolaan Data Siswa Secara aman dalam lingkungan Digital

Pengelolaan data siswa secara aman dalam lingkungan digital mencakup serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi dan mengelola informasi pribadi siswa dengan aman dalam konteks teknologi digital. Ini mencakup perlindungan terhadap pengaksesan yang tidak sah, pemrosesan data yang etis, dan penyimpanan yang aman untuk memastikan privasi dan keamanan informasi siswa (Kusnadi, 2021).

Sekolah dapat menggunakan platform yang mengenkripsi data siswa ketika disimpan atau ditransfer. Sekolah juga harus memastikan bahwa hanya staf yang berwenang yang memiliki akses ke data ini. Selain itu, pelatihan tentang keamanan siber bagi staf dan siswa dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran data. Kebijakan privasi yang jelas harus diberlakukan untuk menginformasikan siswa dan orang tua tentang bagaimana data mereka digunakan dan disimpan (Ayu et al., 2019).

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat melindungi data siswa aman.

1. **Penggunaan Enkripsi Data**
Data siswa dapat dienkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah. Ini melibatkan penggunaan teknologi enkripsi untuk menyandikan informasi sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membaca dan mengaksesnya.
2. **Penerapan Kebijakan Privasi**
Sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengadopsi kebijakan privasi yang jelas dan ketat. Ini mencakup memberikan informasi kepada siswa dan orang tua mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, dan cara data tersebut akan diolah dan disimpan.
3. **Pelatihan terhadap Pihak Terkait**
Pendidik dan staf administratif perlu mendapatkan pelatihan tentang praktik-praktik keamanan data dan privasi. Ini melibatkan pemahaman tentang cara mengelola data siswa, memproteksi informasi sensitif, dan tindakan pencegahan keamanan digital. Perlindungan data ini sangat penting di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah tersebar dan dieksploitasi jika tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga keamanan data siswa mereka.

Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan

Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam pendidikan merujuk pada proses pembentukan aturan, standar, dan panduan yang mengatur bagaimana teknologi harus digunakan dalam konteks pendidikan. Ini termasuk pengaturan tentang infrastruktur teknologi, privasi dan keamanan data, akses dan kesetaraan dalam penggunaan teknologi, serta standar kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini disusun dan diterapkan. Indonesia telah melakukan beberapa langkah maju dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, terutama melalui inisiatif



seperti program sekolah berbasis internet (internet school program) dan penggunaan platform pembelajaran digital. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidakmerataan akses teknologi antar wilayah, kebutuhan pelatihan guru yang lebih intensif dalam teknologi pendidikan, dan perlindungan data pribadi siswa.

Secara kritis, kebijakan di Indonesia perlu lebih fokus pada pemerataan akses teknologi, khususnya di daerah terpencil. Juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua dalam pembuatan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan efektif.

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan terkait penggunaan teknologi dalam pendidikan, masih diperlukan pendekatan terpadu yang menyeluruh. Kebijakan yang holistik dapat mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pelatihan tenaga pendidik, dan ketersediaan sumber daya.

Kebijakan perlu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi. Seiring perkembangan teknologi, kebijakan juga harus mampu menyikapi tantangan dan peluang baru yang muncul, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran.

Dalam merancang kebijakan, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan.

Kebijakan harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan privasi dan keamanan data siswa dan stakeholder terkait. Diperlukan ketentuan yang jelas mengenai bagaimana data siswa dikumpulkan, disimpan, dan digunakan untuk mencegah risiko pelanggaran privasi.

Evaluasi dampak Digitalisasi terhadap kualitas Pendidikan

Evaluasi dampak digitalisasi terhadap kualitas pendidikan merujuk pada proses analisis dan penilaian tentang bagaimana digitalisasi dalam pendidikan mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengajaran. Digitalisasi, yang meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kelas, pembelajaran online, dan sumber daya pendidikan digital, telah memberikan banyak peluang, namun juga tantangan.

Dampak positif digitalisasi antara lain termasuk peningkatan akses ke sumber belajar yang luas, pembelajaran yang lebih individualisasi, serta kemudahan dalam mengelola dan mengakses informasi pendidikan. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif.

Namun, tantangan juga muncul, seperti kesenjangan digital antara daerah yang memiliki akses berbeda terhadap teknologi, masalah keamanan dan privasi data, serta kebutuhan pelatihan bagi pendidik dalam menggunakan alat teknologi dengan efektif. Kualitas pendidikan digital juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai dan desain kurikulum yang sesuai.

Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat optimal dan tidak memperluas kesenjangan pendidikan. Ini juga



membantu dalam merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran digital.

Simpulan

Manajemen pendidikan di era digitalisasi mengalami transformasi signifikan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan. Berikut adalah poin-poin kunci dari manajemen pendidikan di era ini:

1. Digitalisasi memaksa terjadinya transformasi paradigma dalam pendidikan. Manajemen pendidikan perlu memahami dan merancang strategi untuk mengintegrasikan teknologi digital agar pendidikan menjadi lebih relevan, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan zaman.
2. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan peningkatan aksesibilitas pendidikan. Dengan platform daring dan sumber daya digital, siswa dapat belajar secara fleksibel tanpa batasan geografis, membuka peluang pendidikan bagi lebih banyak orang.
3. Digitalisasi memungkinkan optimalisasi proses pembelajaran melalui penggunaan platform e-learning, sumber daya interaktif, dan analitika pembelajaran. Manajemen pendidikan perlu memastikan pendekatan yang efisien dan efektif dalam penerapan teknologi ini.
4. Manajemen pendidikan juga harus memperhatikan tantangan terkait keamanan data siswa, etika penggunaan teknologi, serta kesenjangan akses teknologi. Kebijakan dan regulasi yang jelas diperlukan untuk melindungi privasi dan keamanan siswa dalam lingkungan digital.
5. Pendidik perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk mengembangkan kompetensi dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Inovasi dan kreativitas dalam penerapan teknologi menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif.
6. Manajemen pendidikan di era digitalisasi mendorong pentingnya kolaborasi dan kemitraan antara lembaga pendidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung implementasi teknologi digital secara holistik dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.F Stoner, James dan Edward Freeman. (1996). *Manajemen Jilid I*, terj. Alexander Sindoro. Jakarta : Penerbit PT. Prahallindo.
- Abdullah, A. (2007). Kurikulum pendidikan di Indonesia sepanjang sejarah (Suatu tinjauan kritis filosofis). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(66), 340–361.
- Adawiyah, F. (2021). Variasi Metode Mengajar Guru dalam Mengatasi Kejenuhan Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Paris Langkis*, 2.
- Adi Ahdiat. (2023). Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2022. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/03/02/Jumlah-Penduduk-Di-34-Provinsi-Indonesia-Tahun-2022>.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Ajidin, A. (2022). *Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 1, Nomor 2, Mei 2022* <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home> Analisis Manajemen Mutu Terpadu Dalam Sistem Pendidikan Islam. 1, 75–82.
- Akbar, K., Hamdi, H., Kamarudin, L., & Fahrudin, F. (2021). Manajemen POAC pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 167–175.
- Akuntabilitas, J., Pendidikan, M., Rosyadi, I., Yayasan, P., Rusyani, P., Rosyad, H., & Yogyakarta, U. N. (2015). Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smp 1 Cilawu Garut. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(1), 124–133. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>.
- Albab, S. U. I. M. I. A. Z. S. H. (2023). *Manajemen Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu*. Ar-Rosikhun: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 98–106.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Ali, Muhammad. (2002). *Penelitian pendidikan prosedur dan strategi mengajar*. Bandung : Angkasa.
- Aliyyah, R. R., Mulyadi, D., Widyasari, & Kholik, A. (2019). *Manajemen Lembaga Pendidikan*. Jakarta Selatan: Polimedia Publishing
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2022). Studi Literatur: Peran Inovasi Pendidikan pada Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184. <https://doi.org/10.21831/jitp.v8i2.43560>.
- Amirudin Tumanggor, James Ronal Tambunan, Pandapotan Simatupang (2021). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : K-Media.
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>.

- Anwar, K. (2018). Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikan. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.30659/jspi.v1i2.3206>.
- Apandi, I. (2018). Strategi Pembelajaran Aktif Abad 21 dan HOTS. Samudra Biru.
- Appley A, Lawrence dan Lee, Oey Liang. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Aqib, Z. (2015). Model Model , Media dan Strategi Pembelajaran Konstektual (Inovatif). Bandung: Yrama Widya
- Ariani, M., Zulhawati, Z., Haryani, H., Zani, B. N., Husnita, L., Firmansyah, M. B., Karuru, P., & Hamsiah, A. (2023). Penerapan Media Pembelajaran Era Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arianti. (2019). Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *DIDAKTIKA : Jurnal Kependidikan*, 12(2), 117–134
- Arikunto, S. (2012). Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arka, I. W. (2022). Kontribusi Supervisi Pendidikan Perspektif Dalam Menjalankan Fungsi-Fungsi Admintrasi Pendidikan. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2).
- Asni, Dasalinda, D & Chairunnisa, D. (2023). Penerapan Fungsi Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9 (1), 357-364.
- Awaluddin Tjalla. (2021). Strategi Manajemen Kurikulum Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, *AL FATIH* <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/ALF> Volume 1, Nomor 1.
- Ayu, A., Anindyajati, T., & Ghoffar, A. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 101.
- Azharuddin. (2020). Peran dan Fungsi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. *JIHAFAS*, 3, 158–159.
- Badrudin. (2013). Dasar-dasar Manajemen. Alfabeta.
- BPJS Kesehatan. (2024). Jaminan Kesehatan Nasional. <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. National Academies Press.
- Brinkmann, R., et al. (2011). *Construction Management*. John Wiley & Sons.
- Budi, H. I. S. (2019). Kajian Kecerdasan Emosional Terhadap Manajemen Konflik Tingkat Pimpinan Di GPT Baithani Denpasar. *Jurnal Jaffray*, 17(2), 239. <https://doi.org/10.25278/jj.v17i2.358>.
- Chaniago, S. (2010). Manajemen Mutu Pendidikan. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 8(2), 162–167. <https://doi.org/10.21009/econosains.0082.08>.
- Choir, Abu. (2016). Urgensi Manajemen Pendidikan dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, *Jurnal MPI*, 1, 44-55.
- Coursera. (2023). What Is Human Resource Management? <https://www.coursera.org/in/articles/human-resource-management>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.



- Dahar, Ratna Wilis. (2006). *Teori-Teori Belajar & Pembelajaran*. Bandung: Erlangga.
- Danarwati, Y. S. (2013). Manajemen Pembelajaran dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*, 6(13), 1-18.
- Darmadi, H. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161-174
- Darmadi. (2018). *Mendidik Adalah Cinta*. Surakarta : Kekata Grup.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta ; Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *Panduan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2009). *Panduan Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2009). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kependidikan*. Direktorat Pembinaan TK, SD dan SMP.
- Dessler, Gary. (2016). *Human Resource Management*. London: Pearson.
- Dewi Safitri. (2019). *Menjadi Guru Profesional*. Riau : PT Indragiri Dot Com.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2020). *Pedoman Pengelolaan Data Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Retrieved from https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2020/09/Pedoman_Pengelolaan_Data_Pendidikan_di_Satuan_Pendidikan_Dasar_dan_Menengah.pdf.
- Drucker, P. F. (1999). *Management Challenges for the 21st Century*. HarperBusiness.
- Efendi, Y. (2018). Rancangan Aplikasi Game Edukasi Berbasis Mobile Menggunakan App Inventor. *Jurnal Intra-Tech*, 39-48.
- Emiyati, A. (2023). Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pemulihan Sektor Pendidikan Pasca Pandemi Covid-19. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.46445/nccet.v1i1.695>.
- Fahmawati, L., Cheerli, C., & Imarshan, I. (2021). Fungsi Komunikasi Organisasi Internal Selama Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Organisasi Pendidikan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2).
- Farid Hamid. (2000). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Apollo.
- Fatah, Nanang. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung ; Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Fatkul Ma'arif. (2020). *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri Volume 3*.
- Fauzi, A. (2020). Analisis Biaya Mutu Dalam Meningkatkan Daya Saing Pendidikan (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>.
- Febiana, Lilys. (2019). Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan. *Jurnal PAI Radenfatah*. Vol 1.
- Febrianti. et.al. (2023). Peran Serta Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Pada Era Merdeka Belajar. *Jurnal Basicedu*. Vol.7 (No. 4).
- Firdausi, L., Akhyak, A., & Efendi, N. (2023). Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Dengan Prinsip-Prinsip Crosby: Penerapan Untuk Keunggulan

- Pendidikan: *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 19, 74–85.
<https://jurnal.insida.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/253>.
- Firman, (2022). Efektifitas Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal of Education and Teaching (JET)* Vol.3. (No 2).
- Fitri, A & Pujiyanto, W.E. (2024). Pelatihan Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Organisasi pada Pengurus Majelis Ta'lim Tulangan Sidoarjo, *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3 (1), 77-81.
<https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i1.2105>.
- George R. Terry (dalam Monovatra). (2021). Analysis of Factual Model of Training Management for Junior High School Teachers North Konawe Regency in the COVID-19 Era.
- George R. Terry. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.A.R. Tilaar. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Hadi, A. (2018). Konsep Mutu dalam Pendidikan. *Jurnal Idaarah*, II(2), 269–279.
- Hamalik Oemar. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Rosda Karya.
- Hamalik, Oemar. (2014). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hamid, H. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(1), 87–96.
<https://doi.org/10.24256/jpmipa.v1i1.86>.
- Hamzah B Uno. (2016). *Teori Motifasi dan Pengukurannya Analisis dibidang pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasanbasri, H., & Nurhayuni, N. (2023). Sumber Daya Teknologi Terhadap Pelaksanaan Kurikulum di Era Digital. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 874–888.
- Hasbullah. (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu pendidikan. *Jurnal Otonomi Pendidikan*. Vol. 14 (No. 1).
- Hasibun, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Cet VI, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayudiyani, M., Saputra, B. R., Adha, M. A., & Ariyanti, N. S. (2020). Strategi Kepala Sekolah Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Program Unggulan Sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 89–95.
<https://Doi.Org/10.21831/Jamp.V8i1.30131>.
- Hazin, M., & Rahmawati, N. W. D. (2021). Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 293–310.
- Herawan, E. (2017). Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep Dan Aplikasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(1), 43–50.
<https://doi.org/10.17509/jap.v13i1.6384>.
- Herdi Alif Al Hikam. (2019). Seberapa Mahal Pendidikan Indonesia? <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/d-4608643/Seberapa-Mahal-Pendidikan-Indonesia>.



- Hetilaniar, Rokhman, F., & Pristiwati, R. (2023). Dari Dunia Offline ke Dunia Online: Merangkul Literasi Digital. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 13(1), 44–54. <https://doi.org/10.31851/pembahsi.v13i1.11936>.
- Hidayat, kk. (2023). Manajemen Pendidikan Islam, *Syî'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 6 (2), 52-57.
- Hidayat, R, Arifin, Z & Tamiang, Y. (2021). Tafsir Ayat-ayat tentang Fungsi Manajemen Pendidikan, *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2 (1), 88-107.
- Hidayat, R, Arifin, Z., Tamiang, Y., & Sumatera Utara Medan, U. (2021). Tafsir Ayat-Ayat Tentang Fungsi Manajemen Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies*, 2(1), 88–107.
- Hikmat. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia <https://fitsmallbusiness.com/what-is-training-and-development/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Indriyanti, N., Dan, S., & Ivada, E. (2013). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta tahun. In *Jupe UNS (Vol. 1, Issue 2)*. Mei.
- Irjanti, Hepi, H., Sukiada, K., & Sihung, S. (2023). Fungsi Manajemen Pengembangan Kapasitas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Perspektif Manajemen Pendidikan. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 7(2), 146-163. <https://doi.org/10.33363/satya-sastra-haring.v7i2.1104>
- Irwan Suryadi. (2021). *Manajemen Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi*. *Idaratul Ulum*, 3(1).
- Ishak, I. (2016). *Manajemen Sarana Prasarana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *JINOTEP: Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.17977/um031v1i12014p020>.
- Julika, S., & Setiyawati, D. (2019). Hubungan antara Kecerdasan Emosional, Stres Akademik, dan Kesejahteraan Subjektif pada Mahasiswa. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.22146/gamajop.47966>.
- Kalsum, Umi & Waluyo, B. (2022). Fungsi Manajemen Pendidikan Dalam Kinerja Guru, *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 8, 296-324.
- Kamal, H. (2018). Kedudukan Dan Peran Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 19–29.
- Karitas, C., & Suwartono, C. (2023). e-LIT: Pengembangan Instrumen Penilaian Literasi Digital bagi Generasi Digital-Native. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi: JPPP*, 12(2), 129–137. <https://doi.org/10.21009/jppp.122.08>.
- Kasmawati, Yuni. (2021). Kepemimpinan Kolaboratif sebuah Bentuk Kepemimpinan Untuk sekolah. *Jurnal Pendidikan*. Vo.IX.
- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Kemendikbud RI. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Permendikbud Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Siswa. Retrieved from <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20Permendikbud%2082%20Tahun%202019.pdf>.
- Komara, Endang. et.al. (2023). Implementasi Kepemimpinan Partisipatif Dalam Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*. Vol.9. (No. 3).
- Komariah, N. (2018). Implementasi Fungsi Manajemen Pendidikan di SDI Wirausaha Indonesia, *Perspektif*, XVI, (1), 107-111.
- Komariyah, L., Amon, L., Wardhana, A., Priyandono, L., Poernomo, S. A., Januar, S., Satriawarman, T., Bustami, M. R., Pratama, P. A., & Sumantri, W. H. (2021). *Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan Abad 21*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (1976). *Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions*. McGraw-Hill.
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. (2007). *Manajemen*. Jakarta : Penerbit PT Erlangga.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Landau, Heather. (2023). *What Is Training & Development? A Guide for SMBs*
- Larasati, Citra. (2023). *Mengenal Lembaga Pendidikan, Fungsi hingga Contoh Formal dan Informal*. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/PNgyxdok-mengenal-lembaga-pendidikan-fungsi-hingga-contoh-formal-dan-informal>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Latifah, Ami, Andi Warisno, and Nur Hidayah. "Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Ma Nurul Islam Jati Agung." *Jurnal Muftadiin* 7, no. 2 (2021): 107–108.
- Lestari, W. I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Per Provinsi Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3136–3144.
- Link Aja. (2022). *Jenis-jenis BPJS dan Manfaat yang Berhak Kamu Dapatkan Sebagai Peserta*. <https://www.linkaja.id/artikel/jenis-jenis-bpjs-dan-manfaat-yang-berhak-kamu-dapatkan-sebagai-peserta>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023
- Lisnawati, Rita. (2017). Fungsi Manajemen Kepala Sekolah, Motivasi, Dan Kinerja Guru, 2 (2), *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, 2 (2), 143-149. DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jp.v2n2.p143-149>.
- Maisaro, A., Wiyono, B. B., & Arifin, I. (2018). Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 302–312. <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p302>.
- Margareta, D. (2022). Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di MIN 1 Lebong. *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, 2(2), 55–62.



- Margaretha, Y. (2019). Manajemen Konflik Pada Perusahaan Keluarga (Studi Kasus Pada Perkebunan X). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2), 135–142. <https://doi.org/10.28932/jmm.v18i2.1618>.
- Masitoh & Dewo, Laksmi. 2009. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta. Dirjen Pendidis Kemenag RI.
- Masnur, I. (2021). Efektivitas E-Learning Dalam Berpikir Kritis. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 163–169.
- Maujud, Fathul. (2018). Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan). *Jurnal Penelitian Keislaman*. 14 (1), 30-50, <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490>
- Maulana, A., Dian, D., & Jahari, J. (2020). Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Di Madrasah Swasta. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 134–141. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1109>.
- McGregor, D. (1960), *The Human Side of Enterprise*, McGraw-Hill, New York, NY.
- Muflihah, A., & Khofya Haqiqi, A. (2019). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah (Vol. 7, Issue 2).
- Mulyasa. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, A. (n.d.). Peran Kepala Sekolah Dalam Pendidikan. In *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 8, Issue 1). <https://journal.parahikma.ac.id/el-idarah>
- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Mutiaramses, M., S, N., & Murni, I. (2021). Peran Guru Dalam Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 43–48.
- Mz, I. (2018). Peran Konsep Diri Terhadap Kedisiplinan Siswa. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.915>.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2009). *Pengembangan Kurikulum :Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, A. H., Unsa, F. F., Aini, F. N., Arifin, I., & Adha, M. A. (2021). Manajemen Konflik dan Cara Penanganan Konflik Dalam Organisasi Sekolah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v9i1.1888>.
- Nasucha, Y., Sutopo, A., Ahmad, Fatmawati, Astuti, T. I., & Mrihatini, A. (2021). Penguatan Generasi Cerdas dan Berkarakter bagi Masyarakat Tangen Sragen. *Buletin KKN Pendidikan*, 3(1), 63–73. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v3i1.14668>.
- Nasution, M. I. P. (2016). Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning pada Sekolah Dasar. *IQRA': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 10(1), 1–14. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/123>.
- Noviani, D., Hilmin, H., Elhefni, E., & Mustafiyanti, M. (2023). Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Non Formal Keagamaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 21–35.

- Nur Ahid. (2006). Konsep Dan Teori Kurikulum Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 1, No. 1.
- Nurdyansyah, N., & Fahyuni, E. F. (2016). Inovasi model pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Nizamia Learning Center.
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. 3(2). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>.
- Nyoman Mantra Ida Bagus, dkk. (2022). Persepsi Guru Terhadap Pentingnya Pelatihan Pengembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
- Oktaviani, M. dan S. P. (2023). Analisis Proses Pengembangan Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung. *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 07(01), 206–217.
- Panggabean, R. (2017). Institutionalisation of School-Based Conflict Management. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 197–218. <https://doi.org/10.32533/01107.2017>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pidarta, M. (2004). *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rabiah, Sitti. (2019). Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Sinar Manajemen*, 6 (1), 58-67.
- Rahim. (2014). *Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ratna Willis Dahar. (2006). *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Gelotra Aksara Pratama.
- Redhana, I. W. (2019). Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 13(1).
- Renani, Sri. et.al. (2008). *Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Hikayat Publishing. Cetakan 1.
- Rezky, M. P., Sutarto, J., Prihatin, T., Yulianto, A., & Haidar, I. (2019). Generasi Milenial Yang Siap Menghadapi Era Revolusi Digital (Society 5.0 Dan Revolusi Industri 4.0) Di Bidang Pendidikan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (Prosnampas)*, 2(1), Article 1.
- Ridlo, S. (2020). Aspek Peningkatan Manajemen Pendidikan Agama Islam. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan ...*, 2(November 2020), 105–116. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/740%0Ahttps://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/740/563>
- Risno, D. N. (2015). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada Aspek Peran Serta Masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(2).
- Rivai, V. (2009). *Education Management: Analisis teori dan praktik*-Eprint UIN Raden Fatah Palembang. <http://eprints.radenfatah.ac.id/420/>.



- Rizki, Akmalia. (2022). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Taman Siswa Medan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4 (No. 6).
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. (2016). *Management*. London: Pearson Education.
- Rosy tiurnida Maryance, dkk. (2022). *Supervisi Pendidikan*. Aceh : Yayasan Muhamad Zaini.
- Rouf, A. (2016). Transformasi dan Inovasi Manajemen Pendidikan Islam. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).
- Ruhaya, B. (2021). Fungsi Manajemen Terhadap Pendidikan Islam. *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 125–132. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.174.
- Rusmiyati, S. (2019). Upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun silabus melalui bimbingan dan supervisi di SD Negeri 1 Kalinanas. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1).
- Saefullah, KH. U. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106.
- Safitri, E. W. (2023). Manajemen Sekolah Dasar: Konsep Dan Ruang Lingkup. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 3270–3278. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1020>
- Sagala, Syaiful. (2017). *Konsep Dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Saidah, S. (2014). Implementasi Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 5, 56520.
- Samsirin, S. (2015). Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam. *At-Ta'dib*, 10(2), Article 2. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id /index.php/tadib /article/view/461>.
- Sanjaya, Wina. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Santi, Y., Yeni, E. M., & Marisa, R. (2023). Analisis Implementasi Hubungan Sekolah dengan Wali Murid dalam Peningkatan Akhlak Siswa di Sekolah Penggerak. *AHDFA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 83–96.
- Saputra, B. A., & Nurdiansyah, N. (2020). Penguatan Literasi Digital melalui Model Pengembangan Kurikulum SMA Islam Berbasis Media Digital di Era 4.0. *Islamika*, 2(1), 36–45. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.483>.
- Sarah Lailatil Fadla, I. N. S. R. H. S. B. S. L. M. (2021). Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Batang Kuis Sumatera Utara Medan. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 5, No. 2, 19–22. <https://doi.org/10.1080/15700760902737196>
- Sardiman. (2007). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Saudin, A. (2019). Perhitungan Biaya Satuan Unit (Unit Cost) Spp Bulanan Di Mi Darul Ulum Brengkok Brondong Paciran Lamongan. *MUDIR: Jurnal*

- Manajemen Pendidikan, 1(2).
<http://ejournal.insud.ac.id/index.php/mpi/index>.
- Sayuti, ahmad. (2022). Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Muftadiin*. Vol.8.
- Sefhia Naila Sabrina, A. E. (2022). Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1(1).
- Setyosari, P. (2014). Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas.
- Siagian P. Sondang. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Siregar, Evelin & Nara, Hartini. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sitompul, B. (2022). Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13953–13960.
- Smith, A., Johnson, B., & Brown, C. (2019). Quality Management in Education: A Comprehensive Review. *Journal of Educational Management*, 3(1), 18–23. <https://doi.org/10.1080/01605682.2018.1523102>.
- Soewardi. (2010). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Soewardi. (2015). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Jakarta: Erlangga.
- Sopian, A. (2016). Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 88–97.
- Stewart, T. A. (2007). The Best of HBR: What You Need to Know About... Managing People. *Harvard Business Review*.
- Suardipa, P., Tinggi, S., Hindu, A., Mpu, N., & Singaraja, K. (2018). Guru Sebagai Agen Inovator Berbasis Higher. *Purwadita*, 2(2), 73–83
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. 2(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>.
- Sudibyo, A., 2008. *Manajemen dan Fungsi-fungsinya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suhardiman, A. (2016). Peran Manajerial Kepala Sekolah Dalam Manajemen Sekolah di SDN 172 Enrekang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (Vol. 4, Issue 1).
- Suharsimi Arikunto. (2003). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suherman, U. (2017). Sikap Terhadap Kecurangan Akademik Berdasarkan Orientasi Tujuan Belajar (Studi Deskriptif pada Peserta Didik Kelas VII, VIII, dan IX di SMP N 1 Lembang Tahun Pelajaran 2016/2017). *Antologi Program Studi Bimbingan dan Konseling Volume 5, Nomor 1*. <http://antologi.upi.edu/main/antologi/A025/view/1086/sikap-terhadap->
- Sukmawati, E., Fitriadi, H., Pradana, Y., Trustisari, H., & Wijayanto, P. A. (2022). Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model. In *Global Eksekutif Teknologi* (Vol. 6, Issue 2). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hx5-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=teori+gestalt&ots=HtDgCFMqRn&sig=c9EAZ4DE52A2Yixel7xEZDu8zTs>.
- Supriani, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Pemanfaatan Information And Communication Technology di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8395–8404. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3830>.



- Susriyanti, S., & Nardo, R. (2019). Pengaruh fungsi komunikasi dan kepuasan kerja karyawan terhadap pemberian pelayanan nasabah PT. BPR LPN Talawi Sakato. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(1).
- Sutjipto. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suwarno, S.A. (2023). Kinerja Kepala Madrasah Dalam Melaksanakan Fungsi Manajemen Pendidikan Di MTs Alamiriyah Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (6), 7012-7029.
- Syaiful Bahri. (2011). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syam, Andi Asasi, et.al. (2017). Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Diskursus Islam*.Vol 05.
- Syamsuddin. 2017. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Idaarah*, 1, (1), 60-73.
- Syarifuddin. (2015). Guru Profesional: dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1).
- Syarifudin, F. (2019). Urgensi tabayyun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. *Al-Kuttab : Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 1(2), 29–39. <https://doi.org/10.24952/ktb.v1i2.1994>.
- Terry, G. R. (2011). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G.R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Terry, George. R. (1973). *The Principles of Management*. Illionis.
- Tulak, T. (2021). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Pembelajaran Kurikulum 2013. *Jurnal KIP*, IX(3).
- Turmidzi, I. (2021). Implementasi Supervisi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Tarbawi*, 4(1), 33–49. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi>.
- Ulyani, A & Zohriah, A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8 (1), 11-22.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- UNESCO. (2005). *Education for Sustainable Development Toolkit*. UNESCO.
- UNESCO. (2011). *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2017). *Guidebook on Measuring Education Facilities and Quality*. UNESCO Institute for Statistics.
- Usman, J., Tinggi, S., Islam, A., & Pamekasan, N. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. www.kamusbahasaindonesia.org/mutu.
- Usman, U. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wahyu Bagja Sulfemi (dalam Ahmad Sayuti). (2021) Strategi Manajemen Kurikulum Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, *AL FATIH* <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/ALF> Volume 1, Nomor 1.
- Wartini, S. (2016). Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 64. <https://doi.org/10.29244/jmo.v6i1.12194>.

- Westra, Pariate. (1980). Pokok-pokok Pengertian Ilmu Manajemen, BPA, Akademi Administrasi Negara, Yogyakarta: AAN.
- Widiyowati, E., Kriyantono, R., & Dwi Prasetyo, B. (2018). Model Manajemen Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Konflik Perguruan Pencak Silat Di Madiun-Jawa Timur. *Komunikator*, 10(1), 34–47. <https://doi.org/10.18196/jkm.101004>.
- Winardi. (1983). Asas-asas Manajemen. Bandung: Penerbit Alumni.
- Yohana Afliani Ludo Buan. (2020). Guru dan Karakter Pendidikan. Indramayu : Adanu Abimata.
- Yusuf, B. B. (2017). Konsep dan Indikator Pembelajaran Efektif. *Jurnal Kajian Zainal Arifin*. (2014). Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zulkarmain, L. (2021). Analisis Mutu (Input Proses Output) Pendidikan di Lembaga Pendidikan MTs Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Manazhim*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i1.946>.
- Zulkarnain, D. (2019). Peran Guru Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Siswa Kelas X Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 27.



PROFIL PENULIS



Dr. Edy Siswanto, S.Pd., M.Pd. lahir di Pemalang, 28 Oktober 1976, adalah Doktor Bidang Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Selain pakar bidang Manajemen Kependidikan dan Pendidikan Kejuruan (Vokasional), juga menggeluti masalah Kebijakan dan Politik Pendidikan, Filsafat Pendidikan, *Information and Automotive Technology Education*. Lulus terbaik Sarjana S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Ivet Semarang (UNISVET), tahun 2000. Lulus Cumlaude Program Magister, S2 Manajemen Pendidikan UNNES, tahun 2009. Dan lulus Cumlaude Program Doktor, S3 Manajemen Kependidikan UNNES, tahun 2023, dengan IPK 4,00. Karya ilmiah dan publikasi banyak dimuat di beberapa media masa, seperti Jawa Pos Radar Semarang, Kompasiana, Gurusiana, www.edy Siswanto.com, <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218825740>; <https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=FDKaPbcAAAAJ>; dan masih banyak lagi. Buku yang pernah ditulis, “Bunga Rampai Pemikiran Pendidikan”, CV Pustaka Media Guru, ISBN : 978-602-478-856-8; Surabaya, November 2018. “Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Tinjauan Polkumeksosbud” YPSIM Banten, ISBN : 978-623-6356-15-9; Banten, Juli 2021. “Supervisi Pendidikan, Menjadi Supervisor yang Ideal” Unnes Press, ISBN : 978-602-285-286-5 Semarang, Agustus 2021. Buku Panduan Model Manajemen TEFA MTF-5P, tahun 2023 ; dan Buku Panduan Kecakapan Kewirausahaan (Kerisku) untuk Siswa SMK, tahun 2023.



Muwafiqus Shobri. Ketertarikan penulis terhadap ilmu agama islam sejak belia, mendorong penulis untuk menempuh pendidikan pesantren; pertama di Pon-Pes Darul Hikmah Meulaboh Aceh Barat, kemudian melanjutkan mondok di Pon-Pes Miftahurrosyad Lamongan Jawa Timur sambil menempuh pendidikan formal di MTs Tanwirut Tholibin hingga lulus Madrasah Aliyah Ma’arif 4 Dadapan Solokuro Lamongan dengan memilih jurusan IPS pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya pada tahun 2010. kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi dan kampus yang sama dengan sebelumnya pada tahun 2013 dan sekarang (2023) tengah melanjutkan studinya dengan menempuh S3 di Universitas Terbuka pada prodi Doktor Administrasi Publik. Penulis memiliki keahlian di bidang Manajemen Pendidikan Islam, dan untuk mewujudkan karir sebagai Dosen di Prodi

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) STAI Hasan Jufri Bawean, Penulis aktif sebagai pendidik, peneliti dan penulis di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa book chapter yang telah berhasil ditulis bersama beberapa rekan Dosen dari berbagai perguruan tinggi dan telah terbit antara lain berjudul: 1). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dalam Pondok Pesantren, 2). Metode Penelitian Kepustakaan (Research Library), 3). Teori Studi Al-Qur'an, 4). Manajemen Pendidikan, 5). Manajemen Pendidikan Islam, 6). Metode Penelitian Kualitatif dalam Manajemen Pendidikan Islam, 7). Manajemen Pondok Pesantren, 8) Manajemen Pendidikan dan 9) Administrasi Pendidikan. Selain itu, Penulis juga aktif menulis buku terjemahan, di antaranya; almiftah terjemah nadzam kitab imrithi dan almaftuh syair terjemah nadham kitab al maqsud. Disamping pengabdian di lembaga pendidikan, Penulis juga menekuni berbagai dunia bisnis seperti emas, saham, kripto asset, affiliate dan multilevel marketing. Profil penulis selengkapnya dapat diakses pada laman resmi Prodi MPI STAI Hasan Jufri Bawean <https://mpi.staiha.ac.id/muwafiqus-shobri> dan untuk korespondensi silakan melalui email Penulis: dosensukses@gmail.com.



Defi Dachlian Nurdiana adalah staf pendidik di Jurusan Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Gresik. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan STAI Hasan Jufri Bawean Gresik. Ia menempuh pendidikan S1 di program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Darul 'Ulum Jombang dan Program Studi S2 Sosiologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Karir intelektualnya dimulai semenjak menempuh jenjang pendidikan Program Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sering mengikuti seminar, dan workshop. Ia beberapa kali terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan social yang telah terpublikasikan dan sekarang Ia terus aktif mengajar, meneliti dan menulis buku. Ketertarikannya dalam bidang Manajemen Pendidikan dimulai saat terlibat dalam TIM Akreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Hasan Jufri Bawean di tahun 2018. Dari situ mulai menulis beberapa artikel yang berkenaan tentang manajemen pendidikan. Penulis dapat disapa melalui email defi.dachlian@gmail.com.





Fitriana, M.Pd., Kons, kelahiran tahun 1992, daerah Indragiri Hilir. Ia sebagai dosen Universitas Jambi, saat ini sedang melanjutkan studi S3 Bimbingan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Ia pernah menjadi Wakil Ketua di STIT Al-Kifayah Riau, Dosen LB di UIN SUSKA Riau, Tutor di Universitas Terbuka, Pembina Moderasi Beragama & Psikospiritual di Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau, ia juga pernah menjadi asisten profesor di FIP Universitas Riau dan Universitas Negeri Padang. Penulis juga terlibat aktif sebagai konselor, pembicara kegiatan seperti seminar atau pelatihan bidang konseling, motivasi & pendidikan. Karya berupa jurnal dan buku kolaborasi seperti Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Telaah Kurikulum dan Perencanaan PAUD, Manajemen Sumber Daya Manusia Prinsip Dasar dan Aplikasi, Manajemen Komunikasi Prinsip Dasar dan Aplikasi, Kewirausahaan, Pengantar Penelitian Pendidikan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis, dan lainnya. Email fitriana.fkip@unja.ac.id.



Mohammad Adnan, terlahir di Kota Surakarta Jawa Tengah, pada 26 Pebruari 1981, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 1 Surakarta pada 1993, pada tahun yang sama, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta, dan menyelesaikan jenjang menengah pertama ini di MTs Hasan Jufri Bawean di tahun 1996. Pada tahun 1999 Lulus Madrasah Aliyah di MA Hasan Jufri Bawean. Setelah menyelesaikan pendidikan Aliyah, mengabdikan diri sebagai Tata Usaha pada Alamamater hingga tahun 2006. Pada Tahun 2006 melanjutkan Studi ke jenjang S1 di Universitas Sunan Giri Surabaya. Setelah menyelesaikan program sarjana pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan program pasca sarjana pada kampus yang sama dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi S2, mengabdikan diri di STAI Hasan Jufri Bawean sebagai Kepala BAAK dan memberikan materi kuliah hingga sekarang. Sejak tahun 2021 melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana S3 Manajemen Pendidikan Islam di IKHAC (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam penyelesaian studi S3 ini. *Aamiin aamiin aamiin Yaa Rabb. Shallallahu alaa siidii Muhammadin*, Email : adnan.bawean@gmail.com.



Siti Nurasih, S.Pd.I, M.Pd, lahir di Serang, 03 Agustus 1987. Penulis adalah seorang Magister dibidang Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, lulus tahun 2022, juga menggeluti bidang Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Wasilatul Falah Rangkas Bitung kabupaten lebak banten lulus pada tahun 2012. Memiliki pasangan hidup bernama Hamzah dan dikarunia 4 (empat) anak 3 perempuan dan 1 laki-laki. Karya ilmiah dan publikasi dimuat

direpository.uinbanten.ac.id, researchgate.net adapun karya ilmiah yang pernah ditulis “Pengembangan Manajemen Kurikulum Sekolah Terpadu Dalam Membentuk Pendidikan Karakter Siswa” dimuat direpository.uinbanten.ac.id ,researchgate.net dan Pendidikan Agama Islam Hubungannya dengan Ahlak Peserta Didik dan Buku Kolaborasi Manajemen Pendidik terbit di Penerbit CV. Aina Media Baswara.



Nurbaiti, dilahirkan di Baturaja, tanggal 17 Mei 1964. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Universitas Muhammadiyah Palembang pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Pendidikan. Penulis adalah salah satu karyawan tetap pada Yayasan Bukit Asam Tanjung Enim dan sebagai dosen pada Program Studi Teknik Pengoperasian Alat Tambang, Teknik Perawatan Alat Tambang dan Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batubara pada Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan. Disamping sebagai dosen, penulis juga sebagai Guru di SMA Bukit Asam dan pernah menjadi kepala sekolah selama dua periode di SMA Bukit Asam Tanjung Enim.



Monovatra Predy Rezky, lahir di Wawotobi tanggal 11 November 1993. Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Jurusan Pendidikan matematika Universitas Halu oleo, melanjutkan S2 pada jurusan Pendidikan Matematika Universitas Halu oleo, melanjutkan S2 pada jurusan Manajemen STIE-66 Kendari dan melanjutkan S3 pada jurusan Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang. Saat ini, penulis bekerja sebagai kasubag perencanaan dan keuangan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Konawe Utara buku ini bermanfaat bagi pengelola Pendidikan maupun civitas akademik untuk mengelola kurikulum dalam pendidikan.



Turno, lahir di Batang tanggal 7 Februari 1981 Penulis adalah mahasiswa S3 Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Lulus S1 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang lulus Tahun 2006, Lulus S2 dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2009 Prodi Manajemen Pendidikan. Pengalaman kerja sebagai dosen Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Negeri Pekalongan, Sekarang aktif di Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Desa dan PDTT. Pengalaman Organisasi di Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, Pendiri Lembaga Studi Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan (LSP3), pernah jadi Aktivistis Buruh di Federasi Serikat Buruh Independen Semarang dan aktifis desa sebagai Pembina Asosiasi BPD Se Kabupaten Batang. Buku yang pernah ditulis “Perencanaan Pendidikan Islam”



yang di terbitkan oleh STAIN Press, Adapun Penelitian yang pernah diteliti di Pemerintah Kabupaten Batang “Peran Dana Desa Dalam Membentuk Desa Mandiri di Kabupaten Batang Tahun 2017”.



Dr. Citra Dewi, S.Pd. M.Pd, lahir di Bengkulu tanggal 04 April 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dehasen Bengkulu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu, melanjutkan S2 pada Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan melanjutkan S3 pada Program Doktor Ilmu Pendidikan konsentrasi Manajemen Pendidikan di Universitas Islam

Nusantara Bandung (UNINUS). Penulis menekuni bidang Manajemen Pendidikan yang berfokus Pada Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan. Selain sebagai dosen penulis juga mendapatkan prestasi pada tingkat Nasional sebagai Pelatih Ahli Sekolah Penggerak pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Penulis juga terlibat aktif sebagai asesor BAN PDM Provinsi Bengkulu. Penulis juga menjadi narasumber baik pada kegiatan lokal, nasional dan internasional dalam kegiatan Seminar dan Konferensi bertemakan pendidikan.



Dr. Reina A. Hadikusumo, S.E., M.M., M.Kom, lahir di kota Jakarta. Saat usianya baru 8 bulan, orang tuanya pindah ke Surabaya dan Reina tumbuh hingga dewasa di kota tersebut. Saat ini Reina bekerja sebagai dosen di Universitas Surabaya, guru piano, guru vokal, dan trainer musik. Cita-cita sebagai dosen diinginkan Reina sejak kecil mengikuti jejak ibunya tercinta, yaitu ibu Cherry L. Hadikusumo. Reina giat mengikuti banyak sertifikasi agar dapat bekerja lebih maksimal. Reina aktif menulis cerita pendek (cerpen) sejak kecil dan

memenangkan beberapa penghargaan. Saat ini, beberapa karya tulis telah dihasilkan Reina dengan tema seputar pendidikan, motivasi, dan musik. Selain menulis, Reina gemar bernyanyi sambil bermain piano ataupun gitar. Bakat bermain musik didapat Reina dari sang ayah, bapak Suryo Hadikusumo yang menguasai berbagai macam alat musik. Saat berumur tujuh tahun Reina belajar piano klasik, kemudian belajar pula piano pop dan jazz. Kegemaran bermain musik membuat Reina menghasilkan beberapa karya lagu, di antaranya untuk universitas tempatnya bekerja yaitu Himne Ika Ubaya, Mars Ika Ubaya, Himne Politeknik Ubaya, Mars ADI Politeknik Ubaya, dan Ubaya Satu. Reina juga dipercaya menciptakan Himne Pelita dan Mars Pelita (Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia). Reina memiliki motto hidup “Belajar dan Berkarya Sepanjang Masa”. Reina memiliki channel YouTube dengan nama dirinya sendiri, yaitu Reina A. Hadikusumo. Reina dapat dihubungi di alamat e-mail reina_hadikusumo@yahoo.com.



Darul Prayogo, lahir di Semarang tanggal 18 Juni 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang, melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang dan melanjutkan S3 pada Jurusan Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang. Penulis ingin menekuni bidang ilmu Manajemen Pendidikan Pelayaran sebagai bidang ilmu yang spesifik. Saat ini, penulis tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus dosen tetap pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan mata kuliah yang diampu diantaranya: Ilmu Bahan, Teknologi Bahan, Termodinamika dan Mekanika Hidrodinamika, Kepemimpinan, Manajemen Perawatan dan Perbaikan Permesinan. Besar harapan penulis, buku ini bermanfaat bagi pengelola Pendidikan maupun civitas akademik untuk melakukan Manajemen Keuangan dalam Pendidikan.



Moh. Nasir, lahir di Batam pada tanggal 16 Juli 1993, penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai jejak pendidikannya di SDN Lebak II Muara dan melanjutkan pendidikan Menengah di MTS Hasan Jufri dan kemudian melanjutkan ke MA Hasan Jufri. Pendidikan tinggi penulis dimulai dengan meraih gelar S1 pada Jurusan Fisika di UIN Maulana Malik Ibrahim pada Tahun 2016 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim dan selesai pada tahun 2018. Selain menekuni pendidikan formal, penulis juga belajar di pendidikan non formal yakni di Pondok pesantren Hasan Jufri Bawean selama Kurang lebih tiga tahun untuk mendalami ilmu dan nilai-nilai Agama. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 Penulis Menjadi salah satu dosen tetap di program Studi Manajemen pendidikan Islam di Sekolah tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean. Mengampu Mata kuliah manajemen strategi, manajemen pengarsipan perkantoran, Sekian dari Penulis semoga apa yang penulis tulis bermanfaat bagi para pembaca.



Noper Ardi, lahir di Jambi, 21 November 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada bidang studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Padang, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada di bidang Teknologi Informasi. merupakan seorang dosen yang berdedikasi di Politeknik Negeri Batam. Dengan penuh semangat, Penulis menggabungkan keahlian teknisnya dengan hasrat dalam pendidikan dan Teknologi Informasi (TI). Dedikasinya tercermin dalam pendekatan inovatif dan inspiratif dalam pengajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung bagi



perkembangan mahasiswa. Penulis telah menghasilkan beberapa buku, diantaranya yang terkenal, Buku Pengantar Coding berbasis C/C++, Dasar-dasar Pemrograman Berbasis Pythin, Teknik Multimedia dan Animasi. Sebagai peneliti, Penulis telah berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam TI, dengan karya-karyanya yang dipublikasikan di berbagai jurnal. Pasionnya dalam dunia pendidikan dan IT juga tercermin dalam upayanya untuk terus memajukan kurikulum Pendidikan vokasi. Sebagai Dosen di Politeknik Negeri Batam, Penulis tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk mahasiswa menjadi individu yang berpikir kritis dan etis.



Sudadi, lahir di Balikpapan tanggal 24 Mei 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa Inggris Universitas Mulawarman tahun 1995, melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2004 dan melanjutkan S3 pada Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2014. Penulis memiliki sejarah karier yang beragam dalam dunia pendidikan. Ia memulai karier sebagai Guru di SMP Negeri 1 Marangkayu, Kutai Kartanegara, dari tahun 1997 hingga 2012. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 5 Loa Janan, Kutai Kartanegara, dari tahun 2012 hingga 2019. Selanjutnya, penulis menjadi Dosen di FKIP Universitas Kutai Kartanegara dari tahun 2004 hingga 2013. Penulis juga mengejar karier sebagai Dosen pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Pendidikan Ekonomi di IKIP PGRI Kaltim dari tahun 2006 hingga 2020. Selain itu, penulis terlibat sebagai Guru di SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang dari tahun 2019 hingga 2020. Puncak karier beliau adalah ketika menjadi bagian dari UINSI Samarinda pada tahun 2021.



Akhmad Ramli, lahir di Samboja, 14 Februari 1963 Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lulus Diploma I Universitas Terbuka Malang Tahun 1987, lulus S1 FKIP Bahasa & Sastra Indonesia Unmul Tahun 1987, lulus Magister Manajemen Pendidikan UNJ Lulus Tahun 2004. Pada tahun akademik 2009/2010 melanjutkan studi S3 Program studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, selesai studi tahun 2013. Pada tahun 2012-2014 menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Samarinda, tahun 2014-2017 menjabat Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Daerah Samarinda dan tahun 2017 menjabat Kepala Dinas Kearsipan Kota Samarinda. Penulis seorang dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Sejak tahun 2021. Penulis aktif dalam menulis buku, dan melakukan penelitian. Berikut buku yang sudah diterbitkan: Manajemen Konflik, Manajemen Sumber Daya di Era Digital, landasan Pendidikan: Teori dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 dan Society 5.0 di Indonesia, Model & Metode Pembelajaran Inovatif: Teori Dan Panduan Praktis, Manajemen Pendidikan Islam, Pengantar Manajemen Pendidikan, Buku Ajar Manajemen



Peserta Didik, Buku Ajar Manajemen Pendidikan, Landasan Pendidikan, Manajemen Kepala Sekolah, serta puluhan artikel yang sudah terbit di Jurnal nasional terakreditasi.



Sofyan Mustoip, lahir di Cirebon tanggal 11 Desember 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan PGSD, dan melanjutkan studi S2 pada Jurusan Pendidikan Dasar melalui program Beasiswa Unggulan kategori Masyarakat Berprestasi. Penulis menekuni penulisan bidang Pendidikan, dan hingga saat ini penulis masih aktif mempublikasikan karya ilmiah, diantaranya Implementasi Pendidikan Karakter, Psikologi Pendidikan Anak Usia Sekolah,

Pendidikan Karakter di Sekolah, Psikologi Pendidikan, Evaluation of Implementation of the PjBL-Based STEAM Approach Affect on Critical Thinking Skills and Creativity, Influence of Introverted and Extroverted Personalities on English Learning Interaction for Elementary School Students, Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Sekolah Dasar di Era Digital, Components of Contextual Teaching and Learning as The Basis for Developing a Character Education Model, Implementation of Character Education through Children's Language Development in Elementary Schools, Analisis Penilaian Perkembangan dan Pendidikan Karakter di Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar.



MANAJEMEN PENDIDIKAN

Buku ini merupakan sebuah karya kolaborasi dari beberapa kontributor baik akademisi maupun praktisi di bidang pendidikan yang menghadirkan berbagai pandangan dan penelitian terbaru dalam bidang manajemen pendidikan. Buku ini merangkum gagasan, teori, dan praktik terkini yang relevan dalam mengelola lembaga pendidikan. Buku ini juga mengeksplorasi beragam topik penting dalam manajemen pendidikan, mulai dari landasan filosofi manajemen pendidikan, hingga manajemen pendidikan di era digitalisasi. Pembaca akan dibimbing melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola dan memimpin sebuah lembaga pendidikan secara efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika serta tantangan zaman yang terus berkembang. Melalui studi kasus, tinjauan literatur, dan penelitian empiris, buku ini memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang berbagai pendekatan terbaik dalam manajemen pendidikan. Para pembaca, baik praktisi pendidikan, akademisi, maupun mahasiswa, akan mendapatkan pemahaman yang kokoh tentang teori-teori manajemen yang relevan serta penerapannya dalam konteks pendidikan. Buku "Manajemen Pendidikan" ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan, tetapi juga menjadi panduan yang inspiratif bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami dan memperbaiki sistem pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.



Penerbit :

CV. AINA MEDIA BASWARA

Lingk. Manis Tunas II Rt. 011 Rw. 003
Purwawinangun Kuningan Jawa Barat 45512

Email : ainamediabaswara@gmail.com

Website : penerbitainamediabaswara.com

